



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026





PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
 - b. acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1053



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.5 Sistematika RKPD.....	I-11
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-45
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-103
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-108
2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis).....	II-108
2.2.2 Permasalahan pembangunan	II-112
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .	 III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau	III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026	III-7
3.2.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-11
 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	IV-1
4.1.1 Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-7
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-7
4.2.2 Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-7



4.3	Keterkaitan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Wilayah Sekitarnya	IV-37
4.4	Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional.....	IV-37
4.5	Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM	IV-70
4.6	Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs...	IV-74
4.7	Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem.....	IV-70
4.8	Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting.....	IV-89
4.9	Program Inovasi Daerah	IV-94
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....		V-1
5.1	Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah	V-1
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	V-1
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		VI-1
6.1	Kerangka Pendanaan.....	VI-1
6.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		VII-1
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VII-1
7.2	Indikator Kinerja Daerah	VII-2
BAB VIII PENUTUP.....		VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau	II -	2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007	II -	2
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II -	3
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau	II -	3
Tabel 2.5	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	II -	4
Tabel 2.6	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota	II -	5
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	II -	5
Tabel 2.8	Daftar DAS di WS Kepulauan Riau	II -	7
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2024	II -	9
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II -	18
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II -	19
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	II -	21
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II -	22
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau	II -	24
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II -	25
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II -	26



Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II -	28
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II -	29
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024	II -	31
Tabel 2.20	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II -	32
Tabel 2.21	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II -	32
Tabel 2.22	IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024	II -	35
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	46
Tabel 2.24	Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	48
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	52
Tabel 2.26	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	II -	53
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	54
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	56
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	58



Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	60
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	61
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	63
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	64
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	65
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	67
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	68
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	69
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	70
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	71
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	72
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	73
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	75
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	76
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	77



Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	78
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	79
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	81
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	82
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	84
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	85
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	87
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	88
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	89
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	90
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	90
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	92
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	II -	93
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	94
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2024	II -	95
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	96



Tabel 2.61	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	97
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	98
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	99
Tabel 2.64	Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	100
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	101
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II -	102
Tabel 2.67	Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	103
Tabel 2.68	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2024	II -	103
Tabel 2.69	Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	104
Tabel 2.70	Jumlah Hotel/Penginapan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	104
Tabel 2.71	Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II -	105
Tabel 2.72	Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2024	II -	107
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026	III -	6
Tabel 3.2	Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau	III -	7
Tabel 3.3	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (rupiah)	III -	12



Tabel 3.4	Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	III -	17
Tabel 4.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2026	IV -	3
Tabel 4.2	Kegiatan Prioritas Utama RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	IV -	9
Tabel 4.3	Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	IV -	17
Tabel 4.4	Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional	IV -	42
Tabel 4.5	Program, dan Subkegiatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dalam mendukung Program Strategis Nasional	IV -	67
Tabel 4.6	Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau	IV -	71
Tabel 4.7	Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau	IV -	75
Tabel 4.8	Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	IV -	81
Tabel 4.9	Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Penanganan Stunting Provinsi Kepulauan Riau	IV -	90
Tabel 5.1	Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna - Kepulauan Anambas	V -	4
Tabel 5.2	Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang	V -	7
Tabel 5.3	Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga	V -	11
Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026	VI -	1
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	VI -	2
Tabel 6.3	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	VI -	3



Tabel 6.4	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VI -	4
Tabel 6.5	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	VI -	5
Tabel 6.6	Program dan Kegiatan Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	VI -	5
Tabel 6.7	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	VI -	7
Tabel 6.8	Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	VI -	7
Tabel 6.9	Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VI -	8
Tabel 6.10	Program dan Kegiatan Urusan Pangan	VI -	10
Tabel 6.11	Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan	VI -	11
Tabel 6.12	Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup	VI -	11
Tabel 6.13	Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	VI -	12
Tabel 6.14	Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	VI -	12
Tabel 6.15	Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VI -	13
Tabel 6.16	Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan	VI -	14
Tabel 6.17	Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika	VI -	15
Tabel 6.18	Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	VI -	16
Tabel 6.19	Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal	VI -	16
Tabel 6.20	Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	VI -	17
Tabel 6.21	Program dan Kegiatan Urusan Statistik	VI -	18
Tabel 6.22	Program dan Kegiatan Urusan Persandian	VI -	18
Tabel 6.23	Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	VI -	19
Tabel 6.24	Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan	VI -	19
Tabel 6.25	Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan	VI -	20



Tabel 6.26	Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan	VI -	21
Tabel 6.27	Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata	VI -	22
Tabel 6.28	Program dan Kegiatan Urusan Pertanian	VI -	22
Tabel 6.29	Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan	VI -	23
Tabel 6.30	Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	VI -	24
Tabel 6.31	Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan	VI -	25
Tabel 6.32	Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian	VI -	27
Tabel 6.33	Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi	VI -	27
Tabel 6.34	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Daerah	VI -	28
Tabel 6.35	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD	VI -	29
Tabel 6.36	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	VI -	29
Tabel 6.37	Program, Indikator Unsur Penunjang Keuangan	VI -	30
Tabel 6.38	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian	VI -	31
Tabel 6.39	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	VI -	32
Tabel 6.40	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	VI -	32
Tabel 6.41	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan	VI -	33
Tabel 6.42	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung	VI -	33
Tabel 6.43	Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengawasan	VI -	34
Tabel 6.44	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	VI -	34
Tabel 6.45	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	VI -	35



Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	VI - 1
Tabel 7.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	VI - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2026	I - 4
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026	I - 5
Gambar 1.3	Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 9
Gambar 2.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	II - 1
Gambar 2.2	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II - 19
Gambar 2.3	Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II - 20
Gambar 2.4	Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	II - 21
Gambar 2.5	Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 23
Gambar 2.6	Grafik Potensi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 24
Gambar 2.7	Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II - 26
Gambar 2.8	Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II - 27
Gambar 2.9	Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II - 29
Gambar 2.10	Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II - 30
Gambar 2.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II - 34
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2024 (%).	II - 34

Gambar 2.13	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 35
Gambar 2.14	Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024	II - 36
Gambar 2.15	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024 (%)	II - 37
Gambar 2.16	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 37
Gambar 2.17	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024	II - 38
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II - 39
Gambar 2.19	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024	II - 39
Gambar 2.20	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024	II - 40
Gambar 2.21	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024	II - 40
Gambar 2.22	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II - 41
Gambar 2.23	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024	II - 41
Gambar 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II - 42
Gambar 2.25	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024	II - 42
Gambar 2.26	Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023	II - 43



Gambar 2.27	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022-Agustus 2024	II - 106
Gambar 2.28	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024 (%)	II - 110
Gambar 2.29	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2024	II - 112
Gambar 4.1	Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2026, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.	IV - 12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata**. Perwujudan visi daerah tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang memberikan penekanan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD yang masih berlaku juga memedomani RPJMD Tahun 2025-2029 yang secara simultan sedang disusun. Selain itu, agar juga diberikan penjelasan keterkaitan dengan kebijakan perencanaan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi penjabaran atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka sistem pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang direncanakan untuk tahun 2026, dan kebijakan perencanaan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan multisektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2026, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKPD Provinsi



Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan ***money follows program*** melalui **penganggaran berbasis kinerja**, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan berorientasi pada proses dan pendekatan berorientasi pada substansi yaitu sebagai berikut.

- 1) Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan RKPD.
 - b. Kerjasama perguruan tinggi dan lembaga pengkajian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama maupun FGD terkait perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan RKPD dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti BPS, Bank Indonesia, dan seluruh perangkat daerah.
 - d. Perencana daerah yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RKPD, yaitu fungsional perencana dan aparatur yang telah mengikuti diklat/bimbingan teknis dibidang perencanaan.
- 2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bentuk implementasi pendekatan partisipatif diwujudkan dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, meliputi masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Pendekatan *Bottom-up* dan *Top Down*
Pendekatan *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota yang pelaksanaannya dilakukan sejak Bulan Januari Tahun 2025, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk riil pendekatan Bottom-up dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepri sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan/kerjasama stakeholder dalam forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang.



- b. Ketersediaan Mekanisme Proses Penyusunan dalam bentuk Pedoman Forum Perangkat Daerah dan Pedoman Musrenbang.
- c. Pemanfaatan teknologi dalam penyampaian usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah tertuang dalam Surat ke Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
- d. Usulan Murenbang dari Kabupaten/Kota yang diakomodir kedalam dokumen RKPD Provinsi Kepri.

Pendekatan *Top-down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang didalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibahas dan diselaraskan dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis Nasional. Pendekatan top down juga dilakukan dengan mengundang narasumber dari pemerintah pusat dalam Konsultasi Publik, Musrenbang, Rakortek, dan Program/kegiatan dukungan daerah ke pusat melalui aplikasi KRISNA.

- 4) Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya janji politik kepala daerah dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan konsultasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dengan DPRD.
- 5) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 6) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- 7) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.



Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui SIPD RI. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat yang bersumber dari APBD dilakukan melalui SIPD RI.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan dengan tahapan mulai

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2026, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, konsultasi publik RKPD serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun

2026. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakor Teknis tek, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

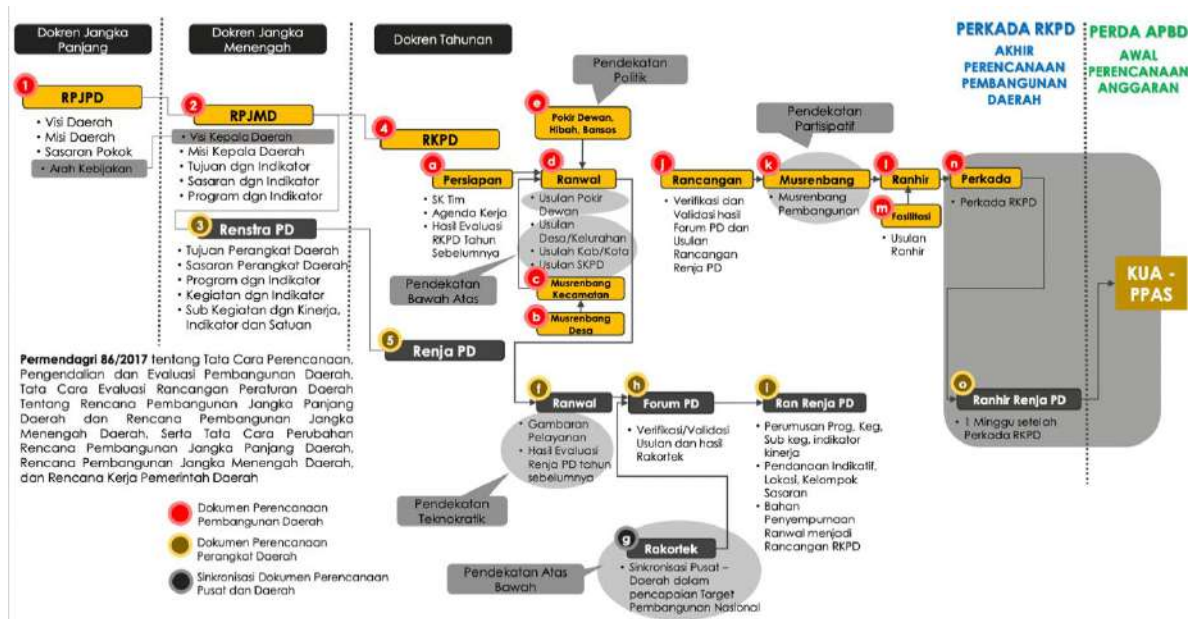
5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD tahun 2026 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

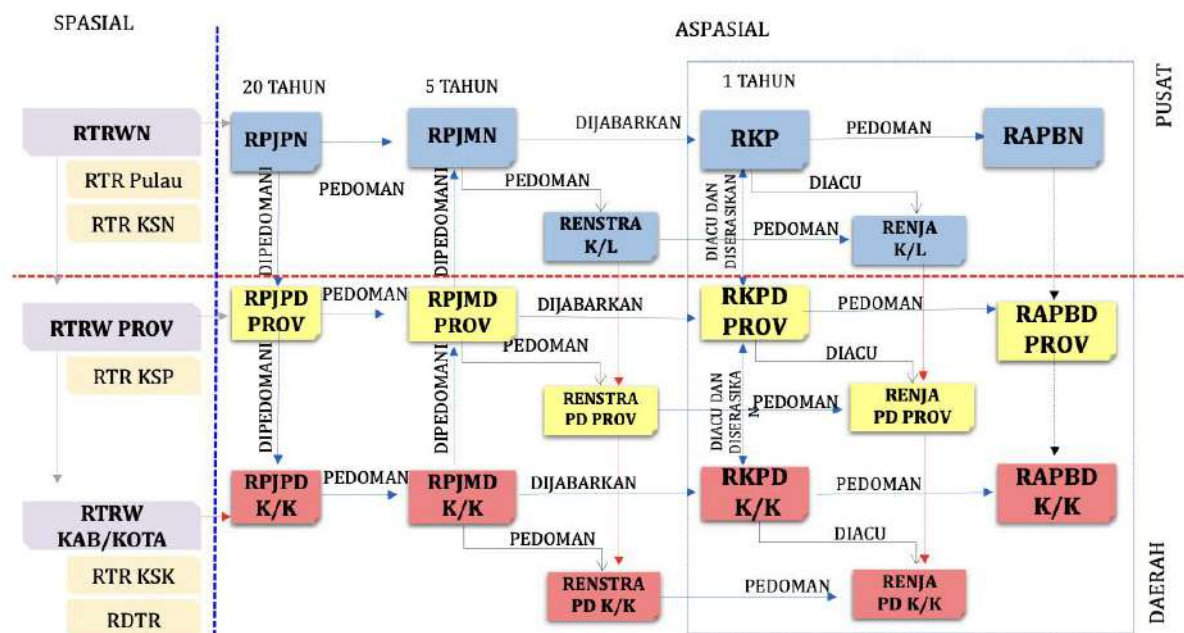
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026, RKPD Provinsi Kepulauan Riau memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan nasional dan kabupaten/kota. RKPD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. RKPD juga memberikan dukungan terhadap keberhasilan atas pencapaian Asta Cita dan RKP Tahun 2026. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penjelasan keterkaitan erat antara RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026

RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, terutama terkait prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dan arah pembangunan wilayah yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD tahun 2026 merupakan RKPD tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dengan demikian RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

3. Hubungan RKPD dengan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

4. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

5. Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yaitu:

1. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan



- Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
2. menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah sebagai :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan dasar dalam membuat kerangka acuan kerja penyusunan RAPBD Tahun 2026.
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
4. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

1.5 Sistematika RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, terdiri dari enam (6) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, rumusan maksud dan tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang aspek kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, isu-isu strategis pembangunan tahun 2026, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Berisi tentang sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2026.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026

Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas dan rencana kerja pembangunan tahun 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta target kinerja yang akan dicapai tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD tahun 2026 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

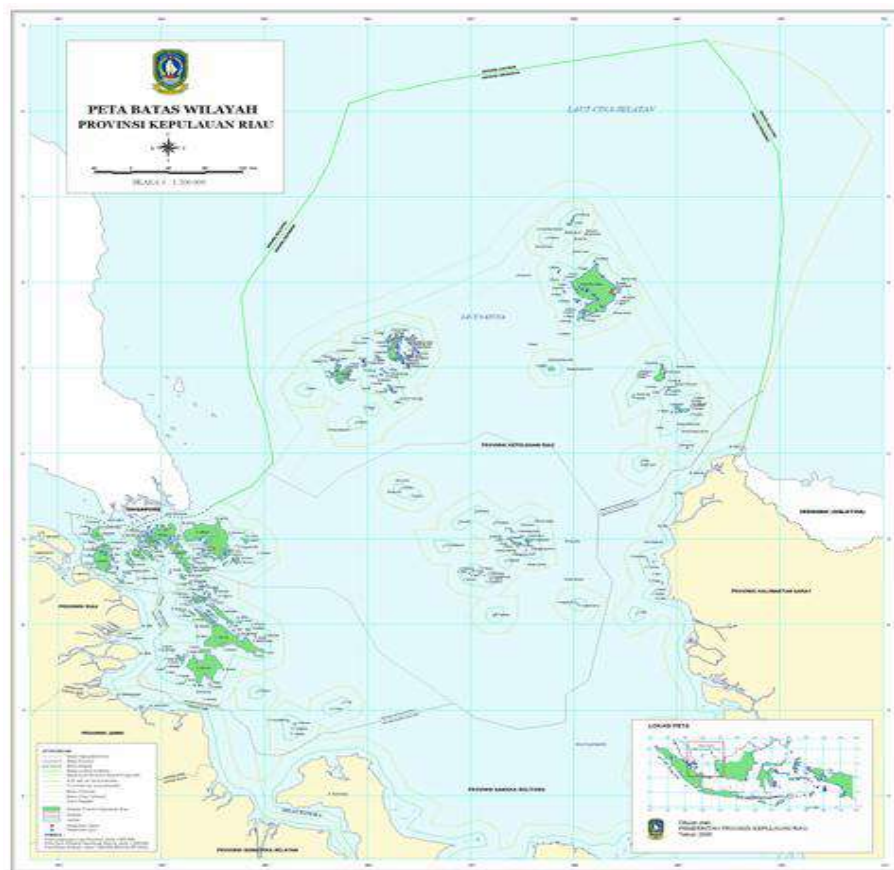
2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km², terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan (saat ini Laut Natuna Utara)
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan (saat ini Provinsi Bangka Belitung) dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau lebih kurang 98% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan 5 (lima) kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2894 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	916,331
2.	Kabupaten Bintan	1.311,868
3.	Kabupaten Natuna	1.978,010
4.	Kabupaten Lingga	2.173,630
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	620,622
6.	Kota Batam	1.020,280
7.	Kota Tanjungpinang	149,634
	Total	8.170,375

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007



2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (2016)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
0	Provinsi Kepulauan Riau	14	1
1	Kota Tanjungpinang	8	3
2	Kabupaten Bintan	263	32
3	Kota Batam	454	80
4	Kabupaten Karimun	248	45
5	Kabupaten Lingga	630	82
6	Kabupaten Natuna	172	30
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	239	21
Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau		2.028	294

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 2.5
Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Kecil
2	Kota Batam	4	Pulau Pelampung, Pulau Nipa, Pulau Batu Berantai/Batu Berhanti, Pulau Nongsa/Putri
3	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
5	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala
	Jumlah	22	

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 - 50 meter dpl, 50 - 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 - 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 - 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	7 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2024)

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2024)

2.1.1.4 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di



Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*,



glei humus, *podsolik* merah kunicng, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulk density* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung *glei* dan bertotol kuning, merah dan cokelat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Daftar DAS di WS Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43



No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebuh	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekan	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang. Suhu udara maksimum selama tahun 2023 terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan suhu 34,9 derajat celsius dan kondisi suhu udara maksimum terendah terjadi di Kabupaten Natuna yaitu sekitar 29,4 derajat Celsius. Sedangkan untuk kelembaban udara minimum terjadi di Kota Batam dengan kelembaban sebesar 45 persen. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2023 terjadi di Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 230 hari hujan dan hari hujan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 155 hari hujan.

Secara lebih rinci, rata-rata kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel berikut.



Tabel 2.9
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Curah Hujan (mm ³)	Penyinaran Matahari (jam)
Karimun	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	22,0	51,0	1.009,1	2,9	2.251,7	3,8
Bintan	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	22,4	46,0	1.006,2	1,9	2.908,0	5,3
Natuna	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	23,1	61,0	1.010,6	4,3	2.385,1	4,5
Lingga	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	19,6	57,0	1.010,1	4,1	2.737,2	5,9
Kepulauan Anambas	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	23,0	51,0	1.009,6	3,4	2.070,2	4,6
Batam	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	22,3	51,0	1.012,0	5,4	2.872,5	4,2
Tanjungpinang	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	23,0	72,5	1.008,2	4,1	3.455,7	5,3

Sumber: BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024.

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.



2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana).

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

b) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. Ketinggian < 2.000 m dpl;
- b. Kelerengan 40%;
- c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:

- a. Zona Inti
Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.
- b. Zona Perikanan Berkelanjutan
Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
- c. Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
- d. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

d. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)



Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Barek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- a) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.



- b) Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;

- a) Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- b) Tersedia sistem air baku yang cukup;
- c) Adanya sistem pembuangan limbah;
- d) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;
- e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di :

- a) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang)
- b) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
- c) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
- d) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
- e) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
- f) Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
- g) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).



6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpijak pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia



(NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b) Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
- c) Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan

Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat muatan kapal Ship to Ship (STS) Transfer), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Alur laut

Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.



2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

1. Bahaya Banjir

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019).

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

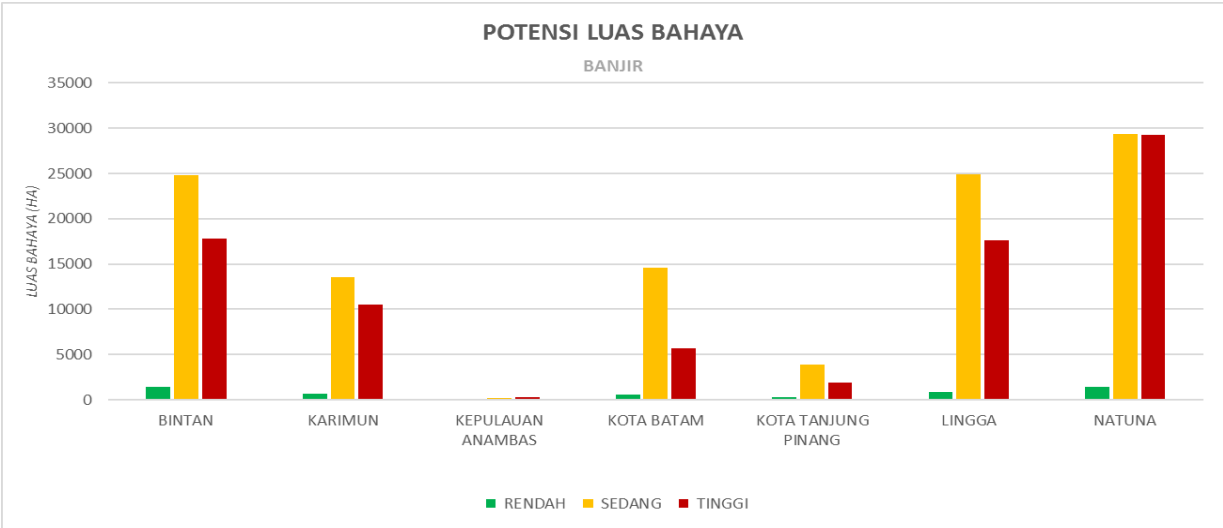
Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	1.379	24.818	17.854	44.051	TINGGI
2	KARIMUN	642	13.531	10.471	24.644	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	32	235	327	594	TINGGI
4	LINGGA	890	24.872	17.618	43.379	TINGGI
5	NATUNA	1.413	29.372	29.242	60.028	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	607	14.632	5.731	20.970	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	310	3.879	1.880	6.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		5.273	111.339	83.123	199.735	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak banjir.



Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 199.735 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.273 Ha, kelas sedang seluas 111.339 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 83.123 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.2 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya banjir. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Natuna dengan luas 1.413 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Natuna dengan luas 29.372 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna dengan luas 29.242 Ha.

2. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau pada tiap-tiap kabupaten, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	KEPULAUAN ANAMBAS	3	30	52	85	TINGGI

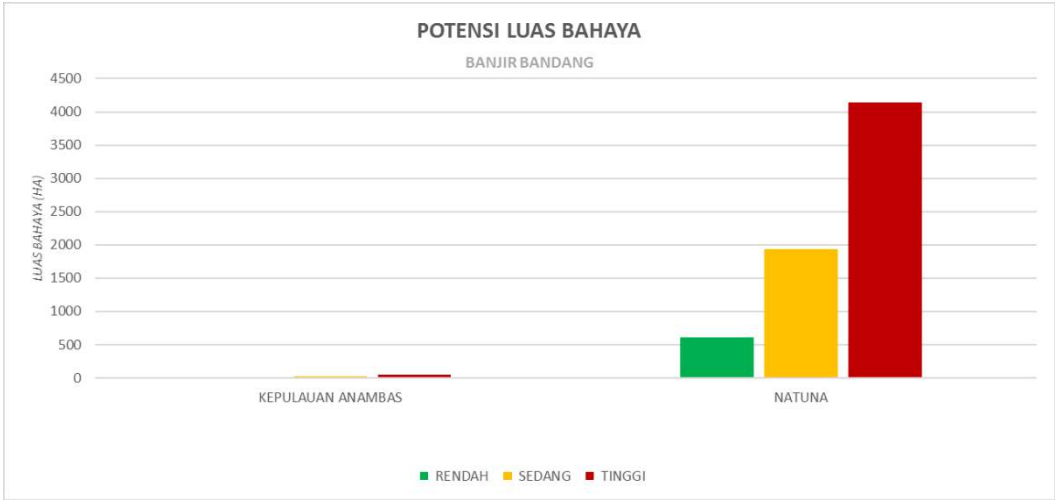


Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
2	NATUNA	604	1.942	4.141	6.687	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		606	1.971	4.194	6.771	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau adalah 6.771 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 606 Ha, kelas sedang seluas 1.971 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 4.194 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bahaya banjir bandang. Bahaya banjir bandang berpotensi terjadi di 2 kabupaten dengan luas bahaya tertinggi di kelas rendah adalah Kabupaten Natuna, yakni seluas 604 Ha. pada kelas sedang yakni seluas 1.971 Ha dan kelas tinggi seluas 4.194 Ha.

3. Bahaya Cuaca Ekstrem

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrem



tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

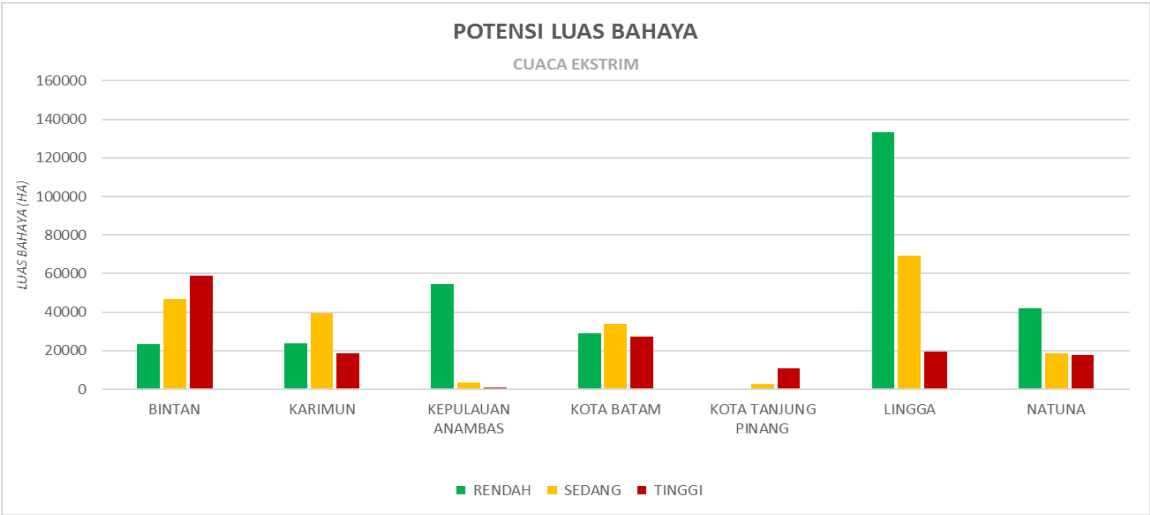
Tabel 2.12
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	23.278	46.792	59.108	129.179	TINGGI
2	KARIMUN	23.674	39.513	18.694	81.880	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	54.463	3.397	681	58.541	RENDAH
4	LINGGA	133.562	69.102	19.683	222.347	SEDANG
5	NATUNA	42.133	18.813	17.913	78.859	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	29.099	33.973	27.282	90.355	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	117	2.515	11.059	13.691	TINGGI
	Provinsi Kepulauan Riau	306.327	214.106	154.420	674.852	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah seluas 674.852 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 306.327 Ha, pada kelas sedang seluas 214.106 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 154.420 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau



Pada gambar di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dan sedang terdapat di Kabupaten Lingga dengan luas masing-masing yaitu 133.562 Ha dan 69.102 Ha. Sementara itu kabupaten yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kabupaten Bintan yaitu 59.108 Ha.

4. Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaansiklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utamaabrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis bencana, (<http://www.bnpb.go.id>)).

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusunan tersebut terdiri dari tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut di atas, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

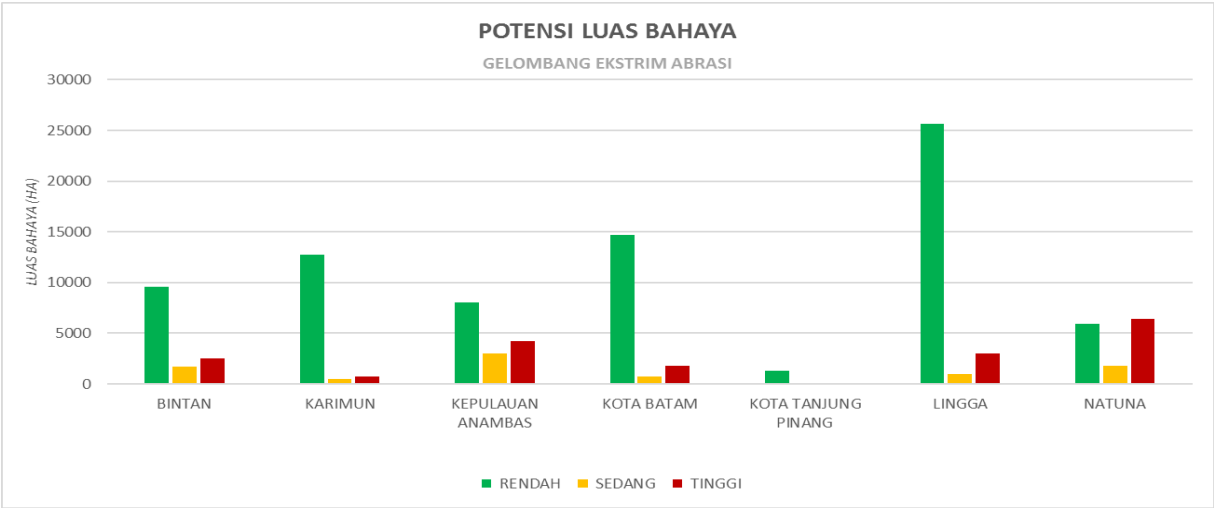
Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	9.551	1.688	2.538	13.777	RENDAH
2	KARIMUN	12.759	486	735	13.980	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	8.026	3.002	4.257	15.284	TINGGI
4	LINGGA	25.650	1.014	3.006	29.669	TINGGI
5	NATUNA	5.965	1.780	6.418	14.163	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	14.678	735	1.754	17.168	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	1.299	0	33	1.332	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau		77.927	8.705	18.741	105.373	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026



Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahayagelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 105.373 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 77.927 Ha, pada kelas sedang seluas 8.705 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 18.741 ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dengan Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah seluas 25.650 Ha. Untuk kelas sedang di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 3.002 Ha Sementara itu untuk daerah yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi yaitu Kabupaten Natuna, yakni seluas 6.418 Ha.

5. Bahaya Gempabumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhuan batuan. Dari penjelasan bencana gempabumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter - parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai



berikut; (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

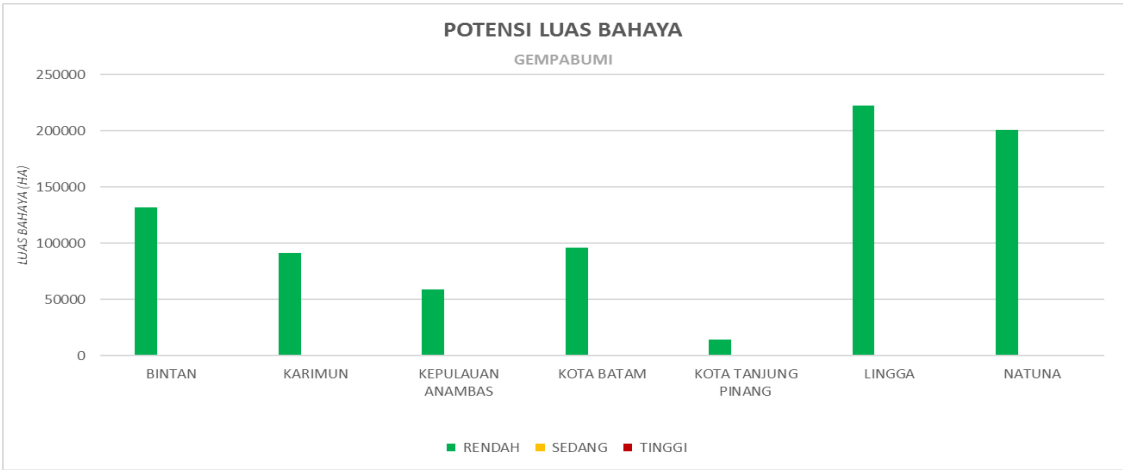
Tabel 2.14
Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	131.821	0	0	131.821	RENDAH
2	KARIMUN	91.275	0	0	91.275	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	59.014	0	0	59.014	RENDAH
4	LINGGA	222.347	0	0	222.347	RENDAH
5	NATUNA	200.904	0	0	200.904	RENDAH
B	Kota					
1	KOTA BATAM	96.025	0	0	96.025	RENDAH
2	KOTA TANJUNG PINANG	14.456	0	0	14.456	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau		815.842	0	0	815.842	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota.

Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas Rendah. Tidak ada daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam kelas bahaya gempabumi sedang dan tinggi.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau



Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi. Kabupaten Lingga adalah kabupaten terluas yang berpotensi terparap bencana gempabumiyakni 222.347 Ha.

6. Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam dokumen ini, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	11.261	71.575	7.528	90.364	SEDANG
2	KARIMUN	11.931	39.033	3.435	54.399	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	26.724	19.541	697	46.962	SEDANG
4	LINGGA	71.512	92.419	21.583	185.513	SEDANG
5	NATUNA	65.954	77.127	36.803	179.885	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	15.399	21.858	644	37.900	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	387	2.587	96	3.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		203.168	324.140	70.786	598.094	TINGGI

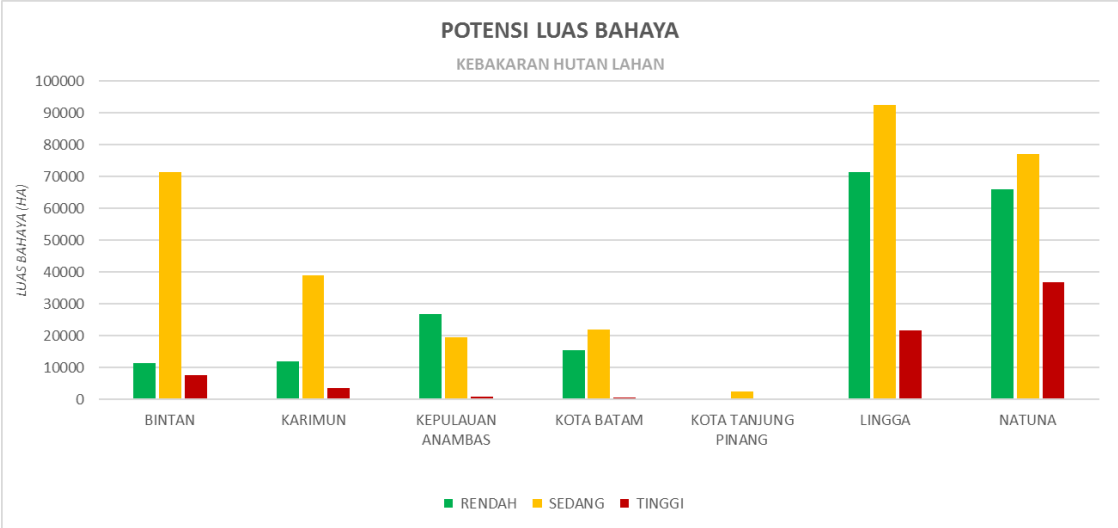
Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel 3.26 merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Secara keseluruhan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau adalah 598.094 Ha tergolong kelas bahaya Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 203.168 Ha, kelas



sedang seluas 324.140 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas 70.786 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah dan kelas sedang yaitu masing-masing seluas 71.512 Ha dan 92.419 Ha. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kabupaten Natuna yakni seluas 36.803 Ha.

7. Bahaya Kekeringan

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	0	122.023	9.798	131.821	TINGGI
2	KARIMUN	2.447	88.828	0	91.275	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	0	55.702	3.312	59.014	SEDANG
4	LINGGA	0	221.742	605	222.347	SEDANG
5	NATUNA	0	182.974	17.930	200.904	TINGGI

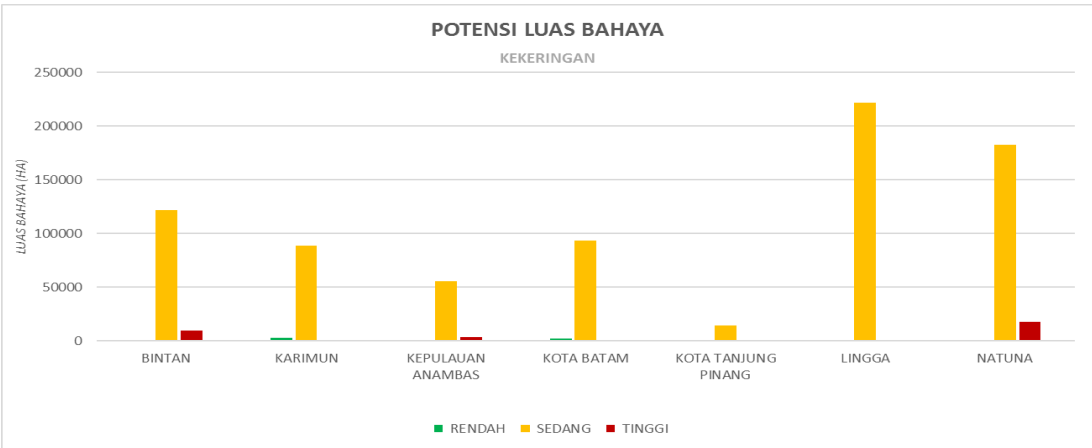


Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
B	Kota					
1	KOTA BATAM	2.375	93.650	0	96.025	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	0	14.456	0	14.456	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		4.823	779.374	31.645	815.842	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 4.823 Ha dan kelas sedang seluas 779.374 Ha, serta kelas tinggi seluas 31.645 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

Pada grafik di atas dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kota Batam menjadi wilayah yang memiliki luas bahaya kekeringan dengankelas Rendah terkecil yaitu seluas 2.375 Ha. Wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang adalah Kabupaten Lingga, yaitu seluas 221.742 Ha. Wilaya dengan luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna, yaitu seluas 17.930 Ha.



8. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

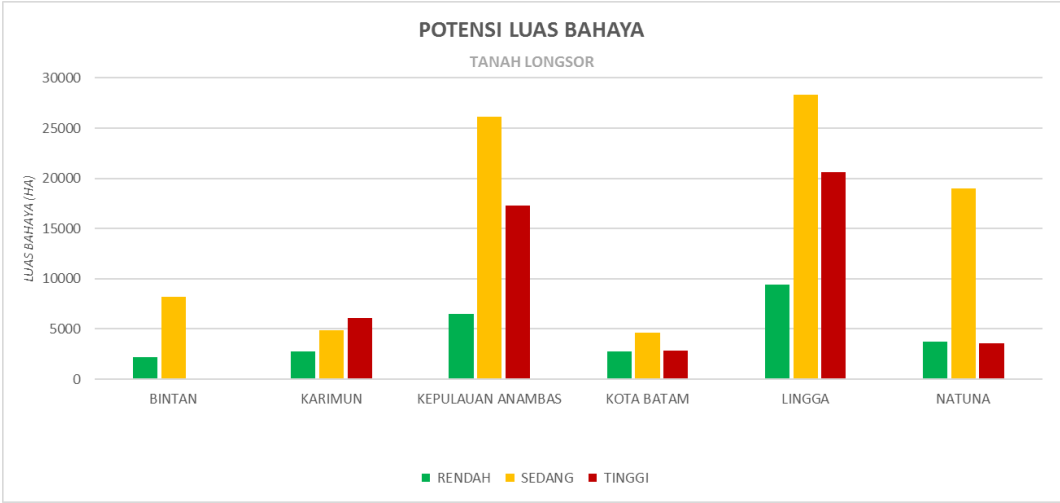
Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	2.157	8.191	0	10.348	SEDANG
2	KARIMUN	2.805	4.894	6.129	13.828	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	6.459	26.150	17.270	49.879	TINGGI
4	LINGGA	9.420	28.348	20.604	58.371	TINGGI
5	NATUNA	3.751	18.988	3.616	26.355	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	2.764	4.647	2.870	10.281	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		27.355	91.218	50.489	169.062	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 169.062 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 27.355 Ha, kelas sedang seluas 91.218 Ha dan kelas tinggi seluas 50.489 Ha.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026
Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

Gambar di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana tanah longsor. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah yaitu 9.420 Ha, kelas sedang seluas 28.348 Ha dan kelas tinggi dengan luas yaitu 20.604 Ha.

9. Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah terdampak kegagalan teknologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	8.674	0	0	8.674	RENDAH
2	KARIMUN	4.014	0	0	4.014	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	523	0	0	523	RENDAH
4	LINGGA	378	0	0	378	RENDAH
5	NATUNA	1.485	0	0	1.485	RENDAH

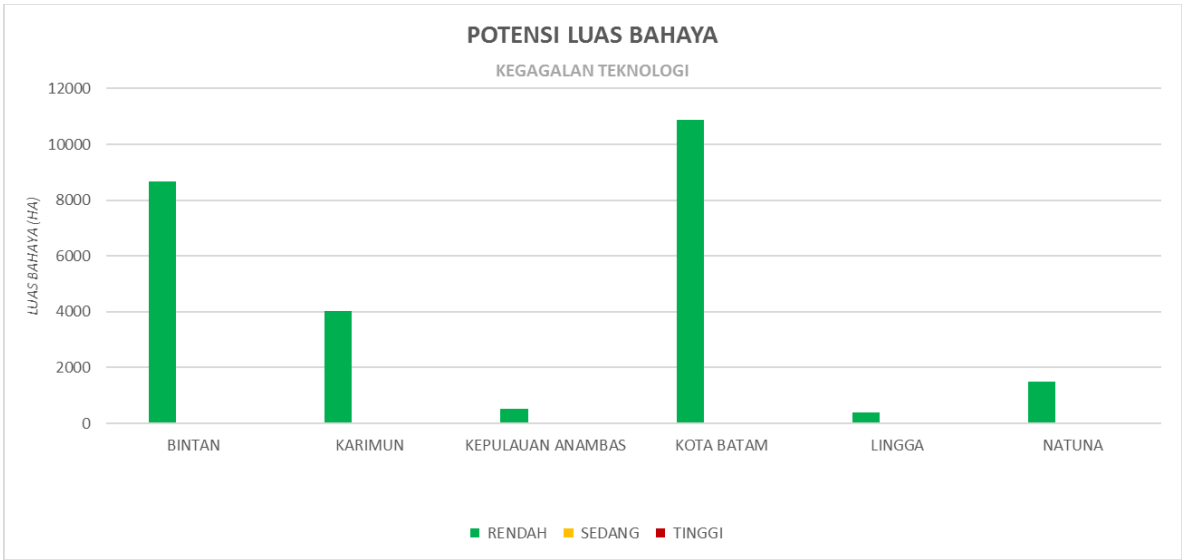


Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
B	Kota					
1	KOTA BATAM	10.893	0	0	10.893	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau		25.967	0	0	25.967	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi.

Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas 25.967 Ha dan berada pada kelas Rendah.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kota Batam seluas 10.893 Ha, sedangkan Kabupaten Lingga adalah wilayah yang memiliki luas terendah bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah dengan luas 378 Ha.

2.1.1.8 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2023 sebanyak 2.082.785 jiwa, terdiri dari 1.068.834 jiwa laki-laki dan 1.032.381 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar



103,39, artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 260 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yaitu sebanyak 1.240.792 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 49.274 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (Semester I 2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah (Ribuan jiwa)	Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Bintan	168,19	86,52	81,67	105,30	128
2	Karimun	263,34	135,06	136,4	105,90	283
3	Natuna	85,66	44,04	41,63	105,80	43
4	Lingga	102,01	52,77	49,24	107,20	46
5	Kepulauan Anambas	49,73	25,72	24,01	107,01	79
6	Batam	1.276,93	645,59	631,34	102,3	1.234
7	Tanjung Pinang	237,43	119,91	117,53	102,00	1.579
8	Provinsi Kepulauan Riau	2.183,3	1.109,59	1.073,70	103,30	264

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar Rp 352.436.428,9 juta rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 331.644.524,6 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.20
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.047.270,10	8.461.827,90	9.225.890,90	9.689.013,07	10.355.531,3
B	Pertambangan dan Penggalian	28.365.899,70	34.696.081,00	38.839.295,30	37.035.068,86	34.242.440,1
C	Industri Pengolahan	105.789.964,40	115.852.489,00	126.038.598,40	132.991.968,14	144.628.950,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.602.411,30	2.733.325,10	3.263.278,30	3.557.080,35	3.865.207,1
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	281.458,40	279.639,10	306.162,70	322.412,45	343.474,1
F	Konstruksi	49.317.721,90	53.159.158,00	59.316.269,60	67.462.509,54	71.355.756,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	21.561.951,70	22.474.866,10	27.284.127,10	30.076.692,83	32.602.643,8
H	Transportasi dan Pergudangan	4.111.948,10	3.826.598,70	5.887.715,00	6.768.920,48	7.207.249,
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.388.221,60	3.167.569,30	4.874.867,80	6.301.872,59	6.681.445,0
J	Informasi dan Komunikasi	6.483.543,90	7.078.070,20	7.719.849,90	9.334.189,54	9.388.779,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.991.384,70	7.191.818,70	7.906.248,30	8.823.302,20	9.644.338,5
L	Real Estate	3.191.314,80	3.116.588,40	3.353.474,10	3.639.999,01	3.882.739,5
M,N	Jasa Perusahaan	5.815,10	6.634,30	8.476,30	10.521,93	11.973,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.347.301,60	6.697.960,20	7.202.778,50	7.886.502,38	9.223.367,3
P	Jasa Pendidikan	3.896.179,00	3.878.478,90	4.182.918,20	4.416.322,99	4.702.605,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.277.152,30	2.571.774,70	2.646.255,20	2.578.688,68	3.124.060,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	435.807,90	429.971,00	786.472,30	994.435,75	1.175.866,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		254.095.346,3	275.622.850,6	308.739.719,5	331.644.524,6	352.436.428,9

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar Rp 209.939.072,40 juta rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 199.912.825,40 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.21
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010
Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

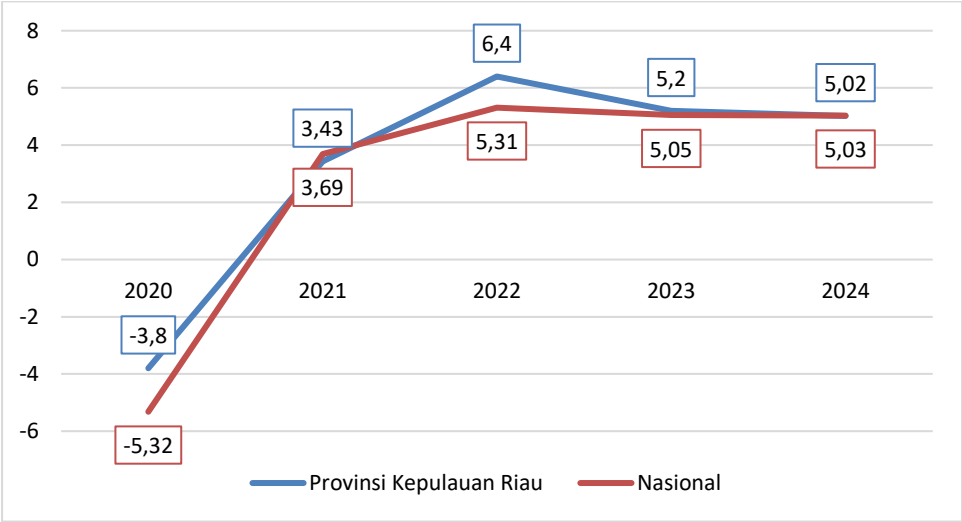
Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.466.778,56	5.322.051,79	5.601.856,80	5.687.634,50	5.720.172,30
B	Pertambangan dan Penggalian	24.933.546,87	24.748.824,45	23.015.612,20	22.406.259,90	20.650.992,60
C	Industri Pengolahan	71.325.791,90	75.925.345,99	79.348.156,20	81.302.960,00	87.616.690,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.580.657,23	1.648.930,50	1.919.007,50	2.073.119,60	2.222.426,40



Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218.654,78	218.681,16	237.959,40	248.556,30	253.486,20
F	Konstruksi	31.752.166,94	33.256.030,33	34.917.259,70	38.580.255,00	40.799.499,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.449.606,58	13.592.975,14	15.477.624,60	16.385.520,30	17.301.864,40
H	Transportasi dan Pergudangan	2.558.454,13	2.514.937,06	3.479.882,50	3.999.014,10	4.099.382,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.526.908,72	2.357.945,39	3.530.110,10	4.494.329,60	4.683.679,80
J	Informasi dan Komunikasi	5.392.392,50	5.909.454,29	6.421.117,80	7.702.878,60	7.698.404,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.798.291,00	4.833.245,99	5.035.023,10	5.470.376,70	5.875.896,70
L	Real Estate	2.330.974,37	2.247.923,44	2.352.271,40	2.475.660,50	2.614.138,90
M,N	Jasa Perusahaan	5.027,07	5.737,79	6.609,00	7.819,80	8.214,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.398.445,23	4.028.294,03	4.163.446,60	4.376.989,20	5.158.770,00
P	Jasa Pendidikan	2.259.576,18	2.183.171,54	2.255.618,80	2.342.977,70	2.435.309,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.679.459,59	1.886.035,12	1.885.751,40	1.794.915,20	2.146.713,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	282.473,77	272.858,67	463.780,40	563.558,50	653.430,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		174.959.205,44	180.952.442,66	190.163.695,64	199.912.825,40	209.939.072,40

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2025

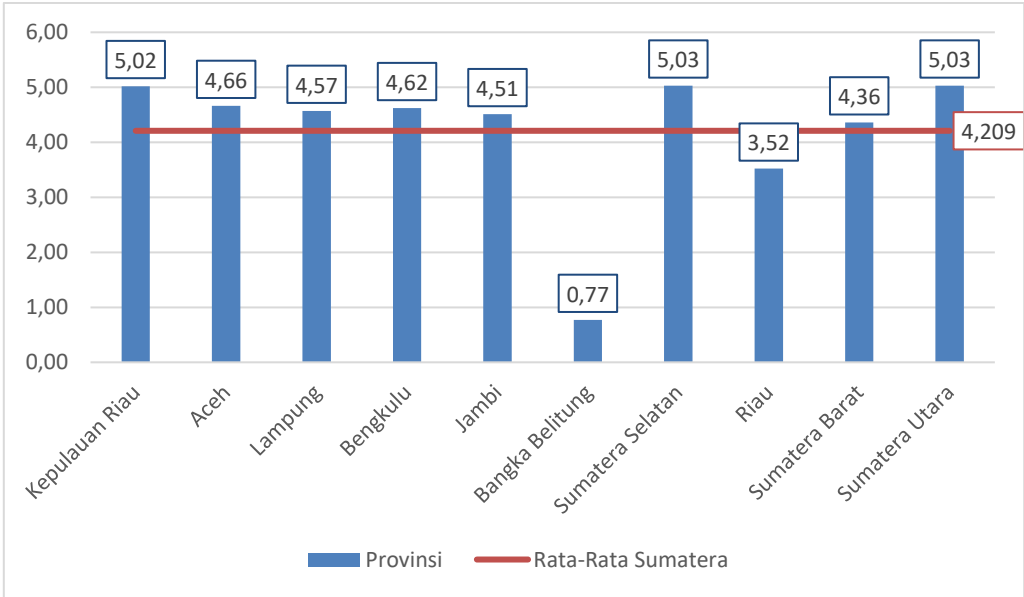
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar -3,8% dan pada tahun tersebut nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi daripada nilai dari Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -5,32%. Kemudian, pada tahun 2021 pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 3,43%. Hal tersebut terjadi karena perlambatan pergerakan konsumsi di masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang merata terjadi secara Nasional. Relevan dengan Nasional dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,69%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 6,40%, dan di atas nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan di angka 5,20%. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024 dan BPS Nasional 2025

Gambar 2.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 5,02% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,209% dan Nasional sebesar 5,05%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS RI dan BPS Kepulauan Riau, 2025

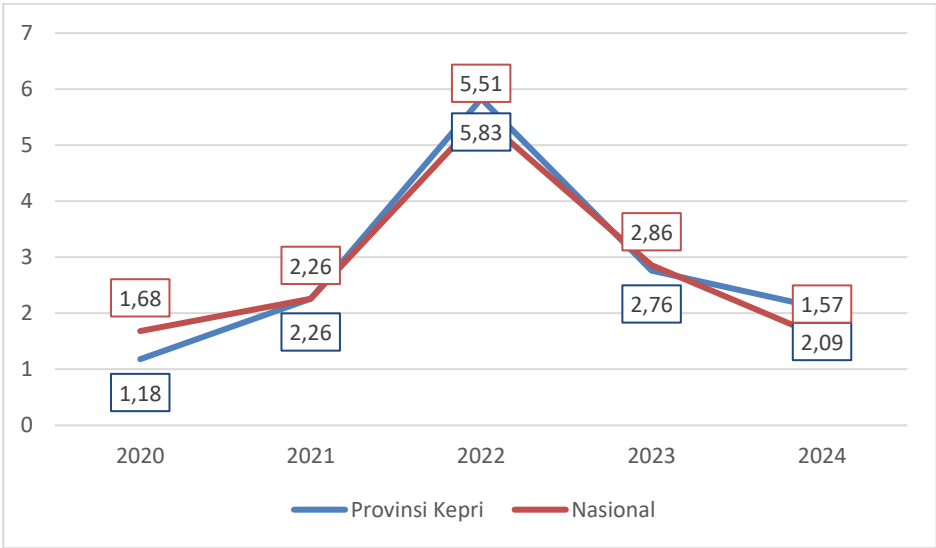
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2024 (%).

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan dari sebesar 1,18% pada tahun 2020, menjadi 1,57% pada tahun 2024. Tingkat inflasi year on



year (yoy) tahun 2024 sebesar 1,57 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 5,51 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,24 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 1,53 persen. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.13 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024

Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau selama tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,72 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,30 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2023	IHK Des 2024	Inflasi mtm Des 2024	Inflasi yoy Des 2024	Adil Inflasi Des 2024	Andil Inflasi yoy
Umum	105,15	107,35	0,68	2,09	0,68	2,09
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,66	110,31	2,05	2,46	0,61	0,72
Pakaian dan Alas Kaki	104,12	106,32	-0,14	2,65	-0,01	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,51	105,23	0,03	2,65	~0	0,42
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan	101,82	101,60	-0,05	-0,22	~0	-0,01

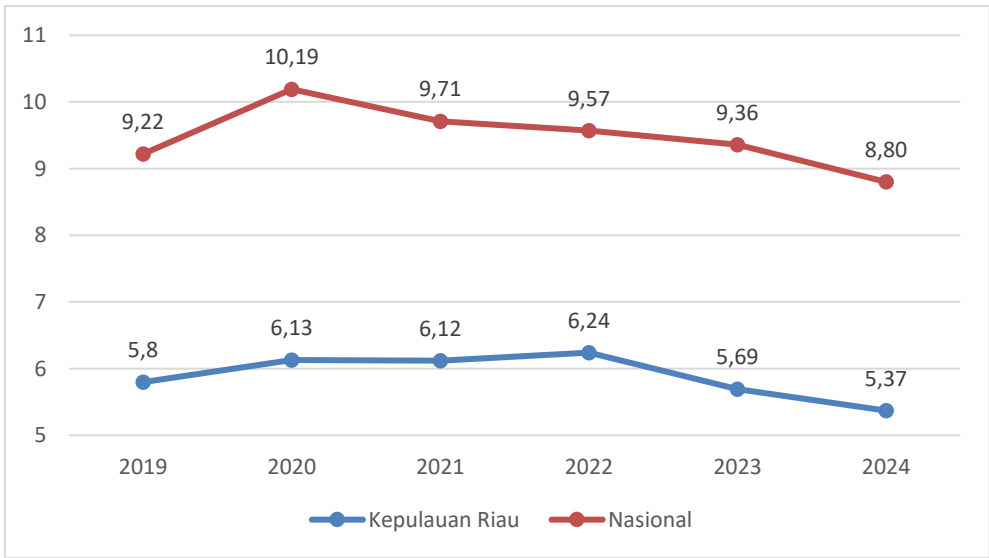


Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2023	IHK Des 2024	Inflasi mtm Des 2024	Inflasi yoy Des 2024	Adil Inflasi Des 2024	Andil Inflasi yoy
Rutin Rumah Tangga						
Kesehatan	99,88	104,11	0,12	4,24	~0	0,10
Transportasi	110,51	112,86	0,53	2,13	0,07	0,30
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,07	99,97	~0	-0,1	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,69	102,23	~0	0,38	~0	0,01
Pendidikan	104,15	102,23	~0	-1,84	~0	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,58	103,02	0,02	1,42	~0	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,83	114,87	0,11	7,53	0,01	0,46

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

3. Penduduk Miskin

Pada September 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 138.30 ribu orang (5,37 persen). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 5,69% menurun di tahun 2023 menjadi 5,37%. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut.



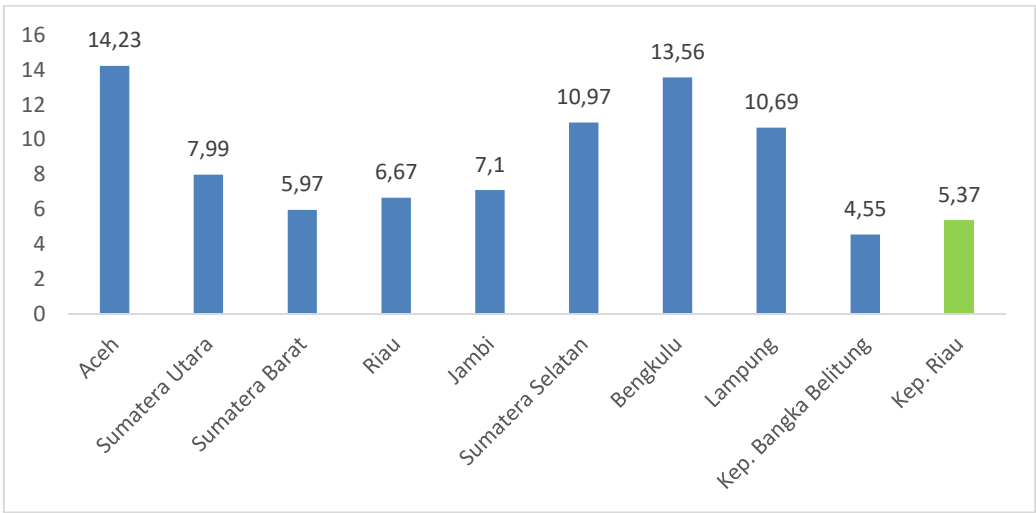
Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.14 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di sekitar wilayah Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling



rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

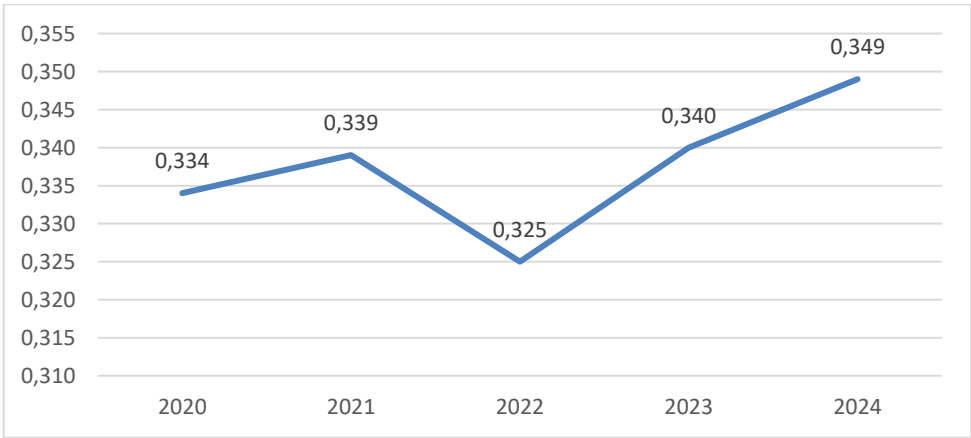


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024 (%)

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 - 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,349 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,340. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

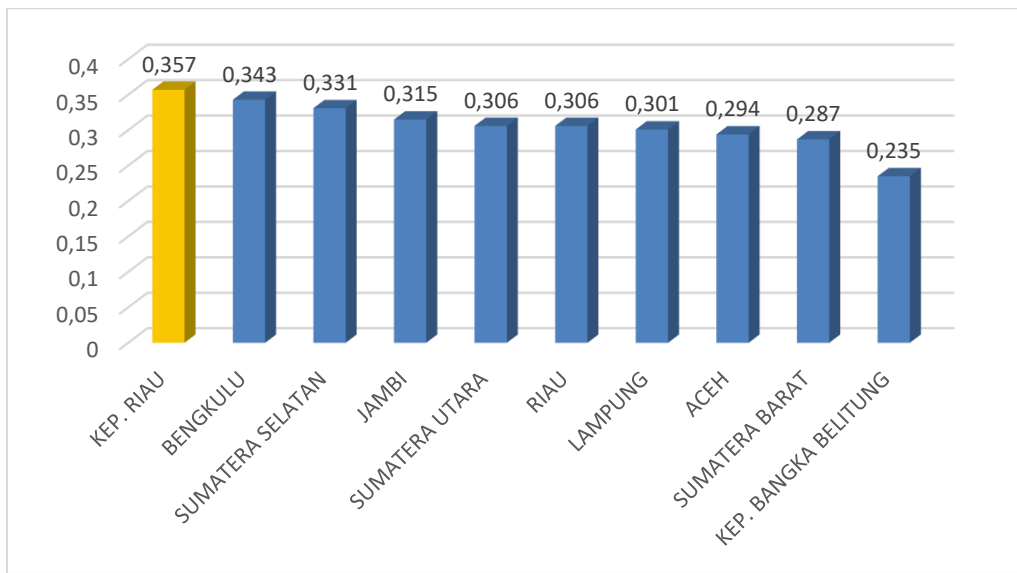


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Gambar 2.16 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024



Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2024, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 menempati posisi tertinggi. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.



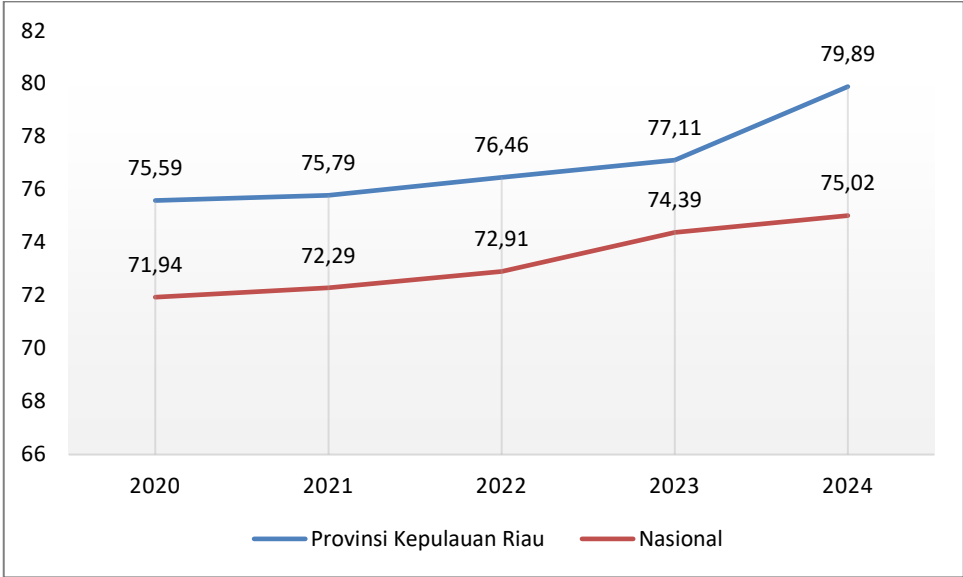
Sumber : BPS, 2025

Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

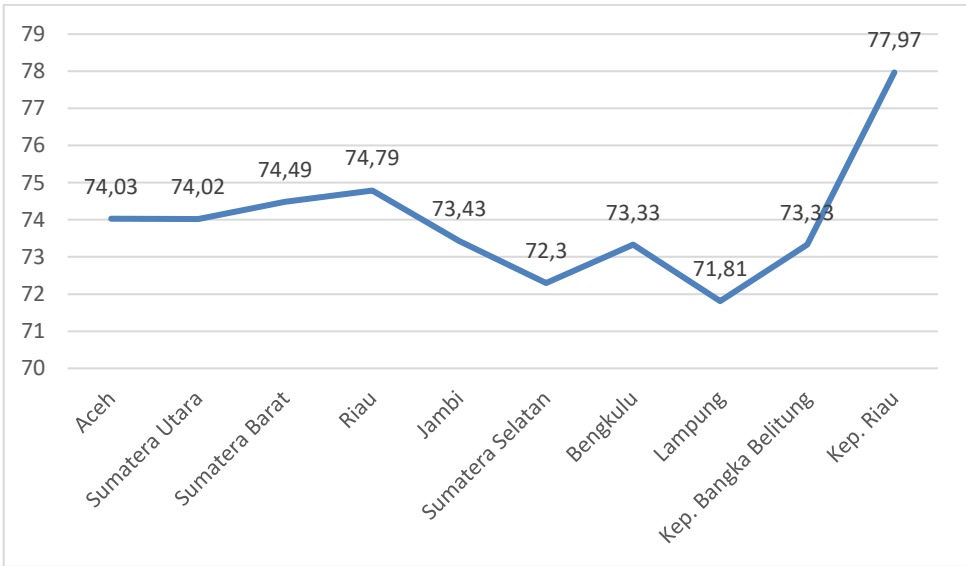
Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 79,89 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 77,11. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan sejalan dengan trend IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

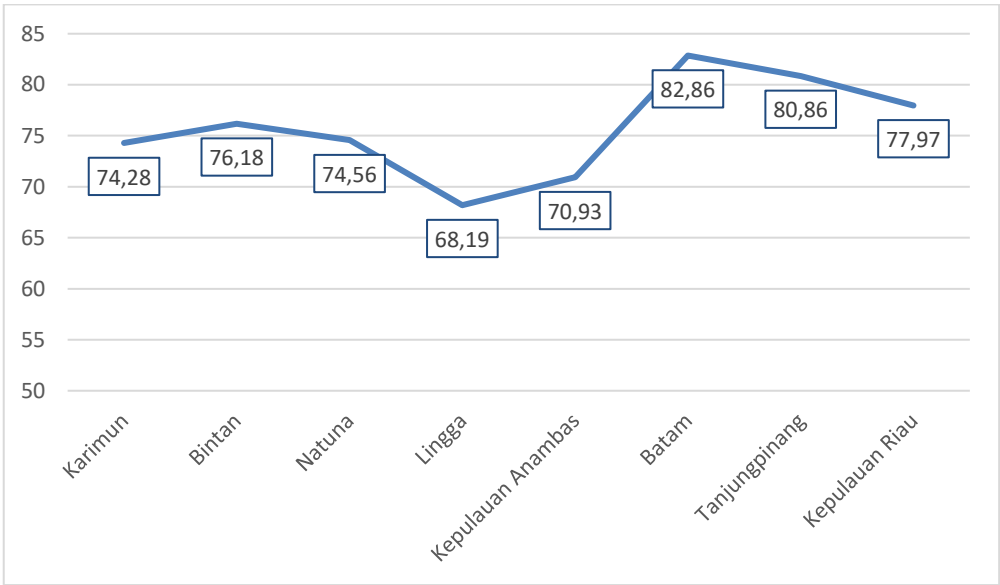
Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS, 2024

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 82,86, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 80,86. Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 68,19. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

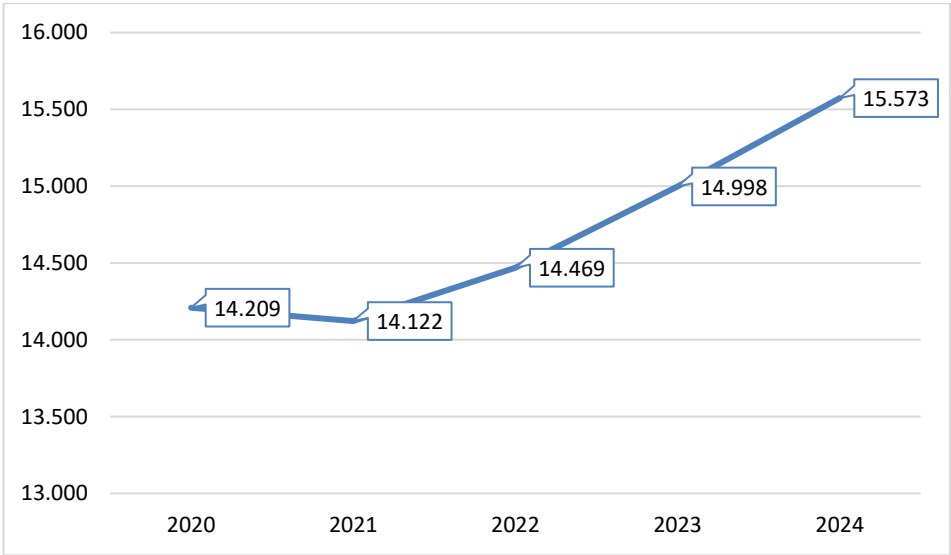


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Indeks Pembangunan Manusia 2024)

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024

6. Pengeluaran per kapita

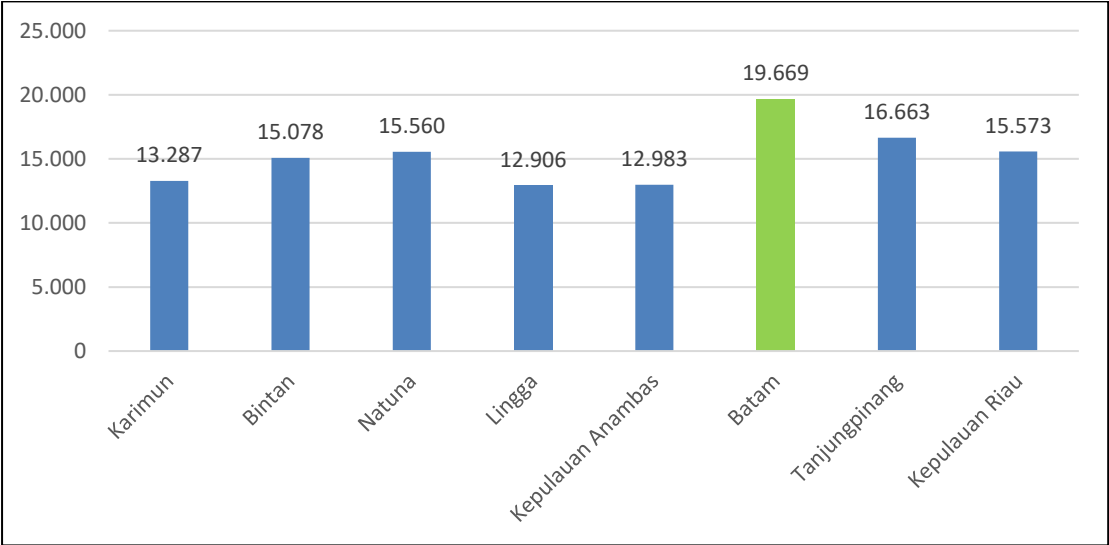
Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita sebesar 14.209 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 15.573 ribu rupiah pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Gambar 2.21 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024

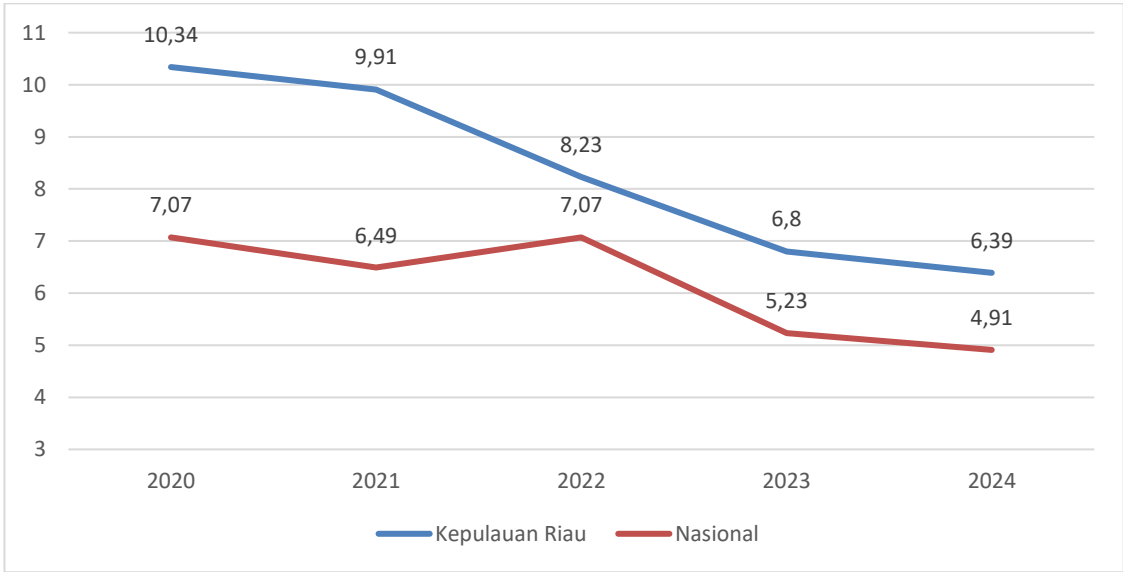
Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 19.669 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Lingga sebesar 12.906 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024
Gambar 2.22 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

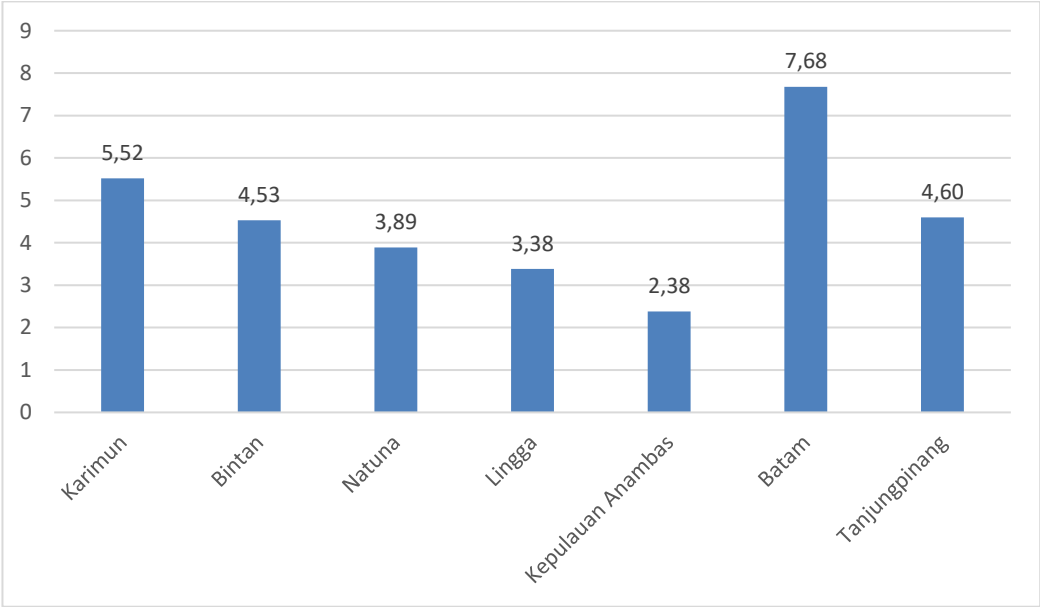
7. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 6,39%, menurun dari tahun 2023 sebesar 6,80%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 4,91%.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024

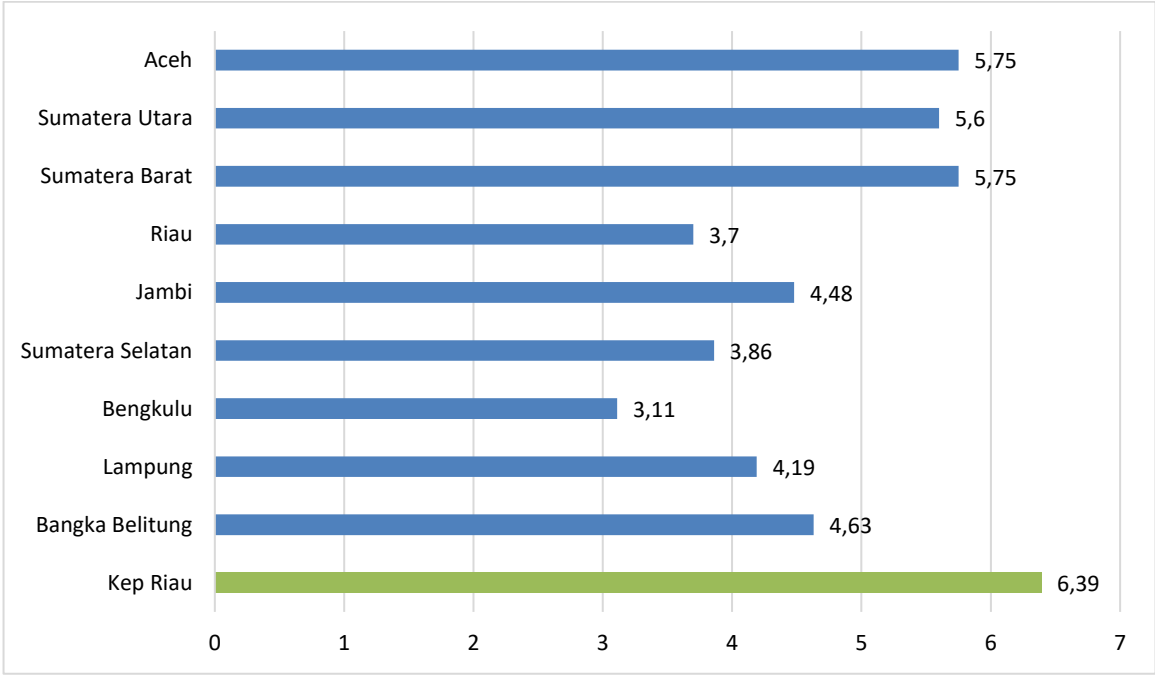
Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, maka dapat diketahui bahwa pengangguran tertinggi terdapat di Batam sebesar 7,68 persen. Kemudian pengangguran terendah terdapat di Kepulauan Anambas sebesar 2,38. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS 2024

Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 6,39 persen. Kemudian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terendah terdapat di Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 3,11 persen seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

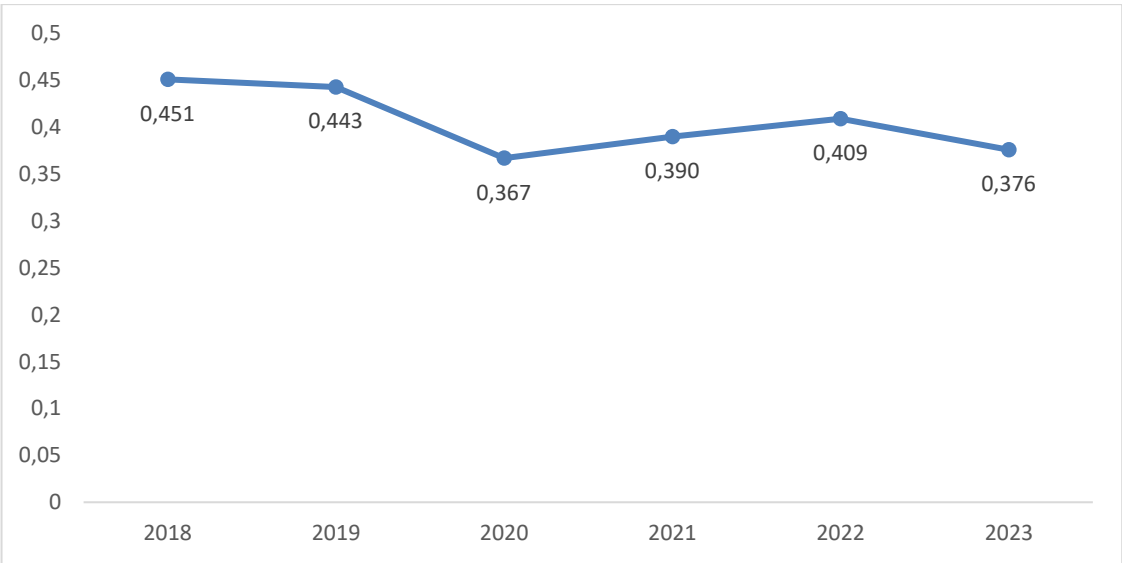
Gambar 2.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024

8. Indeks Wiliamson

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan bila mendekati



satu maka semakin timpang wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari sebesar 0,451 pada tahun 2018 menjadi 0,38 pada tahun 2023. Berdasarkan ketentuan ketimpangan Williamson, pada tahun 2018-2023 di Provinsi Kepulauan Riau ketimpangan distribusi pendapatannya rendah atau distribusi pendapatan antar wilayah merata yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah yang merata. Ada peningkatan pemerataan pendapatan antar wilayah atau penurunan ketimpangan distribusi pendapatannya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Selengkapnya perkembangan Williamson dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2023

9. Capaian Pelayanan Publik

Capaian pelayanan publik dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Hasil evaluasi IPP di Pemerintah Daerah sejauh ini masih berfokus pada pelayanan PTSP, RSUD, SAMSAT dan Dukcapil. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi kinerja A- pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik.



10. Capaian Pengelolaan Keuangan

Capaian pengelolaan keuangan dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ketiga Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keempat, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut.

11. Capaian Transparansi dan Akuntabilitas

Capaian transparansi terlihat dari pencapaian Indeks SPBE. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pencapaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencapai 2,68 (Kategori Baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 mencapai angka BB.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK, antara lain terlihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK sebesar 92,29%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 84,97%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sebesar 115%, Angka partisipasi kasar (APK) SLB sebesar 97,74%, Angka Putus Sekolah SMA/SMK sebesar 0,06%, Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik sebesar 96,11%, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah sebesar 35,91%.



Dilihat berdasarkan pengembangan kurikulum, Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum sebesar 70,58%, Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum sebesar 54,34%, Jumlah SMK yang Terevitalisasi sebesar 97,30%. Sementara Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah sebesar 671,76.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 13 Indikator program. Dari ke 13 indikator yang telah rilis data tahun 2024 terdapat sebanyak 11 indikator kategori sangat tinggi, dan 2 indikator kategori Tinggi. Secara lengkap realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENDIDIKAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	93,5	100	91,50	100,00	109,29	ST	106,95
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
2	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	82	92,29	80	87,94	109,93	ST	107,24
3	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	84,97	100	85,56	85,56	T	85,56
4	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	115,00	99	108,45	109,55	ST	108,45
5	- Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)	%	90	97,74	87	117,98	135,61	ST	131,09
6	- Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	0,34	0,06	0,36	0,01	133,22	ST	2,94
7	- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	%	96,6	96,11	96,27	95,66	99,37	ST	99,03
8	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	%	100	99,08	100	108,48	108,48	ST	99,59
9	- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Dengan Satuan:Ratio)	%	33,95	35,91	33,85	33,81	99,88	ST	111,39



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum (Dengan Satuan:%)	%	62,00	70,58	61	69,06	113,21	ST	189,19
11	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum. (Dengan Satuan:%)	%	32	54,34	31	60,54	195,29	ST	99,99
12	Jumlah SMK yang Terevitalisasi (Dengan Satuan:%)	%	97,37	97,30	97,22	97,36	100,14	ST	85,94
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Dengan Satuan:Ratio)	Ratio	730,00	671,76	726,42	627,38	86,37	T	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (Dengan Satuan:%)	%	100	100,00	100	100	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat digambarkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup sebesar 101%, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 12%, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 15,4% dan Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) sebesar 5 kab/kota.

Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.



Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) sebesar 81%, Capaian ODHA yang mendapatkan ARV sebesar 47%, Eliminasi malaria (kabupaten/kota) sebesar 71,43%, Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 72%.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 dapat dilihat dari Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar 88%, Persentase Rumah Sakit terakreditasi sebesar 95%, Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 90%, Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Paripurna, Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Utama, Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud Paripurna, Indeks Kepuasan masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib 85,51, Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud 85,44.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 26 indikator program. Dari sebanyak 26 indikator, terdapat sebesar 23 indikator kategori sangat tinggi dan 2 indikator katogori tinggi. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	URUSAN KESEHATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	%	100	100	77	77,7	100,91	ST	77,70
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 100.000 Kelahiran Hidup)	per 100.000 Kelahiran Hidup	121	101	123	93	124,39	ST	76,86
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	per 100.000 Kelahiran Hidup	10	12	12	7,4	138,33	ST	74,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	12,8	15,4	14	16,8	80,00	T	131,25
5	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
6	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
7	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	Kab/Kota	7	5	5	6	120,00	ST	85,71
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	93	81	92	81	88,04	T	87,10
9	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	80	47	72	96	133,33	ST	120,00
10	Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	%	67	71,43	57,14	86	150,01	ST	128,36
11	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	95,5	72	94,6	89	84	T	93,19
12	Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	%	71	100	71	100	140,85	ST	140,85
13	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	97	97	95	98	102,74	ST	101,03
14	Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	%	98	88	97	97	99,87	ST	98,98
15	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	100	95	95	100	105,26	ST	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	(Dinkes) (Dengan Satuan:%)								
16	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial (Dengan Satuan:%)	%	96	90	96	96	100,20	ST	100,00
17	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	status	Paripurna	Paripurna	82	88,84	108,34	ST	100,00
18	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	status	Utama	Utama	Utama	Utama	100,00	ST	100,00
19	Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	ST	100,00
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	80	85,51	80	91,14	113,93	ST	113,93
21	Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	84	85,44	83	83,75	100,00	ST	99,70
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
22	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	60	56	54	69,8	129,24	ST	116,33
23	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	85	63,81	75	80	106,67	ST	94,12
24	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Persentase)	%	60	35,15	40,00	40,16	100,40	ST	66,93
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
25	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	88	88	100	113,64	ST	111,11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
26	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	85,71	100	116,67	ST	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal. Persentase Jumlah titik rawan banjir terealisasi 15, Persentase Jalan Kondisi Mantap sebesar 70,37%; Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 15,54%. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 10,26%, Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 55,62%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 10 Indikator program. Dari sebanyak 10 indikator 8 indikator kategori sangat tinggi, sedangkan 1 indikator dengan kategori sangat rendah dan 1 indikator dengan kategori sedang. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100,00	100	94,02	94,02	ST	94,02
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
2	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada 52eremp irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	%	37,46	10,26	25,49	10,26	40,25	SR	27,39
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	%	65,39	55,62	58,99	55,79	94,58	ST	85,32
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak . (Dengan Satuan:%)	%	92,12	91,82	91.88	92,1	100,00	ST	99,98
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
5	Cakupan Perlayana Air Limbah. (Dengan Satuan:%)	%	90,91	87,74	90.51	91,1	100,00	ST	100,21
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
6	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
8	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	%	81,26	70,37	80,94	80,87	99,91	ST	99,52
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
9	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.. (Dengan Satuan:%)	%	30	15,54	26	19,02	73,15	S	63,40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
10	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	%	100	90	85	92	100,00	ST	92,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Basis Data RTLH Provinsi Kepulauan Riau, jumlah RTLH di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13.994 rumah, seperti terlihat pada 53erem berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH	Kepemilikan Tanah		
			Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri
1	NATUNA	134		22	112
2	KEPULAUAN ANAMBAS	545	32	127	386
3	TANJUNGPINANG	1.508	74	115	1.319
4	BATAM	1.849	78	368	1.403
5	BINTAN	2.192	38	133	2.021
6	LINGGA	3.833	184	238	3.411
7	KARIMUN	3.933	149	554	3.230
	JUMLAH	13.994	555	1.557	11.882

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/lpage/>



Perkembangan indikator tahun 2023 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang masih ada indikator dengan kategori belum mencapai 100%. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan sebesar 97,86%, Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni sebesar 100%, Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni sebesar 100%, Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun sebesar 101,53%, Pengurangan Luas Kawasan Kumuh sebesar 71,36%, Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota sebesar 100%.

Kinerja indikator program pada Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui 6 Indikator dengan 5 program. Dari ke enam indikator, terdapat 5 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator sangat rendah. Secara rinci realisasi indikator program perumahan dan 54erempu permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	97,86	100	97,86	97,86	ST	97,86
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
2	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
4	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun.	Unit Rumah	150	15,23	50	21	42,00	SR	14,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	(Dengan Satuan:Unit Rumah)								
5	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	Ha	359,68	339,21	334,21	178,65	146,55	ST	49,67
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
6	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota (Dengan SatuanJumlah Lokasi)	Jumlah Lokasi	7	7	13.000	13.000	100,00	ST	185714,29

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100%, Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan sebesar 50%, Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya sebesar 70,00. Indeks Pencegahan Bencana, sebesar 2,66%, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sebesar 0,64% dan Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 0,27%.

Dari 6 indikator program yang ditargetkan, sejumlah 4 indikator kategori sangat tinggi, 2 indikator kategori tinggi dan 1 indikator sangat rendah. Secara rinci realisasi indikator program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
2	Indeks Pencegahan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	3,00	2,66	2,40	2,69	112,08	ST	89,67
3	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,35	0,64	0,32	0,27	84,38	T	77,14
4	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,45	0,27					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
5	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
7	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	50	67	33,33	49,75	SR	33,33
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
8	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	70,00	86	71,43	83,06	T	71,43

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 2024



6. Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan 57eremp provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi 57eremp bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan 57erempuan 57 WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua 57erempu; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif pada tahun 2023 sebesar 0,32%. Sementara itu untuk Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada tahun 2023 realisasi sebesar 13,52%.

Kinerja urusan lainnya terlihat dari beberapa indikator. Persentase lembaga/orso penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi sebesar 10,42%, Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi sebesar 40,80%, Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia sebesar 25,00%, Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100,00%, Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100,00%, Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100,00%, Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti sebesar 100,00%, Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 100,00%, Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial sebesar 11,11%.

Urusan Sosial memiliki 12 indikator program, dari 12 indikator program tersebut 10 indikator kategori sangat tinggi, 1 indikator tinggi dan 1 indikator sedang. Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
2	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	%	16,88	10,42	5,63	6,49	115,38	ST	38,45
3	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	%	50,93	40,80	32,61	24,22	74,29	S	47,56
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
4	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	%	100	25,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
5	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	dalam panti. (Dengan Satuan:%)								
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	%	1,56	0,32	0,20	0,17	83,90	T	10,90
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)	%	39,13	13,52	13,02	13,06	100,33	ST	33,38
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
11	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
12	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	Unit Rumah	11,11	11,11	11,11	11,11	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Sosial, 2024

7. Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru sebesar 4,92%, Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja sebesar 55,00%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 56,17, Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 59,42%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK sebesar 68,68%, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 59eremp kerja yang layak sebesar 36,21%, Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam sebesar 98,07%, Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 77,05%, Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 18,97%.

Pada urusan tenaga kerja terdapat 12 indikator program, dari 12 indikator program tersebut 9 diantaranya termasuk kategori sangat tinggi, dan 3 indikator kategori tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN TENAGA KERJA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
2	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
3	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	%	12	4,92	9	9,52	105,72	ST	79,33
4	Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	71,79	55,00	66,67	69,71	104,56	ST	97,10
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	%	71,79	56,17	61,53	52,42	85,19	T	73,02
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
6	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	%	65	59,42	63	78,58	124,73	ST	120,89
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK- (Dengan Satuan:persen)	%	67,65	68,68	67,59	69,17	102,34	ST	102,25
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:persen)	%	55	36,21	45,00	39,04	86,76	T	70,98
9	Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:pesrsen)	%	100	98,07	100	98,07	98,07	ST	98,07
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	%	96,25	77,05	95,75	96,46	100,74	ST	100,22
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	%	77,50	74,29	76,50	64,38	84,16	T	83,07
12	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	15,80	18,97	13,80	22,54	163,33	ST	142,66

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024



8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi sebesar 12,63%. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi 8,89%. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO sebesar 28,96 %, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan sebesar 28,64%, Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak sebesar 81,39%.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat 6 indikator program, dari 6 indikator program kategori sangat tinggi. Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	95	95,00	ST	95,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	10,4	12,63	11,82	13,51	114,30	ST	129,90



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	11	8,89	8,00	13,33	166,63	ST	121,18
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan (Dengan Satuan:Rasio)	Ratio	43,33	28,96	43,70	25,05	174,45	ST	57,81
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
5	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Penguasaan (Dengan Satuan:%)	%	30	28,64	29	28,01	96,59	ST	93,37
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
6	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak (Dengan Satuan:%)	%	55,81	81,39	46,51	51,16	110,00	ST	91,67

Sumber: DP3AKB, 2024

9. Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui



Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Kinerja urusan pangan terlihat dari Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan sebesar 117,44%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 7,71%, Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan sebesar 6,6%, Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman sebesar 94%.

Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sudah baik. Dilihat dari 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, 5 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KETAHANAN PANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
2	Persentase angka kecukupan energi ketersediaan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	116	117,44	115	119,07	103,54	ST	102,65
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Dengan Satuan:PERSEN)	%	90,10	7,71	88,50	88,76	100,29	ST	98,51
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	<10	6,6	≤10	7,9	121,00	ST	79,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (Dengan Satuan:PERSEN)	%	85	94	83	93,57	112,73	ST	110,08

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2024



10. Pertanian

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanian meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanian ditunjukkan dengan dua indikator yaitu Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi sebesar 100% dan Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau yang belum ada realiasi capaiannya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
1	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	ST	100,00
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
2	Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	ST	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanian, 2024



11. Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah sebesar 100%, Persentase Perusahaan yang Taat Aturan sebesar 100%, Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebesar 100%, Persentase Pengurangan Sampah sebesar 12,85%, Persentase Penanganan Sampah sebesar 72,32%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 6 Indikator program, dengan perincian sebanyak 4 indikator program kategori sangat tinggi, dan 1 indikator program kategori sedang. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
3	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan (Dengan Satuan:%)	%	100	100					
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
4	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Kasus)	kasus	7	100	100	100	100,00	ST	1428,57
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
5	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:%)	%	0	12,85	28	18,68	66,71	S	18,68
6	Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:%)	%	71	72,32	71	65,45	92,18	ST	92,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan beberapa indikator. Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 100%, Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) sebesar 30%, Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri sebesar 100%, Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman sebesar 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui 4 Indikator program, dengan 3 indikator program sangat tinggi. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
2	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
3	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
4	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar sebesar 100%, Persentase desa yang difasilitasi kerjasama sebesar 2,91%, Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes sebesar 34,74%, Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas sebesar 52,64%.

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa dari sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan pada tahun 2024, 3 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator sangat rendah. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,								
	PROGRAM PENATAAN DESA								
1	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	40	40,00	SR	40,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								
2	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:%)	%	10,91	2,91	5,45	49,5	906,67	ST	453,71
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
3	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	%	52,87	34,74	34,74	40,79	117,41	ST	77,15
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	%	72,62	52,64	83,33	100,00	120,00	ST	137,70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program



pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 44,00%, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 20,60%, Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 64,81%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui 2 Indikator program, dengan realisasi sebanyak 2 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	%	18	20,60	22	12,1	181,82	ST	67,22
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	indeks	63	64,81	62,00	66	106,45	ST	104,76

Sumber: DP3AKB, Tahun 2024

15. Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemandirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.



Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah tidak baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja masih ada yang belum ada realisasi hingga tahun 2023. Indikator yang belum ada realisasi nya ada pada Program pengelolaan pelayaran dengan indikator sebagai berikut : Persentase layanan sarana angkutan perairan, Persentase layanan prasarana angkutan perairan, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas, Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, sebanyak 2 indikator program termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERHUBUNGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100,00	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	%	100	6,00	100	100	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan



Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi, terlihat indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 25%, Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator program. Dari ke 3 indikator program, sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100,00	100	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	25	30	30	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persentase)	%	81,4	86,05	81,4	81,4	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Persentase Koperasi yang Diawasi, Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya, Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan, Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan, Rasio Wirausaha Baru, Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan, dan Persentase UMKM yang dikembangkan’

Kinerja indikator program pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 9 Indikator program, sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan 2 indikator kategori tinggi. Secara rinci kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	156	155	99,36	ST	155,00
	PROGRAM PE LAYANAN IZIN U SAH A SIMPAN PINJAM								
2	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:%)	%	31,34	15,33	21,34	18,68	87,55	T	59,60
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
3	Persentase Koperasi yang Diawasi (Dengan Satuan:%)	%	6,53	26	4,53	7,27	160,58	ST	111,33
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
4	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (Dengan Satuan:%)	%	14,17	6,78	9,97	9,18	92,07	ST	64,78
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
5	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	%	33,8	17,7	23,8	24,90	104,62	ST	73,67



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
6	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	%	39,18	46,43	35,18	47,08	133,83	ST	120,16
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)								
7	Rasio Wirausaha Baru (Dengan Satuan:%)	%	30,02	32,73	29,02	34,86	120,12	ST	116,12
8	Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	%	1,24	1,28	0,84	1,77	210,27	ST	142,74
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
9	Persentase UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	%	39,86	26,82	32,86	27,93	85,01	T	70,07

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2024

18. Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik, dapat dilihat melalui beberapa indikator. Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi sebesar100%, Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sebesar 98%, Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM sebesar 100%, Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau sebesar 100%.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENANAMAN MODAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
3	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
4	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	%	100	98	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
6	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Secara umum capaian kinerja indikator kepemudaan dan olah raga Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan sebesar 0,6%, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi sebesar 6,31%, Cakupan Pembinaan Atlet Muda sebesar 0,73%, Cakupan Pembinaan Olahraga sebesar 21,15%, Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 9,63%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 7 Indikator. Dari ke 7 indikator tersebut, 4 indikator



termasuk ke dalam kategori sangat tinggi, 2 indikator tinggi, dan 1 indikator sangat rendah. Secara rinci realisasi indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	Status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	1,50	0,6	1,30	0	0,00	SR	0,00
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,18	6,31	0,17	0,16	88,23	T	88,89
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,86	0,73	0,77	0,77	100,00	ST	89,53
5	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	49,66	40,98	43,88	36,74	83,72	T	73,98
6	Cakupan Pembinaan Olahraga (Dengan Satuan:persentase)	%	11,54	21,15	11,54	11,54	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	9,63	9,63	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

20. Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistim yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sudah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik pada tahun 2024 ditunjukkan melalui 1 Indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN STATISTIK								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

21. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi. Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan realisasi 73,41.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 indikator yaitu Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. Namun demikian sampai dengan tahun 2024 masih belum ada realisasi capainnya. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERSANDIAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	ST	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

22. Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Kinerja kebudayaan terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan sebesar 18,43%, Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) sebesar 28,19%, Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan sebesar 40%, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 33,69%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 6 indikator yang tersebar pada 6 progam pembangunan. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, semuanya termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEBUDAYAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
2	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	%	22,23	18,43	20,81	22,11	106,25	ST	99,46
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)	%	28,27	28,19	28,21	28,19	99,93	ST	99,72
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
4	Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan (Dengan Satuan:%)	%	80	40	45	97,33	100,00	ST	121,66
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	%	39,02	33,69	35,39	34,60	97,77	ST	88,67
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
6	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	%	254.938	0,1436%	12132	37587	100,00	ST	14,74

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2024

23. Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap



peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari indikator yang di targetkan yaitu Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 65,80%, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK) sebesar 13,33%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 3 Indikator, semua indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERPUSTAKAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	Nilai	64,50	65,80	63,00	73,69	116,97	ST	114,25
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
3	Indeks Pembangunan Lite rasi Masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	15,85	13,33	15,45	15,60	100,97	ST	98,42

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024



24. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebesar 18,55%, Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 63,84 % dan Izin Penggunaan Arsip sebesar 0%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 3 Indikator. Dari ke 3 indikator, sebanyak 1 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEARSIPAN								
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dpk) (Dengan Satuan:%)	%	28,50	18,55	20,75	22,55	108,67	ST	79,12

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024

25. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.



Kinerja urusan kelautan dan perikanan indikator terbilang cukup baik, terlihat dari beberapa indikator seperti Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28l KEP-DJPRL I sebesar 1 kawasan, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 322.110,34 ton, Nilai Nelayan/Tukar NTN sebesar 104,14%, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 31.250,00 ton, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi sebesar 110,65%, Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan sebesar 100, Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan sebesar 18.099,33 ton.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 8 indikator. Dari ke 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, 6 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan 2 Indikator kategori tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100,00	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
2	-Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28l KEP-DJPRL I 2020) (Dengan Satuan:Kawasan)	Kawasan	4	1	4	4	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	Ton	309.538,6	322.110,34	308.305,60	329.269,44	106,80	ST	106,37
4	-Nilai Nelayan/Tukar NTN (Dengan Satuan:%)	%	116,3	104,14	116,00	105,28	90,76	T	90,52
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
5	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	Ton	35288,63	31.250,00	30.614,37	39.897,94	130,32	ST	113,06
6	-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (Dengan Satuan:Ton)	Ton	112,32	96,08	111,2	96,69	86,95	T	86,08



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
7	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	%	90	100	90	90	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
8	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	Ton	13500	18.099,33	13.200	19.692,59	149,19	ST	145,87

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

26. Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Kinerja urusan pariwisata terlihat dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.338.874 Orang; Jumlah pergerakan Wisatawan Nusantara sebanyak 1.511.354 Orang; Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan sebesar 3,95%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 8 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2024, terdapat sebanyak 4 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PARIWISATA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
2	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	daya tarik/ kawasan/ destinasi	2	2	2	2	100,00	ST	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan:Orang)	Orang	1.783.864	1.338.874	1.474.269	1.667.081	113,08	ST	93,45
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. (Dengan Satuan:Orang)	Orang	2.239.136	1.511.354	1.722.943	3.491.947	202,67	ST	155,95
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
5	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	sub sektor	7	7	7	7	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
6	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. (Dengan Satuan:%)	%	2	3,95	2	2,03	101,50	ST	101,50

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

27. Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.



Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Kinerja indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2023 terlihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian sebesar 89,98%, Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak sebesar 3,4%, Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 0,86%, Persentase Angka Kesembuhan Penyakit sebesar 68,84%, Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat sebesar 58,8%, Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT sebesar 74,32%, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,16%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 11 indikator. Dari ke 11 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERTANIAN								
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
1	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	%	26,76	89,98	68,81	81,94	119,08	ST	306,20
2	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak. (Dengan Satuan:PERSEN)	%	1,40	3,4	1,30	2,44	187,69	ST	174,29
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Dengan Satuan:PERSEN)	%	3,80	2,92	3,20	3,4	106,25	ST	89,47
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (Dengan Satuan:PERSEN)	%	1,26	0,86	0,80	28,29	3536,25	ST	2245,24
5.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,26	0,86	1,49	22,45	1506,71	ST	1781,75
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
5	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit (Dengan Satuan:PERSEN)	%	66	68,84	64	74,15	115,86	ST	112,35



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
6	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (Dengan Satuan:PERSEN)	%	62,00	58,8	60,00	94,67	157,78	ST	152,69
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
7	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) (Dengan Satuan:PERSEN)	%	45	40,14	42	47	111,90	ST	104,44
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) (Dengan Satuan:PERSEN)	%	74,80	74,32	73,90	78,90	106,77	ST	105,48
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) (Dengan Satuan:PERSEN)	%	20	23,81	20	21,05	105,25	ST	105,25
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
10	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya (Dengan Satuan:PERSEN)	%	56	43	48,00	50,00	104,17	ST	89,29
11	Nilai Tukar Petani (NTP) (Dengan Satuan:RASIO)	Ratio	100,22	104,16	99,95	123,45	123,51	ST	123,18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2024

28. Kehutanan

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada 4 indikator, masing-masing indikator telah memenuhi target, diantaranya; Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan realisasi sebesar 27,13 milyar, rehabilitasi lahan kritis terealisasi sebesar 5 ha, Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat sebesar 911 Ha, Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau juga terealisasi 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kehutanan pada tahun 2024 terdiri dari 2 indikator, 2 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEHUTANAN								
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) (Dengan Satuan:Milyar)	Milyar	27,50	27,13	27,30	26,29	96,23	ST	95,60
2	Rehabilitasi Lahan Kritis (Dengan Satuan:Hektar)	Ha	5	5	5	5	100,00	ST	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kurang baik, dilihat pada beberapa indikator antara lain: Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi sebesar 14,7%, Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan sebesar 100%, Rasio Elektrifikasi sebesar 97,99%, Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik sebesar 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 5 Indikator. Dari kelima indikator, semuanya termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								
2	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	%	15,83	14,7	15,43	15,43	100,00	ST	97,47
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
3	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
4	Rasio Elektrifikasi (Dengan Satuan:%)	%	99,20	97,99	98,1	98,19	100,09	ST	98,98
5	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	99,76	99,76	ST	99,76

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

30. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari beberapa indikator diantaranya Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan sebesar 74,38%, Fluktuasi Harga Bahan Pokok sebesar 2,76%, Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri sebesar 4,88%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 4 Indikator program. Terdapat 4 indikator dengan status sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERDAGANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	74,38	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								
3	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	%	<10	2,76	< 10	9,08	109,20	ST	90,80
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri (Dengan Satuan:Persen)	%	8	4,88	8	8,26	103,25	ST	103,25

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

31. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kinerja urusan perindustrian dilihat dari Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri sampai tahun 2024 terdapat 1 indikator program. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perindustrian ditunjukkan melalui 1 Indikator dengan status sebanyak 1 indikator sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERINDUSTRIAN								
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
1	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	3	1	1	1	100,00	ST	33,33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

32. Transmigrasi

Salah satu urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan transmigrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan sebesar 25%.

Dari sebanyak 1 indikator program urusan transmigrasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan 1 indikator termasuk ke dalam kategori sedang. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN TRANSMIGRASI								
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman	%	33,33	25	33,3	25,00	75,07	S	75,01



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	Tempatan (Dengan Satuan:persen)								

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

33. Unsur Penunjang Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Beberapa indikator yang di targetkan di tahun 2023 diantaranya : Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD sebesar 157,14 %.

Kinerja fungsi Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator, sebanyak 2 indikator program termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.56
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PERENCANAAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
2	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	%	90	157,14	90	90	100,00	ST	100,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
4	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	ST	100,00
5	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	ST	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

34. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebesar 100,00%. Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2024 terdiri dari 1 indikator yang termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.57
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2022	Target tahun 2023	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2023	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100,00	100	100	100,00	ST	100,00

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

35. Unsur Penunjang Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator. Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun sebesar 100%, Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu sebesar 100%, Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah sebesar 100%, Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan sebesar 85 %

Kinerja indikator urusan keuangan pada tahun 2024 ditunjukkan melalui 12 indikator program. Dari 12 indikator tersebut terdapat 9 indikator dengan status sangat tinggi 1 indikator termasuk ke dalam status sedang. Secara rinci realisasi indikator program unsur penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.58
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEUANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
2	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
3	Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
4	Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	92	100	90	92,24	102,49	ST	100,26
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
5	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Persen)	%	74,66	85	70,98	76	107,07	ST	101,79
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
6	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
7	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-	-3,51	13,73	10,30	75,02	S	1030,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
8	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	93	99,12	92	87,84	95,48	ST	94,45
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
9	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-	9,29	3,14	8,96	285,42	ST	



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
10	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	%	-	37,83	25	27	108,00	ST	
11	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	-	21.033	18.883	20.772	110,00	ST	

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

36. Unsur Penunjang Kepegawaian

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabaran. Kinerja unsur penunjang kepegawaian sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya: Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan sebesar 53,99%, Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi sebesar 98,3%, Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik keatas sebesar 98,93%.

Fungsi Kepegawaian memiliki kinerja 4 indikator, dengan realisasi semua indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KEPEGAWAIAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
2	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	67,91	53,99	65,53	64,52	98,46	ST	95,01



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	(Dengan Satuan:Persentase)								
3	Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	98,40	98,3	98,47	99,67	101,22	ST	101,29
4	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik keatas (Dengan Satuan:Persentase)	%	98	98,93	99,01	99,77	100,77	ST	101,81

Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2024

37. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan sudah memiliki capaian kurang baik, karena belum ada realisasi indikator program pada tahun 2023. Indikator yang di targetkan diantaranya Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan, Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan, Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, dan Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya.

Fungsi Pendidikan dan pelatihan memiliki 2 indikator program, dengan 1 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	Urusan penunjang pendidikan dan pelatihan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100,00	ST	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
2	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%		34,34	9,26	9,05	97,73	ST	

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024



38. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD tergolong kurang baik. Dilihat dari indikatornya masih belum ada realisasi capaian hingga tahun 2024. Indikator yang di targetkan diantaranya Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi dan Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD.

Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD terlihat dari sebanyak 2 indikator, sebanyak 2 indikator memiliki status telah mencapai target. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	SEKRETARIAT DPRD								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	98	98	ST	98
	PROGRAM DU KU NGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	ST	100

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

39. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Perekonomian, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Hukum, dan Biro Umum.

Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah sebesar 45,17%, Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,42, Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan



Rakyat yang dihasilkan sebesar 60%, Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan sebesar 110%, Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebesar 95,4%.

Kinerja fungsi Sekretariat Daerah terlihat dari sebanyak 18 indikator kinerja. Terdapat 16 indikator yang telah mencapai target, 2 indikator yang belum mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	SEKRETARIAT DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	ST	104
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								
10	PeresentaseTingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	%	44,6	45,17	41,60	45,17	108,58	ST	101,27
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
12	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) (Dengan Satuan:Skor)	Skor	3,06	3,42	3,04	3,47	114,14	ST	113,39
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
13	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan:%)	%	100	40	60	60	100	ST	60
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								
14	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan:persentase)	%	100	108	100	110	110	ST	110
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
16	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:%)	%	100	100	92	100	108,7	ST	100
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								



No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
17	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. (Dengan Satuan:Persentase)	%	36	1,44	70	95,4	136,28	ST	265
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
18	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	-	100	95	95	100	ST	-

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

40. **Pengelolaan Penghubung**

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan penghubung tergolong baik. Dilihat dari indikator yang di targetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan sebesar 100%, Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Kinerja pengelolaan penghubung terlihat dari sebanyak 2 indikator kinerja. Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGHUBUNG DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								
2	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	-	87,03	88	88,01	100,01	ST	-

Sumber: Badan Penghubung Daerah, 2024



41. **Pengelolaan perbatasan daerah**

Kinerja penyelenggaraan pengelolaan perbatasan tergolong baik. Dilihat dari indikator yang di targetkan yaitu Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan sebesar 100%, Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi sebesar 128,4%.

Kinerja pengelolaan perbatasan terlihat dari sebanyak 2 indikator kinerja, semuanya sebanyak 2 indikator yang telah mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								
2	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	65	76,68	55	70,62	128,4	ST	108,64

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan, 2024

42. **Pengawasan**

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator pada inspektorat belum ada realisasi capaiannya. Indikator yang ditargetkan diantaranya : Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan, Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan, Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI, Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK, Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu, Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu.

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 11 indikator telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.65
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN PENGAWASAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	%	70	40	50	50	100	ST	71,24
2	Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	98	90	90	100	ST	111,11
3	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
4	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	100	100	ST	100
5	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (Dengan Satuan:Person)	%	90	84	88	88	100	ST	97,77
6	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	-	<10	<9	<1	100	tercapai	
7	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	-	88	100	100	113,63	ST	
8	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%	-	80	80	86	102	tercapai	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
9	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN	%	-	100	100	100	100	ST	
10	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN	%	-	100	100	100	100	ST	
11	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	-	Hijau	Hijau	Hijau	100	tercapai	
12	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	-	6	14	14	100	tercapai	

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

43. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja indikator pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, seperti Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) sebesar 94,76%, Persentase Organisasi Kemasyarakatan



dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan sebesar 112,51%, Persentase Konflik antar Agama sebesar 0, Persentase Konflik Sosial yang Tertangani sebesar 100%

Kinerja indikator program pada Urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui sebanyak 6 Indikator program dengan status kinerja semuanya sebanyak 6 indikator kategori telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program Urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Urusan, Program dan Indikator Program	Satuan	target akhir RPJMD	realisasi tahun 2023	Target tahun 2024	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2024	% Capaian Target	status capaian	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024 (%)
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	100	100	ST	100
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
2	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	%	0	0	0	0	100	ST	100
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEM BAGA PENDI DI KAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)	%	0	100	70	66,33	94,76	ST	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	%	0	97,39	88	99,01	112,51	ST	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
5	Persentase Konflik antar Agama (Dengan Satuan:%)	%	0	0	0	0	100	ST	100
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
6	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	%	0	100	100%	100%	100	ST	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024



2.1.4 Aspek daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat Kepulauan Riau mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai Rp2.109.071,00 per bulan pada tahun 2024. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Provinsi Kepulauan Riau untuk kelompok makanan mencapai Rp938.634,00 (44,50%) sedangkan kelompok non makanan mencapai Rp1.170.437,00. Terlihat bahwa persentase pengeluaran non pangan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pangan yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau sudah cukup baik karena fokus pengeluaran sudah lebih ke arah kebutuhan sekunder bahkan tersier.

Tabel 2.67
Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024

No	Kelompok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp)	1.773.521	1.855.296	1.831.701	1.989.703	2.109.071
	- Makanan	800.424	828.206	846.222	863.530	938.634
	- Non Makanan	973.097	1.027.089	985.479	1.126.172	1.170.437
2	Persentase Pengeluaran per Kapita					
	- Makanan	45,13	44,64	46,20	43,40	44,50
	- Non Makanan	54,87	55,36	53,80	56,60	55,50

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu proxy indikator kesejahteraan petani dengan melihat tingkat daya beli petani. Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan, di mana NTP tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 109,96 dan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 103,53.

Tabel 2.68
Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Harga yang Diterima Petani	102,98	109,51	115,98	117,12	120,35
2	Indeks Harga yang Dibayar Petani	103,82	104,91	108,61	112,09	115,98
	NTP	99,19	104,37	106,81	104,49	103,77



2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Wilayah produktif di sini merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan peruntukan pertanian yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 20 tahun sampai dengan sebelum adanya revisi perubahan sebagaimana Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki rentang waktu tahun 2017-2037. Persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau dan persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Produktif	226.451	226.451	226.451	226.451	226.451
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	708.172	708.172	708.172	708.172	708.172
	Rasio	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9

2. Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Jumlah Jumlah Hotel/Penginapan sebesar 139 unit, dengan jumlah kamar 14.492 kamar, dan tempat tidur sebanyak 20.629 unit.

Tabel 2.70
Jumlah Hotel/Penginapan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Hotel/Penginapan	116	101	128	107	139
2	Jumlah Kamar	4.473	11.784	13.254	11.867	14.492
3	Jumlah Tempat Tidur	16.216	16.263	18.272	17.079	20.629

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah, pemerintah daerah mengupayakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018. Dengan adanya acuan tersebut sudah jelas tugas, fungsi, dan Standar Operasional Pelayanan yang harus dilakukan DPMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai panduan teknis pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, telah didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur, penanggung jawab dan juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan.



Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya peralihan sistem pelayanan ke Online Single Submission (OSS). Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan dan izin perubahan, yang sebelumnya terdata melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dengan diberlakukannya OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission, para investor diharuskan pendaftaran ulang izin usahanya melalui sistem yang baru ini.

Proses pelaksanaan verifikasi dan penerbitan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rata-rata lama perizinan Provinsi Kepulauan Riau adalah 3 hari.

Tabel 2.71
Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2024

No	Jenis Izin	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
2.	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
4.	Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
5.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
6.	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
7.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	Hari	3	3	3	3	3
9.	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Hari	3	3	3	3	3
10.	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	Hari	3	3	3	3	3
11.	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	Hari	3	3	3	3	3
12.	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin	Hari	3	3	3	3	3
13.	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan	Hari	3	3	3	3	3



No	Jenis Izin	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
14.	Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu	Hari	3	3	3	3	3

Keterangan:

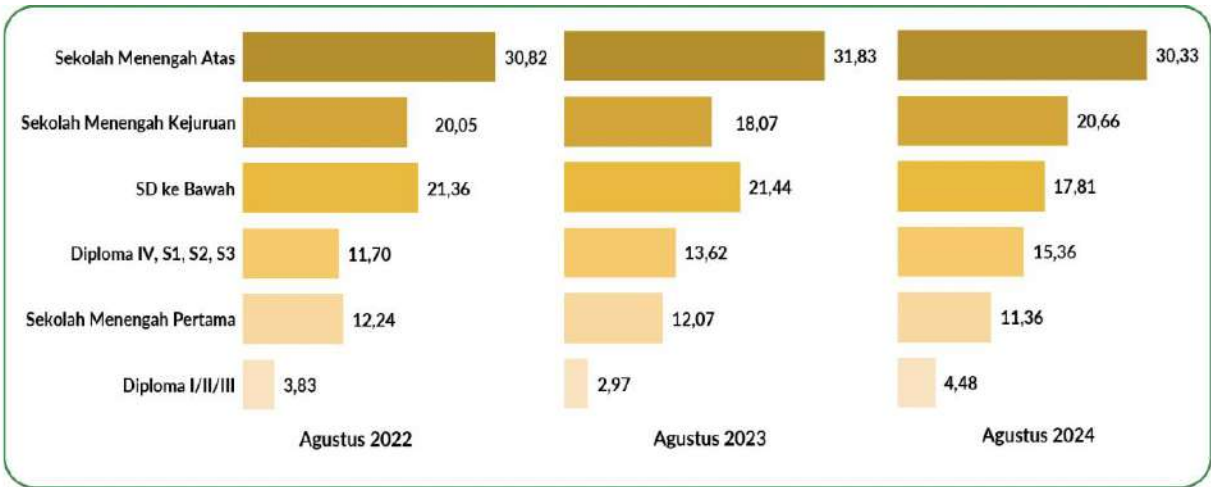
*Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

**Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.1. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat), yaitu sebesar 30,33 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 19,84 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan menunjukkan pola yang berbeda dengan Agustus 2023 dan Agustus 2022, seperti terlihat pada Gambar 4. Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan menduduki posisi kedua tertinggi pada Agustus 2024, sedangkan sebelumnya didominasi oleh tamatan SD ke bawah.



Gambar 2.27 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022-Agustus 2024

2.1.4.2. Rasio Ketergantungan

Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan. Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dengan demikian, besaran dari rasio ketergantungan



menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk usia produktif) untuk membiayai hidup penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (penduduk usia nonproduktif). Pola penurunan rasio ketergantungan di Kepulauan Riau merupakan kondisi positif bagi pembangunan di Kepulauan Riau, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penurunan rasio ketergantungan hingga mencapai 43,60 pada tahun 2024 yang mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.72
Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia 0-14 tahun	554.899	560.344	568.386	564.650	567.700
2	Jumlah Penduduk Usia 64 tahun keatas	73.010	78.709	85.093	89.100	95.000
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 + 2)	627.909	639.053	653.479	653.750	662.700
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Usia produktif)	1.436.655	1.479.186	1.526.341	1.498.880	1.520.100
5	Rasio Ketergantungan	43,70	43,20	42,81	43,61	43,60



2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu strategis)

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sebagai berikut:

1) **Kualitas Pembangunan Manusia, Kesenjangan Gender, Pelestarian Budaya Melayu yang Belum Optimal**

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu strategis yang sangat mendesak karena kualitas SDM menjadi fondasi utama peningkatan daya saing daerah, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Meskipun beberapa indikator dasar menunjukkan capaian yang relatif baik, seperti Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,12 tahun pada 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) 10,50 tahun, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,27 tahun, namun capaian ini belum diikuti oleh pemerataan kualitas SDM antarwilayah. Ketimpangan yang signifikan masih terlihat antara Kota Batam sebagai pusat ekonomi dan pendidikan regional dengan kabupaten hinterland seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Disparitas ini menggambarkan bahwa peningkatan SDM tidak hanya menjadi isu sektoral, tetapi juga isu spasial yang dipengaruhi oleh aksesibilitas, infrastruktur layanan dasar, dan distribusi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang belum merata.

Kondisi ini diperburuk oleh kesenjangan gender yang masih mencolok, tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,309 pada tahun 2024, menandakan masih adanya hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Ketimpangan ini terlihat dari RLS perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun HLS perempuan lebih tinggi; pendapatan per kapita perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki; serta UHH perempuan yang lebih tinggi namun tidak berbanding lurus dengan kesempatan ekonomi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak dapat tercapai apabila kesenjangan gender tidak ditangani secara serius melalui kebijakan yang responsif gender.

Isu strategis SDM di Kepri semakin kompleks dengan masih terjadinya stunting, yang bukan hanya terkait aspek gizi tetapi merupakan indikator multidimensional yang mencerminkan rendahnya kualitas sanitasi, air minum aman, kesehatan lingkungan, pendidikan keluarga, ekonomi rumah tangga, hingga efektivitas program layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Stunting berimplikasi jangka panjang karena dapat menurunkan kemampuan kognitif, memperlambat perkembangan mental, menurunkan produktivitas ekonomi, dan meningkatkan risiko penyakit kronis di usia dewasa. Dengan demikian, stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi ancaman terhadap human capital daerah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Kepri, terutama pada wilayah-wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.



Secara keseluruhan, isu strategis peningkatan SDM di Kepri merupakan hasil interaksi antara kualitas layanan dasar yang belum merata, ketimpangan gender, karakteristik wilayah kepulauan yang menghambat akses pendidikan dan kesehatan, dan tantangan ekonomi rumah tangga yang berdampak pada kemampuan keluarga memenuhi gizi dan pendidikan anak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM membutuhkan pendekatan lintas-sektor yang terintegrasi, intervensi berbasis wilayah, perluasan layanan dasar pada wilayah kepulauan, serta penguatan kebijakan responsif gender untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara setara dan berkelanjutan.

2) Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang sangat khas, di mana 96% wilayahnya berupa lautan ($\pm 17.012,97 \text{ km}^2$) dan hanya 4,21% berupa daratan ($\pm 8.269,71 \text{ km}^2$). Komposisi wilayah yang didominasi laut ini menjadikan Kepri salah satu provinsi dengan potensi kemaritiman terbesar di Indonesia, khususnya pada sektor perikanan. Potensi lestari sumber daya perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun, meliputi perikanan tangkap, budidaya, dan komoditas pesisir seperti lobster dan kepiting yang merupakan komoditas ekspor unggulan. Konsentrasi potensi terbesar berada di Laut Natuna, Laut Natuna Utara, dan Selat Karimata, terutama pada wilayah administratif Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan pusat sumber daya ikan perairan internasional seperti Laut Cina Selatan. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa Kepri tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi berbasis maritim, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam geopolitik dan ekonomi kelautan nasional.

Ketersediaan sumber daya laut tersebut turut mendorong meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan, dengan lonjakan 43% nelayan pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang. Kenaikan signifikan ini tidak hanya menggambarkan peluang ekonomi sektor kelautan, tetapi juga mencerminkan kerentanan ekonomi rumah tangga, di mana masyarakat beralih profesi menjadi nelayan akibat tekanan krisis ekonomi global yang mengurangi lapangan kerja sektor manufaktur dan jasa. Namun, kondisi ini menimbulkan paradoks: meskipun terdapat potensi sumber daya yang besar dan peningkatan tenaga kerja sektor perikanan, tingkat pengangguran terbuka di Kepri tetap berada di atas rata-rata nasional. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara potensi ekonomi dan kemampuan daerah menciptakan nilai tambah, baik karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya industrialisasi perikanan, lemahnya hilirisasi, maupun masih dominannya pekerjaan informal dengan produktivitas rendah.

Di sisi lain, kinerja makro Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Berdasarkan Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera tahun 2024, Kepri menempati peringkat ketiga tertinggi, berada sedikit di bawah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kepri berada pada laju pertumbuhan sekitar 5,02%, yang lebih tinggi dibandingkan Aceh, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera

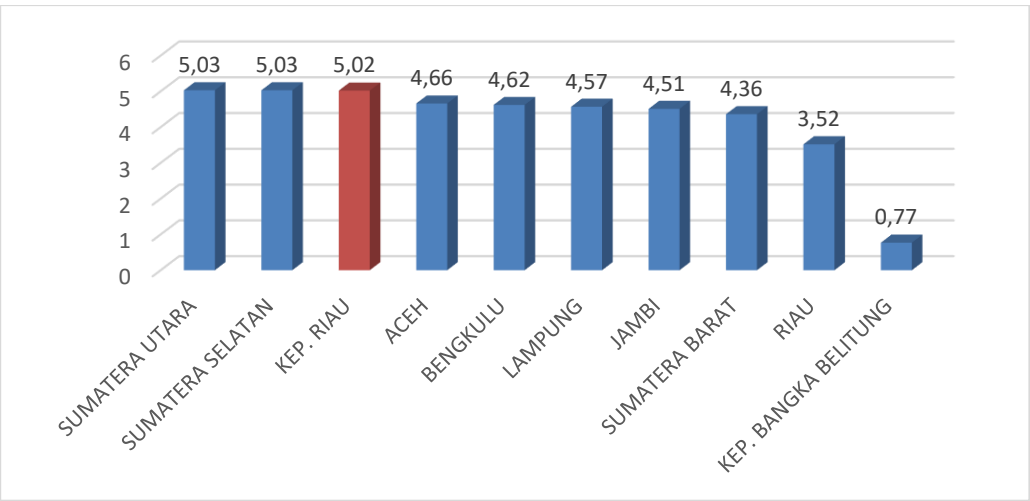


Barat, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Capaian ini memperlihatkan bahwa Kepri memiliki struktur ekonomi yang tangguh dan adaptif, terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan internasional di kawasan Batam-Bintan-Karimun.

Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Ketangguhan ekonomi Kepri lebih banyak dikonstruksikan oleh pusat pertumbuhan di Batam, yang memiliki basis industri dan perdagangan kuat, sementara wilayah perbatasan seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas masih bergantung pada sektor primer yang memiliki nilai tambah rendah. Dengan demikian, kinerja positif ekonomi Kepri harus dibaca bersamaan dengan fakta bahwa ketimpangan struktural antarwilayah dan antar-sektor masih signifikan, dan belum seluruhnya mampu mengonversi potensi kemaritiman menjadi kekuatan ekonomi inklusif.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa Kepri menghadapi isu strategis yang kompleks: potensi kemaritiman yang sangat besar tetapi belum sepenuhnya terkelola, struktur ekonomi yang tumbuh tetapi belum merata, ketenagakerjaan yang mengandalkan sektor informal, serta disparitas antarwilayah yang masih melebar. Untuk itu, penataan ekosistem ekonomi maritim, industrialisasi perikanan, peningkatan konektivitas, serta penguatan kapasitas nelayan dan pelaku UMKM menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Kepri dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambaran posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS (2025)

Gambar 2.28 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Pulau Sumatera tahun 2024 (%)



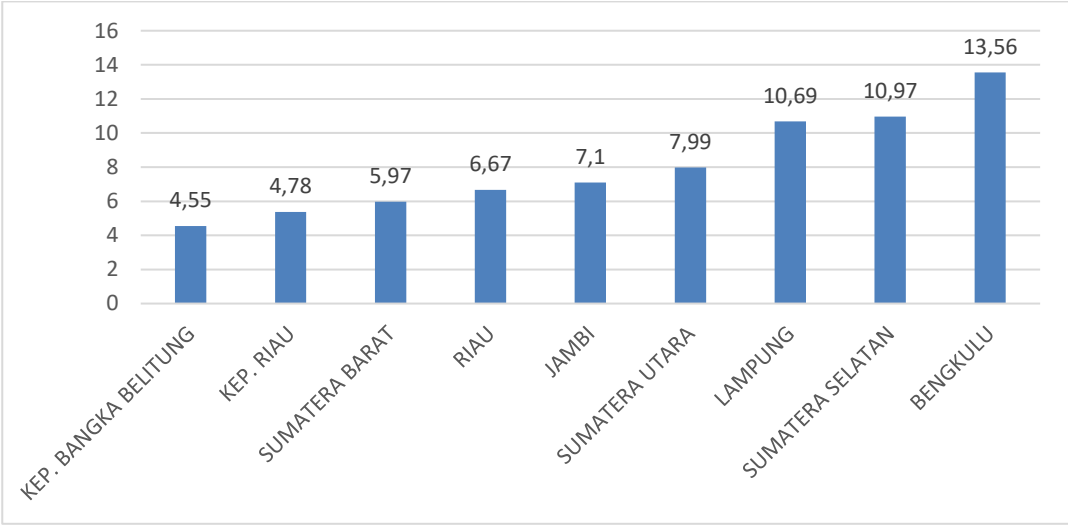
3) Kemiskinan dan Pengangguran

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,78%, dan merupakan terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Bangka Belitung, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan telah teratasi. Posisi relatif yang baik tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena karakteristik kemiskinan di Kepri sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi wilayah yang didominasi sektor industri dan perdagangan di Batam-Bintan-Karimun, sehingga menutupi kondisi kemiskinan laten di wilayah hinterland seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Kemiskinan di wilayah kepulauan ini lebih bersifat struktural, dipengaruhi oleh terbatasnya akses transportasi, tingginya biaya logistik, rendahnya ketersediaan lapangan kerja formal, serta tingginya biaya kebutuhan dasar. Dengan demikian, meskipun angka persentase kemiskinan relatif rendah, tingkat kerentanan terhadap kemiskinan tetap tinggi, terutama bagi rumah tangga nelayan, buruh informal, dan masyarakat pesisir.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,38% di tahun 2024, yang merupakan yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera, mengindikasikan bahwa Kepri menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang serius. Tingginya TPT ini menunjukkan adanya mismatch antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Struktur ekonomi Kepri yang kuat pada industri pengolahan, manufaktur, dan perdagangan internasional didominasi oleh kegiatan padat modal sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak diikuti penciptaan lapangan kerja dalam skala yang memadai. Hal ini diperburuk oleh tingginya tingkat urbanisasi ke Batam yang memicu persaingan ketat di pasar kerja, ditambah dengan peralihan pekerja dari sektor formal ke sektor informal akibat dinamika global, restrukturisasi industri, dan fluktuasi investasi.

Hubungan paradoks antara kemiskinan rendah tetapi pengangguran tinggi menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di Kepri bukan semata terkait akses ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja, ketergantungan pada industri tertentu, dan konsentrasi pertumbuhan di wilayah tertentu. Pengangguran tinggi, terutama di usia produktif, sangat berpotensi menimbulkan masalah sosial jangka panjang seperti meningkatnya beban ketergantungan, penurunan produktivitas, dan risiko kemiskinan baru jika tidak tertangani dengan tepat.

Kepri berada di posisi baik dalam penanggulangan kemiskinan, namun grafik TPT memperlihatkan bahwa tantangan kesejahteraan tidak terletak pada kemiskinan absolut, melainkan pada ketidakstabilan pasar kerja, kualitas SDM, dan distribusi peluang ekonomi antarwilayah. Kondisi ini menyiratkan perlunya strategi pembangunan yang tidak hanya fokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja formal, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi secara spasial agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih inklusif.



Sumber: BPS (2025)

Gambar 2.29 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2024

4) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan Bencana Belum Optimal

Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, konektivitas antarwilayah merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung mobilitas manusia, barang, dan layanan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana perhubungan laut dan udara, minimnya rute transportasi reguler, mahalnya biaya logistik, dan masih adanya wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Data persebaran penduduk, geografi kepulauan, serta keterbatasan infrastruktur transportasi menunjukkan bahwa penguatan konektivitas merupakan isu strategis yang tidak terelakkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antarwilayah. Kualitas layanan dasar, terutama perumahan, air minum, dan sanitasi, menunjukkan tantangan yang cukup besar. Masih terdapat rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, keterbatasan akses air minum aman yang belum merata antarwilayah. Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di kabupaten kepulauan yang aksesibilitasnya rendah.

Kesiapsiagaan bencana juga dinilai belum optimal karena keterbatasan sarana penanggulangan, minimnya sistem peringatan dini, dan masih rendahnya indeks kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Kondisi ini diperkuat oleh indeks ketahanan bencana yang berada dalam kategori belum optimal. Dengan demikian, penguatan mitigasi bencana menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan.

5) Tata Kelola Pemerintahan Belum optimal

Penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan, terlihat dari rendahnya kualitas perencanaan berbasis data, belum optimalnya SPIP, permasalahan pengelolaan keuangan dan aset, kualitas data statistik yang belum seragam antar perangkat daerah, serta lemahnya koordinasi lintas-perangkat daerah. PAD yang belum optimal dan



tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga berdampak pada kapasitas pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, kapasitas ASN belum merata dan organisasi perangkat daerah masih menghadapi kekurangan kompetensi teknis seperti statistisi, auditor, perencana, dan SDM teknologi informasi. Permasalahan ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya adaptif, responsif, dan berbasis bukti (evidence-based). Oleh karena itu, reformasi birokrasi, penguatan integrasi sistem data, peningkatan kompetensi ASN, dan optimalisasi SPBE menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Perumusan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang memengaruhi capaian pembangunan dan kualitas layanan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Proses ini berbasis data dan analisis kinerja setiap urusan pemerintahan, sehingga permasalahan yang disusun merefleksikan akar persoalan, bukan sekadar gejala sektoral. Karakteristik wilayah kepulauan, kesenjangan sarana-prasarana, kapasitas perangkat daerah, serta tantangan tata kelola menjadi faktor penting yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi pijakan utama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan, terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum optimal
- b. Mutu pendidikan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

- a. Masih adanya Balita stunting, kematian ibu dan balita.
- b. Kualitas sarana prasarana dan SDM rumah sakit yang perlu ditingkatkan
- c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular belum optimal
- d. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:



- a. Belum optimalnya penyediaan air baku
- b. Masih rendahnya akses sanitasi dan air minum yang aman.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase.
- d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan tata ruang.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. Masih adanya permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

- a. Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban umum dan penanganan kebakaran
- b. Belum optimalnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Belum efektifnya implementasi program-program penanggulangan kemiskinan.

7) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

9) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan yaitu belum optimalnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang belum bergizi, berimbang, dan aman.



10) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pembebasan lahan dan tata kelola administrasi pertanahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan hidup yang belum
- b. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- c. Masih kurangnya pengurangan dan penanganan sampah

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan profil kependudukan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

15) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan
- b. Ketersediaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan keamanan transportasi masih belum optimal
- c. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal
- b. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang belum merata



17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitasi dan pengembangan UMKM.
- b. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM, pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap koperasi.

18) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
- b. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- c. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum optimal
- b. Kurangnya pembinaan olahraga

20) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal.

21) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih kurang.

22) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari budaya melayu dan budaya nasional.
- b. Belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya melayu dan budaya nasional.

23) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah kurangnya minat baca masyarakat.



24) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah pengelolaan arsip yang belum optimal, terkendala oleh: masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis; belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut, Masih terjadinya Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing, dan kurangnya Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
- c. Kesejahteraan nelayan belum maksimal
- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum maksimal.

26) Urusan Pariwisata

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang masih kurang optimal, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan destinasi obyek wisata; Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Belum optimalnya pengembangan, pendampingan, pemberdayaan dan pemasaran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif.

27) Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah:

- a. Belum optimalnya produktivitas pertanian dan peternakan.
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas petani, penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Belum optimalnya kapasitasnya/kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan bidang keahliannya.

28) Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.



29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

- a. Belum terpenuhinya Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau
- b. Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT)
- c. Belum optimalnya Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya.

30) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
- b. Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

31) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

32) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:

- a. Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi
- b. Belum optimalnya satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan

33) Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat daerah adalah:

- a. Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya.
- b. Belum optimalnya kerukunan umat beragama.

34) Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

35) Unsur Penunjang Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang perencanaan adalah belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

36) Unsur Penunjang Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya peningkatan retribusi dan pajak daerah, penarikan piutang pajak, dan inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi

berbasis elektronik.

- b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

37) Unsur Penunjang Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kepegawaian adalah:

- a. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
- b. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
- c. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum terpenuhi.

38) Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

39) Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN.

40) Unsur Penunjang Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengawasan adalah:

- a. Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah ditunjukkan dengan tingkat maturitas SPIP.
- b. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
- c. Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD

41) Unsur Penunjang Pengelolaan perbatasan

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan adalah belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan.

42) Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan penghubung adalah belum optimalnya pelayanan penghubung.

43) Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial dan politik, belum optimalnya ketahanan nasional.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Berdasarkan dokumen Rancangan RKP Tahun 2026, perkembangan perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun menghadapi tekanan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2-5,8 persen, sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi global dan penguatan fundamental domestik. Proyeksi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi motor pertumbuhan, dukungan investasi melalui hilirisasi industri, serta stabilitas sektor keuangan yang terjaga. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi dan menjaga stabilitas daya beli melalui peningkatan efisiensi belanja, perbaikan kualitas subsidi, dan penguatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, kebijakan moneter Bank Indonesia tetap diorientasikan pada stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, dengan target inflasi $2,5 \pm 1$ persen yang merupakan sasaran dalam RKP 2026 dan konsisten dengan bauran kebijakan fiskal-moneter dalam mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi eksternal, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada risiko perlambatan global, ketegangan geopolitik, serta kenaikan suku bunga internasional yang dapat memengaruhi aliran modal dan nilai tukar. Meski demikian, pemerintah menargetkan cadangan devisa tetap berada pada level aman, yaitu sekitar 6,2-6,4 bulan impor, yang menjadi bantalan penting bagi stabilitas makro. Kinerja neraca pembayaran diperkirakan tetap terjaga, meskipun tekanan defisit transaksi berjalan terutama pada komponen jasa dan pendapatan primer perlu diwaspadai. RKP 2026 menekankan pentingnya penguatan ekspor bernilai tambah, peningkatan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta percepatan implementasi program hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah dan memperkuat struktur ekonomi domestik.

Kondisi sektor keuangan nasional juga menunjukkan stabilitas yang solid, dengan perbankan yang memiliki rasio kecukupan modal tinggi dan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit terus meningkat didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan pelonggaran kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk



mendorong pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM, ekonomi hijau, dan industri pengolahan. Pemerintah juga memperkuat ekosistem investasi melalui penyederhanaan perizinan, pengembangan proyek strategis nasional (PSN), serta perluasan daftar proyek investasi prioritas untuk meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN). Upaya ini dipandang sebagai kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, mengingat kontribusi investasi terhadap pertumbuhan semakin penting di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

Di sisi lain, risiko terhadap perekonomian nasional masih perlu dikelola secara hati-hati. Tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, potensi kenaikan harga energi, pengaruh konflik geopolitik pada rantai pasok global, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi negara mitra dagang utama dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas harga dan neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, strategi pemerintah difokuskan pada penguatan cadangan pangan, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, percepatan transformasi digital, serta penguatan sinergi pusat-daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang. RKP 2026 juga menekankan pentingnya reformasi struktural di berbagai sektor, terutama industri manufaktur, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, serta ekonomi hijau, untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi nasional dalam RKP Tahun 2026 menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang terarah, sinergi moneter-fiskal yang kuat, stabilitas eksternal yang terjaga, serta percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan investasi menjadi fondasi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan atau pekerjaan hijau (*green jobs*) perlu dilakukan sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan transisi energi. Pekerjaan hijau juga didorong untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Keseimbangan antara permintaan (*demand*) tenaga kerja hijau untuk pekerjaan hijau dan penyediaan (*supply*) tenaga kerja hijau yang berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau, termasuk merealisasikan Misi Ketiga Pembangunan Daerah Kepri yaitu Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter. Penciptaan pekerjaan hijau akan diwujudkan melalui (a) pengembangan ekosistem pekerjaan hijau, dan (b) pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi *administered price*, yaitu inflasi yang dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam mengatur harga barang dan jasa. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah



terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah. Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik. Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2026, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp16.500-16.900 per dolar AS.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-



prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan. Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂- EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah pada tahun 2026 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam pada tahun 2026 pada kisaran USD60-USD80 per barel.



Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8
2.	Inflasi (%)	1,5-3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500-16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6-7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	60-80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600-605
7.	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953-1017

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2025 Bank Indonesia, Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,60% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan komponen Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan. Inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok: (1) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (2) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun; serta (3) kelompok pendidikan.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani. Prospek perekonomian global diperkirakan tetap tumbuh stabil,



meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tetap kuat diindikasikan dapat menjadi faktor pendorong perekonomian global. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang. Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	Rasio Gini	Indeks	0,359-0,371
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46-7,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,17-3,77
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,29-6,22
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	65,24
7	Indeks Harmoni	Indeks	Bagus
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,61-0,63
9	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	180,77-191,90
10	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	49,87

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat meliputi:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: (a) Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem One Single Submission-Risk Based Approach



- (OSS RBA); (b) Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik; dan (c) Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta quality tourism. b. Mendukung implementasi kebijakan short term visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri. c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
 3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
 4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat local value chain (LVC).
 5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS cross border.
 6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
 7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor.
 8. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (a) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (b) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (c) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (d) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (e) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (f) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (g) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.



9. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
 10. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakankebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengkampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
 11. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
 12. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal melalui strategi peningkatan pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta pemanfaatan pembiayaan yang terukur. Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan regulasi pemungutan, peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis, serta pendayagunaan aset dan BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai lebih dari separuh total pendapatan daerah. Kondisi ini menandakan bahwa



ruang fiskal daerah masih terbatas dan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, optimalisasi PAD belum sepenuhnya tercapai karena berbagai kendala—seperti kualitas data objek pajak yang belum optimal, modernisasi pemungutan yang belum merata, serta kontribusi BUMD yang masih relatif kecil dibanding potensi ekonomi daerah.

Pada sisi belanja, struktur APBD menunjukkan dominasi belanja operasi yang mencapai hampir tiga per empat dari total belanja daerah, sehingga ruang untuk meningkatkan belanja modal menjadi relatif terbatas. Belanja operasi yang tinggi terutama disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta kewajiban mandatori. Meskipun belanja wajib merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi, dominasi belanja operasi berdampak pada terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk memperluas belanja modal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan konektivitas antar pulau sebagai karakteristik wilayah Kepulauan Riau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena belanja modal merupakan instrumen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan ketimpangan, dan memperkuat daya saing wilayah. Dengan demikian, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi belanja operasi dan melakukan realokasi ke belanja yang lebih produktif menjadi sangat penting agar APBD mampu memberikan dampak pembangunan yang lebih signifikan.

Di sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 memanfaatkan instrumen pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam negeri untuk menutup defisit dan mendukung program pembangunan tertentu. Penggunaan pembiayaan melalui pinjaman harus dipandang sebagai strategi yang sah dalam pengelolaan fiskal, namun tetap memerlukan manajemen risiko yang kuat agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada tahun-tahun mendatang. Pinjaman daerah idealnya digunakan untuk program atau proyek yang memiliki dampak jangka panjang dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah di masa depan, bukan sekadar untuk menutup belanja rutin. Oleh karena itu, transparansi dalam pemilihan proyek yang dibiayai dari pinjaman, kelayakan finansial dan ekonominya, serta kemampuan bayar daerah harus menjadi perhatian utama dalam tata kelola pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan, tata kelola keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 menunjukkan arah kebijakan yang berupaya menjaga stabilitas fiskal, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Ketergantungan pendapatan pada transfer pusat, dominasi belanja operasi, kontribusi PAD yang belum optimal, serta pemanfaatan pembiayaan yang perlu lebih selektif menjadi isu-isu utama yang perlu mendapat perhatian. Penguatan kapasitas institusional, peningkatan kualitas pengawasan internal



melalui Inspektorat, modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan produktivitas belanja publik merupakan strategi penting yang perlu ditempuh untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat efektivitas anggaran, dan memastikan APBD lebih mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

3.2.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026

Proyeksi APBD dalam kurun tahun 2026 mencerminkan perkiraan kondisi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. Proyeksi keuangan daerah disusun dengan menerapkan metode sistematis-empiris, berbasis data, berupa analisis tren historis, proyeksi makro ekonomi, dan analisis terhadap potensi sumber daya daerah.

Dalam proyeksi pendapatan daerah, komponen PAD diperhitungkan kontribusinya cenderung meningkat terhadap total Pendapatan Daerah, sebaliknya, pendapatan transfer cenderung mengalami penurunan. Kenaikan PAD tersebut secara umum disumbangkan oleh kenaikan pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Dari analisis kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pencapaian visi dan misi daerah relatif kecil sehingga diperlukan peningkatan kapasitas fiskal melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ketiga. Penetapan besarnya pinjaman daerah disesuaikan dengan kapasitas-kemampuan membayar (*ability to pay*).

Beberapa kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas pada lini-lini unit kerja yang dapat memberikan retribusi yang cukup besar
2. Penataan manajemen internal, penataan orientasi bisnis, dan efisiensi dalam operasional BUMD agar terdapat pembagian dividen yang cukup untuk menambah PAD, Sehingga tujuan pembentukan BUMD bisa tercapai, yakni sebagai penopang APBD dalam penyokong kesejahteraan masyarakat, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi daerah.
3. Peningkatan Penerimaan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan.
4. Penatausahaan aset secara menyeluruh dan terinci dengan melakukan evaluasi dan appraisal terhadap nilai jual dan nilai guna aset agar lebih



optimal sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan belanja yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*); dan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
2. Belanja daerah dilakukan secara selektif dan tepat guna dan tepat sasaran dengan mengedepankan prioritas capaian RPJMD dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung.
3. Belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (rupiah)

NO	Uraian	2026
1	2	3
1	Pendapatan Asli Daerah	1.771.661.677.280
1.1	Pajak Daerah	1.544.306.743.507
1.2	Retribusi Daerah	180.696.085.853
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.000.000.000
1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	42.658.847.920
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan		47,43%
2	Pendapatan Transfer	1.962.521.575.030
2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.962.521.575.030
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	286.273.355.000
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.211.588.401.770
2.1.3	Dana Alokasi Khusus	464.659.818.260
2.1.5	Dana Insentif Daerah	
Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan		52,54%
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	1.337.343.525
3.1	Pendapatan Hibah	1.337.343.525
3.1.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Kontribusi lain lain terhadap pendapatan		0,04%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.735.520.595.835



NO	Uraian	2026
1	2	3
5	Belanja Daerah	3.967.074.441.227
5,1	Belanja Operasi	2.843.246.359.764
5.1.1	Belanja Pegawai	1.491.038.629.953
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.287.960.072.815
5.1.3	Belanja Subsidi	2.864.494.061
5.1.4	Belanja Bunga	10.540.441.672
5.1.5	Belanja Hibah	50.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	842.721.263
Kontribusi Belanja Operasi Terhadap Belanja		71,67%
5,2	Belanja Modal	582.076.132.160
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.595.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.162.940.092
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	252.805.798.103
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	219.285.549.609
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.022.323.751
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.204.520.604
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja		14,67%
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
Kontribusi BTT Terhadap Belanja		0,38%
5,4	Belanja Transfer	526.751.949.303
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	505.386.949.303
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	505.386.949.303
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	21.365.000.000
5.4.2.4	Bantuan Keuangan Khusus	21.365.000.000
Kontribusi Belanja Transfer Terhadap Belanja		13,28%
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.967.074.441.227
SURPLUS /DEFISIT		(231.553.845.392)
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	250.600.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-



NO	Uraian	2026
1	2	3
6.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	250.600.000.000
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		250.600.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.046.154.608
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	19.046.154.608
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		19.046.154.608
PEMBIYAAAN NETTO		231.553.845.392
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		0

Sumber: TAPD Provinsi Kepulauan Riau (2025)

3.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Landasan hukum dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

- Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;



- b. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- 2) Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- 5) Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah.
- 6) Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- 7) Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan
- 8) Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi



Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium.

- 9) Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- 10) Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD.
- 11) Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya.
- 12) Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

c. Peningkatan Dana Perimbangan dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 3) Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain :

- 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja berdasarkan Undang-Undang No 20



- Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pedoman Penyusunan APBD;
- 2) Belanja Fungsi Kesehatan, diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD meliputi:
 - a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
 - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
 - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
 - e. penguatan jejaring layanan primer,
 - f. penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
 - 3) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebesar 0,9% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
 - 5) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar 0,34% dari total belanja daerah, berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD.
 - 6) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Penyusunan APBD.

Tabel 3.4

Belanja Wajib Yang Ketentuannya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
A	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN			
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	384.691.673.985,00	
		Program Pengembangan Kurikulum	650.000.000,00	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	100.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	654.462.896.734,00	
		TOTAL	1.040.204.570.719,00	26,10%
B	BELANJA FUNGSI KESEHATAN			
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.530.118.798,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.034.740.882,00	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	190.757.236,00	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.499.900.000,00	
		TOTAL	126.195.804.296,00	3,17%
C	BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK			
1	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.940.287.380,00	
		Jumlah	31.940.287.380,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.870.000.000,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.100.000.000,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	300.000.000,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.130.000.000,00	
		Program Penataan Bangunan Gedung	120.950.000.000,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	57.500.000.000,00	
		Program Penyelenggaraan Jalan	117.654.272.000,00	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	700.000.000,00	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	700.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.676.925.661,00	
		Jumlah	339.681.197.661,00	
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	220.000.000,00	
		Program Kawasan Permukiman	12.915.459.116,00	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	100.592.685.714,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.073.625.999,00	
		Jumlah	130.801.770.830,00	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	2.000.000.000,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.263.775.043,00	
		Jumlah	35.263.775.043,00	
6	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.463.926.427	
		Jumlah	17.463.926.427,00	
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.177.904.872,00	
		Jumlah	31.177.904.872,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.669.447.636,00	
		Jumlah	19.669.447.636,00	
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.210.376.422,00	
		Jumlah	24.210.376.422,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.066.058.507,00	
		Program Pengelolaan Persampahan	950.000.000,00	
		Program Pengelolaan Hutan	501.974.600,00	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	50.000.000,00	
		Jumlah	36.568.033.107,00	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.448.322.341,00	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	211.500.000,00	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.400.635.000,00	
		Jumlah	16.155.457.341,00	
12	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	750.000.000,00	
		Program Pengelolaan Pelayaran	16.025.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.764.267.478,00	
		Jumlah	37.539.267.478,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.474.140.000,00	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.311.980.510,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.961.267.244,00	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	250.000.000,00	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	300.000.000,00	
		Jumlah	32.297.387.754,00	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.095.849.430,00	
		Jumlah	15.095.849.430,00	
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	120.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.459.415.709,00	
		Jumlah	15.579.415.709,00	
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.028.850.000,00	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	22.379.152.430,00	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.200.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.494.487.163,00	
		Jumlah	42.102.491.593,00	
17	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.906.325.673,00	
		Jumlah	11.906.325.673,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
18	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.662.997.577,00	
		Jumlah	20.662.997.577,00	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000,00	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.806.168.276,00	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.481.555.904,00	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	350.000.000,00	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	350.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.077.114.164,00	
		Jumlah	62.264.838.344,00	
20	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.626.938.330,00	
		Jumlah	15.626.938.330,00	
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	300.000.000,00	
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.055.800.000,00	
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	2.320.000.000,00	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.904.815.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.528.361.313,00	
		Jumlah	21.108.976.313,00	
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.963.474.991,00	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	200.000.000,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Jumlah	18.163.474.991,00	
23	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	83.539.545.725,00	
		Jumlah	83.539.545.725,00	
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Program Pengelolaan Perbatasan	2.200.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.431.223.956,00	
		Jumlah	10.631.223.956,00	
25	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Penghubung	3.454.525.301,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.424.559.725,00	
		Jumlah	13.879.085.026,00	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.989.857.227,00	
		Jumlah	11.989.857.227,00	
		TOTAL	1.095.319.851.843,00	27,48
D	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN			
1	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.223.230.040,00	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.977.217.054,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.207.400.289,00	
		Jumlah	46.407.847.383,00	1,16%
E	BELANJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	Program Kepegawaian Daerah	2.670.000.000,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.348.473.588,00	
		Jumlah	23.018.473.588,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.669.779.763,00	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.859.847.067,00	
		Jumlah	16.529.626.830,00	
		TOTAL	39.548.100.418,00	0,99%
F	BELANJA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	384.691.673.985,00	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00	
		Jumlah	384.991.673.985,00	
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.530.118.798,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.100.000.000,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	300.000.000,00	
		Jumlah	1.400.000.000,00	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	220.000.000,00	
		Program Kawasan Permukiman	12.915.459.116,00	
		Jumlah	13.135.459.116,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	2.000.000.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.174.050.000,00	
7	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	651.192.000,00	
		Program Penanganan Bencana	1.365.400.000,00	



No	Perangkat Daerah	Jenis Belanja <i>Mandatory Spending</i>	Pagu Indikatif	Persentase Terhadap Total Belanja Daerah
		Jumlah	6.190.642.000,00	

Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- 2) Belanja DAK BOS;
- 3) Belanja Operasional Kantor; dan
- 4) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 - 2026.

c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2026 menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank dan Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2026, dan isu strategis daerah tahun 2026.

4.1. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

4.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 adalah: **"KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA"**.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata"**, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter;
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. **Tujuan Pertama:** Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif
- Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan
- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan



berdayasaing.

- Sasaran 4 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan
- Sasaran 5 : Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha;
- Sasaran 6 : Menurunnya tingkat kemiskinan.

2. Tujuan Kedua: Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 7: Meningkatnya kualitas infrastruktur publik;
- Sasaran 8: Meningkatnya konektivitas transportasi publik

3. Tujuan ketiga: Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 9 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- Sasaran 10: Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- Sasaran 11: Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan pemuda dan olahraga.

4. Tujuan Keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 12: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
- Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan;
- Sasaran 14 : Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan;

5. Tujuan Kelima: Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 15: Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu;

6. Tujuan keenam: Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- Sasaran 17: Resiliensi terhadap Bencanadan Perubahan Iklim;

Indikator yang digunakan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di dalam RPJMD tersebut dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:



Tabel 4.1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
Kepulauan Riau, Maju, Makmur dan Merata 1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah 2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah 3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter 4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan 5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.46-7.38
		Rasio Gini (Indeks)	0.359-0.371
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)	180.77-191.90
	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,11
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,556
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41.71-42.19
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	72,46
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.29-6.22
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	39,12
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	67,29
	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,66



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4.17-3.77
	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Indeks Infrastruktur (Indeks)	65,24
	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	52,65
		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	3,065
	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,72
	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0.61-0.63
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,58
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,35
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	11,05
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,32
	Meningkatnya kualitas dan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0.327-0.322



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
	perlindungan perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	71,78
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	71,85
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,355
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	A-
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,33
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	68,46
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,43
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,48



Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81,74
	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) (Indeks)	51,23
	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,68
	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Harmoni (Indeks)	Bagus
	Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	61,68
	Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84.37-84.51
	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	49,87
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,67
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	108



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2026, Prioritas RKP Tahun 2026 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

- 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- 2). PDRB per kapita (juta);
- 3). Kontribusi PDRB Provinsi;
- 4). Tingkat Kemiskinan;
- 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6). Indeks Rasio Gini;
- 7). Indeks Modal Manusia;
- 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
- 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Sebanyak 17 program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.



2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Sebanyak 8 program terbaik cepat yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Kegiatan prioritas utama sesuai kewenangan daerah yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Kegiatan Prioritas Utama RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	
Prioritas Nasional 1	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2.	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)
	3.	Pembangunan pangan hewani
	4.	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	5.	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	6.	Peningkatan penyediaan energi
	7.	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
	8.	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	9.	Konservasi sumberdaya air
	10.	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
	11.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	12.	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	13.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	14.	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	15.	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	16.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	17.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau



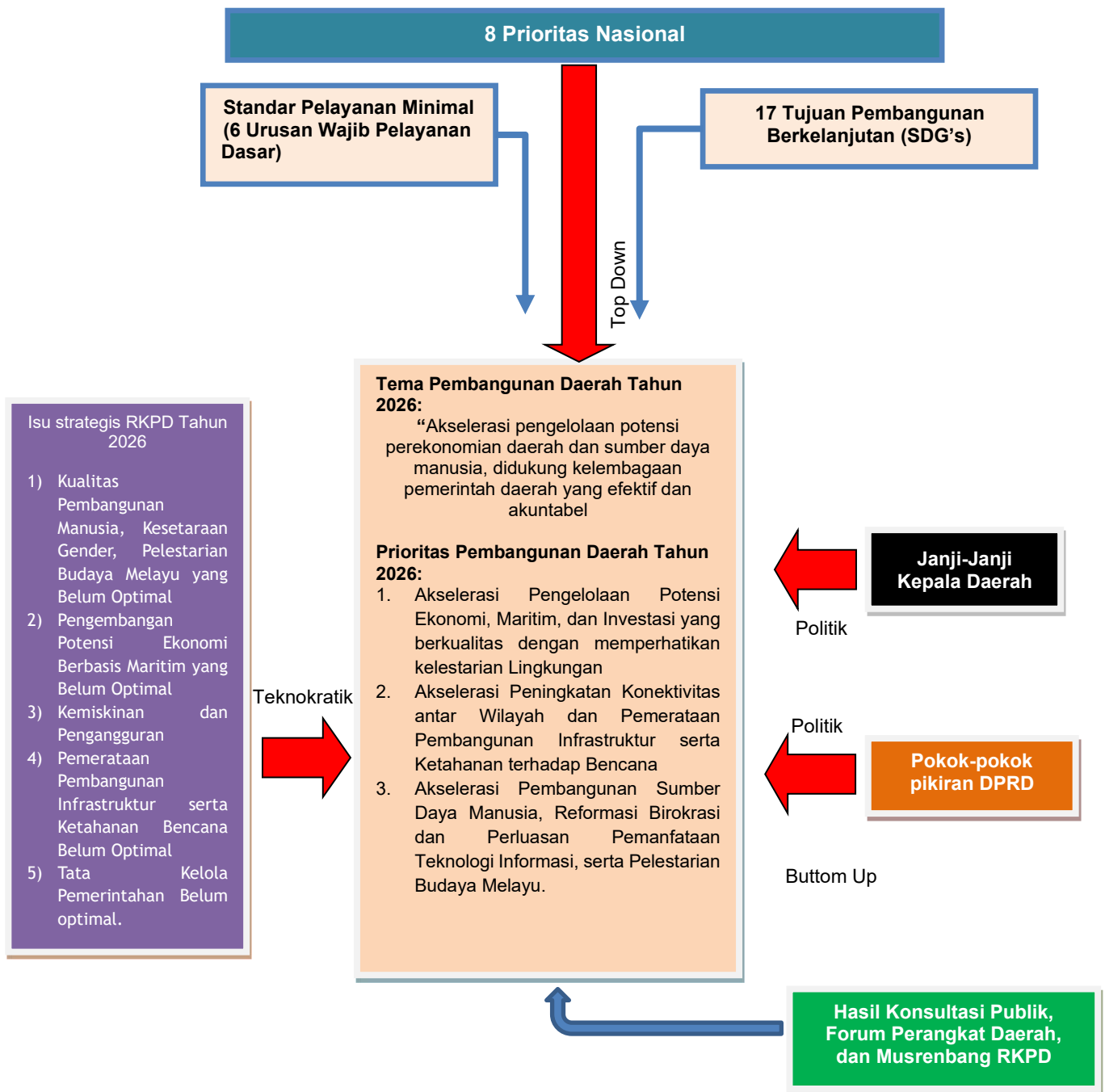
Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	
	18.	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	19.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	20.	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	21.	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	22.	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	23.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	24.	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	25.	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	26.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	27.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	28.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	29.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	30.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	31.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	32.	Penurunan kematian ibu dan anak
	33.	Pencegahan dan penurunan stunting
	34.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	35.	Penuntasan TBC
	36.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	37.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	38.	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis
	39.	Investasi pelayanan kesehatan primer
	40.	Pembangunan RS lengkap berkualitas
	41.	Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan
Prioritas Nasional 5	42.	Pengembangan industri



Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	
Prioritas Nasional 6	43.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	44.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	45.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	46.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
Prioritas Nasional 7	47.	Pencegahan tindak pidana korupsi
	48.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN
	49.	Transformasi digital layanan publik prioritas
	50.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
Prioritas Nasional 8	51.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	52.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	53.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

4.2.2 Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Prioritas Nasional Tahun 2026, tujuan dan sasaran RPJMD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom Up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



Gambar 4.1

Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2026, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2026 yaitu:

Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia, didukung kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Berdasarkan tema RKPD tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yaitu:

1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan

Prioritas ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi kreatif, dengan menempatkan potensi maritim sebagai motor utama pembangunan daerah. Peningkatan kualitas investasi dilakukan melalui perbaikan tata kelola perizinan, kepastian tata ruang, penyediaan kawasan strategis, serta digitalisasi layanan publik, sehingga investasi yang masuk benar-benar berorientasi pada nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Pengembangan sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada optimalisasi koridor pariwisata daerah yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan keterhubungan antar destinasi serta keunggulan komparatif wilayah. Kebijakan penguatan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi bahari, pengembangan wisata tematik (medis, kebugaran, olahraga, seni), serta pariwisata berkelanjutan yang menonjolkan potensi alam, budaya lokal, dan geopark strategis. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata difokuskan pada destinasi prioritas, termasuk penguatan kelembagaan ekonomi kreatif, penyusunan rencana aksi ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata strategis di kabupaten/kota. Pembangunan pariwisata diarahkan pada model destinasi regeneratif dengan prinsip konservasi, dekarbonisasi, penciptaan green jobs, dan inklusivitas, serta mendukung implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Batam dan Bintan. Penguatan sektor pariwisata dilakukan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, sertifikasi tenaga kerja pariwisata, serta penyediaan fasilitas ramah lingkungan, sehingga



daya saing pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat bersaing di tingkat internasional.

Prioritas ini juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Seluruh pengembangan ekonomi diarahkan untuk tetap memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pengendalian pencemaran, konservasi pesisir dan mangrove, pengelolaan sampah terpadu, serta penerapan prinsip pembangunan rendah karbon. Dengan mengharmoniskan percepatan ekonomi dan perlindungan lingkungan, pemerintah provinsi memastikan terwujudnya pertumbuhan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pengurangan sampah diarahkan pada penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat rumah tangga dan komunitas, penguatan infrastruktur pengolahan sampah di kabupaten/kota dengan kinerja rendah, serta memperkuat edukasi dan regulasi pemilahan sampah sejak dari sumber. Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan dukungan kebijakan yang kuat, partisipasi masyarakat, dan investasi berkelanjutan, mengingat kebutuhan reformasi pengelolaan sampah sudah sangat mendesak

2. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana

Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada jaringan transportasi laut dan udara. Upaya ini mencakup penguatan pelabuhan pengumpan regional, peningkatan kualitas dermaga dan pelabuhan rakyat, pembangunan serta pemeliharaan jalan provinsi, serta pengembangan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan listrik untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan mobilitas barang dan orang, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan disparitas antarwilayah, serta membuka akses layanan sosial dasar secara lebih merata.

Pengembangan permukiman diarahkan pada penetapan kawasan strategis provinsi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan permukiman yang memungkinkan peran langsung pemerintah provinsi dalam mendukung kabupaten/kota. Dalam rangka pemenuhan SPM, didorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik.



Peningkatan layanan angkutan umum diarahkan pada kegiatan yang relevan dengan kondisi daerah, seperti pembangunan dan penyediaan fasilitas pendukung transportasi (shelter bus, halte, atau simpul integrasi transportasi darat dan laut) sebagai alternatif dari subkegiatan yang tidak sesuai. Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional diprioritaskan pada pelabuhan yang telah dilakukan serah terima Pengembangan dan Penyelenggaraan.

Selain itu, prioritas ini menekankan pentingnya penguatan ketahanan daerah terhadap bencana, mengingat Kepri menghadapi risiko tinggi seperti cuaca ekstrem, angin kencang, banjir rob, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi wilayah pesisir dan mangrove, serta penerapan tata ruang yang berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan memperkuat konektivitas, memperluas pemerataan infrastruktur, dan meningkatkan ketangguhan bencana, Provinsi Kepulauan Riau memastikan pembangunan berjalan inklusif, aman, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kepulauan.

3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

Prioritas ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga masyarakat memiliki kompetensi, kesehatan, dan produktivitas yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pemerintah provinsi mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah serta vokasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan penurunan stunting, serta pengembangan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Dalam bidang tata kelola, prioritas ini menitikberatkan pada reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah provinsi juga memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan, integrasi data, dan peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan di seluruh wilayah kepulauan. Penyelenggaraan portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau, termasuk tingkat keterisian dan keakuratan dataset akan ditingkatkan.



Selain itu, pelestarian Budaya Melayu menjadi bagian penting dari prioritas ini untuk memperkuat identitas daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata berbasis budaya. Upaya ini mencakup pengembangan pusat kebudayaan, revitalisasi situs sejarah, penguatan pendidikan budaya, serta penyelenggaraan event budaya Melayu yang mendorong kreativitas dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan memperkuat SDM, tata kelola, digitalisasi, dan budaya lokal, Provinsi Kepulauan Riau membangun pondasi pembangunan yang inklusif, modern, dan berakar pada nilai-nilai identitas daerah.



Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1908.6
					Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	2463050
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	6.54
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,556	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	39.89
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.52
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	30.50

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,71-42,19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	91,16
					Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	7
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	72,46	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	10
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor (%)	100
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,29-6,22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	71,79
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	79,45
					Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	73.96
					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	36.12
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	54

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rupiah)	3.330,31		Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (%)	98.78
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316230,7
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42508.16
	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	35
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	32
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,17-3,77	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	3.32
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	100

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	0.13
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	11.14
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el (%) Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	
Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	52,65	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0.01
					Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	24.49
					Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	79.70
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	51.8

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	8.92
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	21.05
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	81.05
					Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	7.4
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 â€“ 15 Ha yang ditangani (%)	65.67
					Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	100
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	53.25
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) (%)	3,065	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15.8
					Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	140
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99.20

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,72	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52.50
					Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84.62
Perwujudan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,67	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	36.00
					Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	91.00
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	24.00
					Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	100
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	108	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	2.69
					Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0.27
					Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0.53
Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya derajat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,58	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	93

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	kesehatan masyarakat			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	7.0
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	5.9
					Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100
					Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	55
					Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0.33
					Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	7
					Hipertensi dalam pengendalian (%)	15

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	91
					Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	98.90
					Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1.99
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98
					Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	1
					Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	89
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama
					Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit
					Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	89%
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	69.50

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	10.50	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11.25	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	68	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	14,35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4.28	
					Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	85	
					Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	44	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	11,05	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Angka)	100
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,32		Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Angka)	100
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Angka)	88.94

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (Angka)	0,012
					Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	36
					Persentase Konten Pendidikan (%)	25
					Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	65,46
					Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	61,87
	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,327-0,322	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	13.03
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53.65
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	71,78	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	43.33
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	96
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	5.91
					Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	96
	Meningkatnya Kualitas	IPP (Indeks Pembangunan	71,85	PROGRAM PENGEMBANGAN	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	1.89

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Pemuda) (Indeks)		KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	0.23
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,355	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	0.76
					Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	7.98
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,33	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan (%)	50
					Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	42.55
					Persentase Rencana Aksi yang terealisasi di kawasan perbatasan (%)	34.48
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	
					Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	
					Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	2.17
					Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	11.90
					Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	83.72
					Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	40.4
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	68,46	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
					Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	2,71
					Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	71,36
					Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%)	100
					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	74.36
	Meningkatnya Akuntabilitas	Predikat SAKIP (Predikat)	BB	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	88.24

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Kinerja pemerintahan				Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	100
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (%)	90
					Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	100
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Program RPJMD (Predikat)	ST
					Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi (%)	100
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100
					Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100
					Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100
					Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100
					Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	2.17
					Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	40.4
					Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	83.72

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	11.90
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	100
		Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	100
					Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)	100
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	91.96
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan (%)	92.00
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,43	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100
					Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-3.41
					Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	35
					Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	27
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0.407
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	1
					Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki level Kematangan MR level 2 ke atas (Perangkat Daerah)	18

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81,74		perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	12
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	38.50
					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	-
					Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	24
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	98.59
					Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat (%)	99.65
					Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	5.28
					Persentase ASN yang Memiliki hasil penilaian kompetensi yang masih berlaku (%)	14
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	59,84
					Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	49,57

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	26
					Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	37,82
	Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks)	51,23	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (Indeks)	72
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3.07
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	46
	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,68	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Konflik Antar Suku dan Etnis yang tertangani (%)	100
					Persentase Pemuda dan Ormas yang sesuai ketentuan yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0.0029

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pemerintahan Dalam Memberikan Pendidikan Politik di Provinsi Kepri (%)	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	85
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Daerah yang Tertangani (%)	100
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100
					Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	100
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100
	Meningkatnya Penguatan Pemajuan	Indeks Pembangunan	61,68	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	28.09

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026
	Kebudayaan Melayu	Kebudayaan (IPK) (Indeks)			Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	1.73
					Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	7.66
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapan (Persentase)	8.33
					Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	49.31
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84,37 - 84,51	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)		



4.3 Keterkaitan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Wilayah Sekitarnya

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan RKPD Wilayah Sekitar (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat), meliputi:

1. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dalam hal penyediaan bahan baku, pengolahan maupun pemasaran produk industri.
2. Penyediaan transportasi laut untuk menjamin konektivitas antar wilayah untuk menunjang lalu lintas barang dan orang.
3. Kerjasama dalam pengembangan pariwisata bahari, khususnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
4. Penyediaan pasokan pangan beberapa komoditas pangan diantaranya adalah beras, sayur, bawang, cabai, ayam, dan telur.

4.4 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional

1. Keselarasan Tema RKPD

Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah “Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.” Tema ini mencerminkan fokus daerah untuk mempercepat pengembangan potensi strategis—khususnya sektor ekonomi maritim, perdagangan, industri pengolahan, dan investasi—dengan penekanan pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Tema RKP Nasional Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Penguatan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Tema nasional bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, penguatan daya saing, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Secara substansi, tema RKPD Kepri memiliki tingkat keselarasan yang kuat dengan tema nasional, terutama pada aspek penguatan ekonomi produktif dan inklusif. Fokus Kepri pada akselerasi potensi ekonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan sektor maritim, serta penguatan ekosistem usaha sejalan dengan agenda RKP yang mendorong ekonomi produktif, inklusif, dan berdaya saing. Selain itu, perhatian Kepri terhadap kelestarian lingkungan sejalan dengan arah RKP 2026 yang menekankan transisi energi bersih, pengurangan emisi, dan pembangunan rendah karbon.

Meski tema Kepri tidak secara langsung menyebut “kedaulatan pangan dan energi”, substansi tersebut tetap tercermin dalam prioritas daerah melalui program ketahanan pangan, peningkatan produksi perikanan, penguatan rantai pasok, serta pengembangan energi dan pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepri menerjemahkan tema nasional sesuai karakteristik wilayah kepulauan yang lebih menonjol pada sektor kelautan dan maritim dibanding sektor pangan konvensional. Dengan demikian, RKPD Kepri tidak hanya selaras dengan tema nasional, tetapi juga mengadaptasinya secara kontekstual agar sesuai dengan potensi ekonomi lokal



2. Keselarasan Prioritas RKPD

Prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang kuat terhadap prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam RKP Tahun 2026 dan dipedomani melalui Permendagri Nomor 10 Tahun 2025. RKP 2026 menetapkan delapan prioritas utama pembangunan nasional (Asta Cita), antara lain: penguatan kedaulatan pangan dan energi, pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif, percepatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan tata kelola, pemantapan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim. Seluruh prioritas tersebut menjadi acuan yang wajib diterjemahkan daerah ke dalam kebijakan pembangunan tahunan.

RKPD Kepri Tahun 2026 merumuskan tiga prioritas daerah, yaitu: (1) Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, (2) Akselerasi Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana, serta (3) Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu. Ketiga prioritas ini secara substansi mencerminkan integrasi dari keseluruhan prioritas nasional.

Prioritas pertama RKPD Kepri pada penguatan ekonomi maritim, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan investasi selaras dengan agenda nasional terkait ekonomi produktif dan inklusif serta hilirisasi industri. Fokus Kepri pada pengelolaan sumber daya laut dan sektor perikanan juga menjadi bentuk adaptasi dari prioritas nasional bidang pangan dan energi sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Pada prioritas kedua, RKPD Kepri menempatkan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, perumahan, air minum, sanitasi, dan mitigasi bencana sebagai agenda utama. Hal ini secara langsung mencerminkan prioritas nasional RKP 2026 yang menekankan penguatan konektivitas, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta ketahanan infrastruktur menghadapi perubahan iklim. Mengingat kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau, fokus pada konektivitas laut, udara, dan darat merupakan bentuk penyelarasan strategis yang tidak hanya memenuhi arahan nasional tetapi juga merespons kebutuhan lokal.

Sementara itu, prioritas ketiga RKPD Kepri yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender dan anak, pemuda dan olahraga, serta transformasi digital sangat selaras dengan prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia. Agenda nasional terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, literasi dan numerasi, serta pemerataan akses pendidikan



terekam secara jelas dalam program-program yang disusun Kepri. Termasuk pula dalam prioritas ini adalah agenda reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi digital melalui SPBE, dan peningkatan pelayanan publik, yang merupakan inti prioritas nasional mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, kekhasan Kepri dalam memprioritaskan pelestarian budaya Melayu selaras dengan arah RKP 2026 yang menekankan penguatan identitas nasional, harmonisasi sosial, dan kehidupan berbudaya. Fokus pada lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta penurunan emisi gas rumah kaca juga menunjukkan kesesuaian langsung dengan prioritas nasional dalam pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Secara keseluruhan, prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sangat selaras dan konsisten dengan prioritas nasional dalam RKP Tahun 2026. Penyelarasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena keempat prioritas nasional ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup telah diadaptasi oleh Kepri ke dalam prioritas yang relevan dengan kondisi wilayah kepulauan.

2. Keselarasan Program RKPD

Program-program pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang kuat dengan Prioritas RKP Tahun 2026 sebagaimana menjadi mandat dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025. RKP 2026 menegaskan delapan prioritas nasional (Asta Cita), di antaranya peningkatan kedaulatan pangan dan energi, pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif, penguatan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan iklim. Seluruh prioritas tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan program yang mendukung pencapaian target nasional.

Program RKPD Kepri 2026 pada dasarnya telah mengadopsi dan menerjemahkan arah nasional tersebut melalui serangkaian program sektoral yang sangat relevan. Program-program pada bidang ekonomi, seperti pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, perdagangan, industri pengolahan, dan peningkatan investasi, seluruhnya mendukung prioritas nasional terkait pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif serta hilirisasi industri. Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan potensi maritim yang besar juga memiliki program unggulan pada sektor kelautan dan perikanan yang sangat selaras dengan agenda nasional mengenai ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok pangan berbasis laut. Program perikanan tangkap, budidaya ikan, pemasaran hasil perikanan, diversifikasi pangan, dan



peningkatan ketahanan pangan menjadi bukti integrasi strategis daerah terhadap prioritas nasional pangan.

Pada bidang infrastruktur, program RKPD Kepri menekankan pembangunan jalan, konektivitas transportasi darat-laut-udara, penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, drainase, perumahan layak huni, serta penataan ruang. Semua ini merupakan turunan langsung dari prioritas nasional untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan infrastruktur antarwilayah. Kepri yang memiliki karakter geografis kepulauan membutuhkan transportasi laut dan udara yang kuat, sehingga program daerah tidak hanya selaras dengan RKP, tetapi juga tepat sasaran dalam konteks kebutuhan regional.

Dalam bidang sumber daya manusia, program-program pendidikan dan kesehatan pada RKPD Kepri sangat konsisten dengan prioritas nasional RKP, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan akses pendidikan menengah, pengembangan kurikulum muatan lokal, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, imunisasi, penurunan AKB, penurunan stunting, dan penyediaan layanan kesehatan berkualitas. Program-program tersebut mencerminkan fokus RKP pada SDM unggul, sehat, dan berdaya saing.

Pada bidang sosial dan kemasyarakatan, program pemberdayaan sosial, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, penanganan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan penguatan ketenteraman dan ketertiban umum menunjukkan keselarasan langsung dengan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial. Kepri secara jelas memasukkan program-program yang mendukung layanan sosial dasar dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Selanjutnya, program terkait reformasi birokrasi seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, implementasi SPBE, sistem pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal, hingga inovasi daerah sepenuhnya sesuai dengan prioritas nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan adaptif. Program-program digitalisasi layanan publik dan penguatan keamanan informasi menegaskan keselarasan Kepri dengan agenda transformasi digital nasional yang diprioritaskan dalam RKP 2026.

Program lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam RKPD Kepri, seperti pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi GRK, dan rehabilitasi lingkungan hidup, menunjukkan kesesuaian dengan RKP 2026 yang menempatkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai prioritas utama. Program-program tersebut tidak hanya memenuhi arahan nasional, tetapi juga sangat relevan bagi Kepri yang rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.



Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mendukung pencapaian kegiatan prioritas nasional. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 4.4.
Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada				1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan			1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			rencana tata ruang				Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
							1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
								Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
							1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	1.06.05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
							2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan pemberantasan kemiskinan.			kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
							2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
							2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		N BIDANG PERTANAHAN	tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
							2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
							2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
							2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
							2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Penduduk Tumbuh Seimbang	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)		KELUARGA BERENCANA (KB)		Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
							2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
							2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
							2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan						2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
							2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.					APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
							2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet
							2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004 2.18.05.1.01.0005	Pengawasan Penanaman Modal Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015 2.19.02.1.02.0003 2.19.03.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda Seleksi Atlet Daerah



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016 2.20.02.1.01.0019	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Peningkatan kualitas statistik sektoral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
							2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi		
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi		
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
							3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
							3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
							3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			Ekonomi Nasional			3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
							3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
							3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
							3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
							3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
							3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
							3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
							3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
					3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			pangan, air dan energi		PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
							3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
							3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
							3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
							3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
							3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
							3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi				Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
							3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	masyarakat yang adil dan makmur.							

Program dan sub kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mendukung Asta Cita, dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.

Program, dan Subkegiatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dalam mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Penempatan Tenaga Kerja
		3. Sekolah Rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Ketahanan Pangan	4. Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan
		wasembada Pangan (Irigasi untuk	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM
		Mendukung Swasembada Pangan)	
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	
		4. Penuntasan TBC	
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	
		4. Makan Bergizi Gratis	
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting



NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Pengelolaan Persampahan



4.5 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program-program yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang kuat dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Kepri telah menempatkan enam urusan wajib pelayanan dasar—pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial—sebagai bagian integral dari program prioritas daerah. Penyelarasan ini terlihat dari bagaimana program RKPD dirancang tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pemenuhan indikator-indikator SPM.

Pada urusan pendidikan, program RKPD Kepri mengenai peningkatan akses dan mutu pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan kurikulum dan literasi merupakan wujud nyata komitmen terhadap SPM Pendidikan. Fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK, peningkatan layanan pendidikan inklusif, dan pemenuhan kebutuhan sarana ruang kelas menunjukkan bahwa Kepri telah menyelaraskan programnya dengan target pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Keselarasan juga tampak jelas pada urusan kesehatan, khususnya melalui program peningkatan layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, pengendalian penyakit menular, penanganan stunting, serta penyediaan layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah. Program yang memperkuat akreditasi Puskesmas dan partisipasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejalan dengan SPM Kesehatan yang mensyaratkan seluruh penduduk memperoleh akses layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Kepri juga mencakup program penanganan kedaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan bencana kesehatan, yang merupakan komponen penting dalam SPM.

Pada urusan pekerjaan umum, penyediaan air minum aman (SPAM), sanitasi layak, pengelolaan drainase, dan pengurangan risiko banjir menunjukkan sinkronisasi dengan SPM urusan Pekerjaan Umum terkait penyediaan layanan dasar permukiman. Target peningkatan akses air minum dan sanitasi bukan hanya mendukung SPM, tetapi juga mendukung agenda nasional mengenai percepatan layanan dasar untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Program urusan perumahan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), dan penyediaan hunian bagi kelompok rentan, juga sangat selaras dengan kewajiban daerah dalam memenuhi SPM Perumahan. Kepri telah menempatkan program-program ini sebagai bagian dari prioritas pemerataan layanan permukiman, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, keselarasan diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas aparaturnya Satpol PP, kesiapsiagaan penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pengawasan dan penegakan peraturan daerah, serta peningkatan keamanan wilayah. Program ini mendukung SPM bidang ketenteraman dan



ketertiban yang menuntut daerah memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman gangguan keamanan dan kedaruratan.

Selanjutnya, urusan sosial tercermin dalam program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan anak, pelayanan lansia, dan penguatan sistem jaminan sosial daerah. Program-program ini menjawab kewajiban SPM Sosial, yang mengharuskan daerah memberikan layanan dasar kepada kelompok rentan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan, penanganan masalah sosial, serta peningkatan akses layanan rehabilitasi sosial.

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target SPM
Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1	Pendidikan				
	a. pendidikan menengah;	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional			
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61,50	
		• Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31,50	
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa			



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
		berdasarkan hasil asesmen Nasional			
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61,50	
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31,50	
2	Kesehatan				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;	Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat				
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6	Sosial				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100,00	Program Penanganan Bencana

4.6 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs

Program-program yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi dengan berbagai tujuan dan target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). RKPD Kepri tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga secara jelas mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola. Penyelarasan ini terlihat dari bagaimana setiap urusan pemerintahan dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs, sejalan dengan komitmen pembangunan nasional dan global.

Dari aspek pengentasan kemiskinan (Tujuan 1) dan penghapusan kelaparan (Tujuan 2), program-program RKPD Kepri yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan sektor perikanan dan pertanian memberikan kontribusi nyata pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas. Program pemberdayaan masyarakat pesisir, bantuan sosial bagi kelompok rentan, dan peningkatan produksi pangan berbasis laut memperkuat ketahanan pangan daerah sesuai karakter wilayah kepulauan.

Keselarasan terhadap Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) tercermin melalui program peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penanganan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan. Seluruh program ini menjadi cerminan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mencapai indikator kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada aspek pendidikan Berkualitas (Tujuan 4), RKPD Kepri telah menyusun program yang mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kompetensi pendidik, serta



penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak dan merata. Program-program ini secara langsung mendukung pemenuhan target pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkesetaraan gender dalam dunia pendidikan.

Program terkait pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan menunjukkan kesesuaian dengan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Demikian pula program ketenagakerjaan, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi sangat berkontribusi terhadap Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan mendorong iklim usaha yang kondusif, peningkatan keterampilan angkatan kerja, serta perluasan peluang usaha.

Keselaran berikutnya tampak dalam Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), melalui program peningkatan akses air minum aman (SPAM), pengembangan sanitasi dan drainase, serta pengelolaan limbah domestik dan persampahan. Program pembangunan perumahan layak huni, penataan permukiman, dan pengurangan kawasan kumuh mendukung Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), terutama dalam upaya menyediakan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.

Pada bidang infrastruktur dan energi, program RKPD Kepri mendukung Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui penguatan bauran energi dan pengembangan energi terbarukan, serta Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui pembangunan konektivitas antarwilayah, infrastruktur transportasi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan industri pengolahan dan ekonomi kreatif. Hal ini memperlihatkan bahwa Kepri tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga transformasi ekonomi yang modern dan berkelanjutan.

Program lingkungan hidup seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan penurunan emisi GRK mendukung Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Hal ini sangat relevan mengingat posisi Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Di bidang tata kelola pemerintahan (Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), program reformasi birokrasi, penguatan SAKIP, peningkatan layanan publik, SPBE, penegakan regulasi, dan peningkatan keamanan wilayah memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Selain itu, program komunikasi publik dan kolaborasi multipihak mencerminkan kontribusi terhadap SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan integrasi program antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 4.7.
Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Target SDGs
Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) e. Program Pengembangan UMKM f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja g. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Program Penyuluhan Pertanian.
3. Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Pengendalian Penduduk f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) h. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	f. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting h. Program Pengembangan Ekspor i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen j. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri k. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam l. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi m. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi n. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian o. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi p. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) q. Program Pengembangan UMKM r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal s. Program Promosi Penanaman Modal t. Program Pelayanan Penanaman Modal u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal v. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal w. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata x. Program Pemasaran Pariwisata y. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) e. Program Pengelolaan Pelayaran f. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian h. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara i. Program Pengelolaan Energi Terbarukan j. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan	a. Program Pengelolaan Hutan b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.	
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial f. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum g. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah h. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah j. Program Pengelolaan Keuangan Daerah k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah l. Program Penyelenggaraan Pengawasan m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi n. Program Kepegawaian Daerah o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia p. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan q. Program Perlindungan Perempuan r. Program Peningkatan Kualitas Keluarga s. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	a. Program Pengembangan Ekspor b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



4.7 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan strategi yang memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terarah, komprehensif, terkoordinasi, dan berbasis wilayah. Analisis program dan kegiatan berbasis THIS dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem menekankan bahwa seluruh intervensi harus mengacu pada tema utama penurunan kemiskinan ekstrem, mencakup seluruh dimensi kesejahteraan, melibatkan lintas sektor dan lintas aktor, serta diarahkan secara spesifik kepada kelompok sasaran dan lokasi prioritas. Melalui pendekatan tematik, program diarahkan secara konsisten untuk mengatasi deprivasi yang dialami rumah tangga miskin ekstrem, seperti keterbatasan pendapatan, akses pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlindungan sosial. Tema penurunan kemiskinan ekstrem memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah daerah terfokus pada penyelesaian akar permasalahan kemiskinan dan bukan hanya intervensi parsial.

Dari aspek holistik, program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan sosial, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas hidup secara multidimensi. Hal ini mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, penyediaan akses listrik dan air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penguatan ketahanan pangan keluarga. Pendekatan holistik memastikan bahwa intervensi tidak hanya menyelesaikan satu aspek kemiskinan, tetapi memberikan solusi menyeluruh yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat secara berkelanjutan.

Dari dimensi integratif, program penanggulangan kemiskinan ekstrem dirancang melalui koordinasi lintas perangkat daerah, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih, serta seluruh intervensi saling melengkapi. Integrasi juga melibatkan pemerintah pusat melalui program nasional seperti PKH, BPNT, JKN, PIP, pembangunan RTLH, BLT, hingga padat karya. Melalui integrasi ini, penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi lebih efektif karena memadukan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi sehingga rumah tangga miskin ekstrem dapat keluar dari kondisi kerentanannya.

Aspek spasial menjadi elemen penting dalam kerangka THIS, yaitu memastikan bahwa program dan kegiatan diarahkan secara tepat ke lokasi prioritas berdasarkan data kemiskinan ekstrem menurut desa/kelurahan. Pendekatan spasial memastikan bahwa intervensi terfokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi penduduk miskin ekstrem tertinggi, misalnya desa pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan terpencil, atau permukiman padat miskin. Penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan peta kemiskinan wilayah membantu pemerintah daerah mengidentifikasi rumah tangga sasaran per desa serta menyesuaikan intervensi sesuai karakteristik kerentanan wilayah. Dengan demikian, pendekatan spasial tidak hanya memastikan ketepatan sasaran, tetapi juga memudahkan pemantauan dan evaluasi dampak karena intervensi terakumulasi pada lokus yang sama.



Secara keseluruhan, penerapan THIS dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem memastikan bahwa program yang disusun pemerintah daerah bersifat terarah, menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis wilayah. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan ekstrem karena intervensi dilakukan secara simultan pada rumah tangga miskin ekstrem dan wilayah prioritas. Dengan temu-kelola lintas perangkat daerah, fokus pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi, serta penetapan lokus yang jelas, pendekatan THIS menjadi instrumen penting untuk mempercepat pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem sebagaimana menjadi agenda nasional.

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mendukung Tema Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
2	Dinas Perhubungan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
3	Dinas Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
5	Dinas Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
15	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Tanggul Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
20	Dinas Kesehatan	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
21	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
22	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
23	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
24	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
25	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
26	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
29	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
30	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
36	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Mengurangi Beban Pengeluaran
37	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
38	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Mengurangi Beban Pengeluaran
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
43	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
44	Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran
45	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
46	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
48	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
49	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
50	Dinas Sosial	Pemulasaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran
51	Dinas Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran
52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
53	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Mengurangi Beban Pengeluaran



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
54	Dinas Sosial	Pengasuhan	Mengurangi Beban Pengeluaran
55	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran
56	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran
57	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran
58	Dinas Sosial	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran
59	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
60	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran
61	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
62	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
63	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
64	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
65	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran
66	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mengurangi Beban Pengeluaran
68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
69	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
70	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran
71	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran
72	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran
73	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran
74	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran
75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
77	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
78	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran
79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
80	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
81	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran
82	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
83	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
84	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran
85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
86	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Mengurangi Beban Pengeluaran
87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Mengurangi Beban Pengeluaran
88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Pendapatan
90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan Pendapatan
91	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
92	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pendapatan
94	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatkan Pendapatan
95	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
96	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
97	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
98	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
99	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
100	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
101	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Meningkatkan Pendapatan
102	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan
103	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan
104	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
105	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
106	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
107	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
108	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
109	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
110	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
111	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
112	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan



NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
113	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatkan Pendapatan
114	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
115	UPTD Balai Benih Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
116	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatkan Pendapatan
117	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
118	UPTD Balai Benih Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
119	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan
120	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan
121	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan
122	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan

4.8 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting

Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan lintas sektor harus diarahkan secara terfokus untuk menurunkan prevalensi stunting, melalui intervensi yang komprehensif, saling terhubung, dan berbasis lokus prioritas. Secara tematik, penanganan stunting di Kepri tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi agenda strategis lintas bidang yang diikat oleh tema besar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tema ini memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, akses layanan kesehatan dasar, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Pendekatan holistik terlihat dari penyusunan program yang tidak hanya menysasar faktor kesehatan, tetapi juga mencakup seluruh determinan stunting, seperti kemiskinan, pendidikan, pangan, sanitasi, air bersih, hunian layak, pola pengasuhan, dan ketahanan ekonomi keluarga. Program-program seperti peningkatan cakupan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, penyediaan gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan Puskesmas, penurunan anemia, serta pemberian tablet tambah darah merupakan intervensi sensitif dan spesifik gizi yang mendukung aspek kesehatan langsung. Sementara itu, program penyediaan sanitasi layak, air minum aman, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni, peningkatan ketahanan pangan keluarga, bantuan sosial, dan penyuluhan parenting menunjukkan bahwa intervensi di Kepri telah menyentuh berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi gizi anak secara jangka panjang.

Dari sisi integratif, upaya penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah yang melibatkan perangkat daerah terkait, dan pemerintah kabupaten/kota. Integrasi ini memastikan tidak ada tumpang tindih program dan setiap intervensi melengkapi satu sama lain. Kepri juga mengintegrasikan program pusat seperti BKKBN, Kemenkes, PKH, BPNT, dan program gizi nasional untuk memperkuat efektivitas intervensi. Kolaborasi ini diperkuat melalui forum percepatan penanganan stunting, audit stunting, rembuk stunting, pendampingan keluarga, serta pemantauan lintas sektor, sehingga seluruh pemangku kepentingan bergerak dengan arah kebijakan yang sama.

Aspek spasial dalam penanganan stunting semakin mempertegas keselarasan perencanaan daerah berbasis THIS. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan data prevalensi stunting per kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat desa/kelurahan, untuk menentukan lokus prioritas intervensi. Pendekatan spasial memastikan bahwa program diarahkan terutama ke daerah dengan prevalensi tertinggi, kawasan pesisir terpencil, dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap akses layanan kesehatan, pangan, dan sanitasi. Penggunaan data keluarga berisiko stunting, hasil survei gizi, serta data sistem laporan gizi dan P3KE membantu menentukan rumah tangga sasaran secara lebih presisi. Dengan demikian, intervensi dilakukan secara terfokus, memaksimalkan dampak, dan mencegah fragmentasi program di wilayah yang tidak membutuhkan prioritas tinggi.

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mendukung Tema Penanganan Stunting dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Dukungan Program RKPD Tahun 2026 Terhadap Penanganan Stunting
Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi



No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota



No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
5	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN



No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	KEUANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PERENCANAAN
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

4.9 Program Inovasi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan *research-based policy* dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berbagai riset telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjawab berbagai permasalahan daerah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Salah satu contoh riset yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan diantaranya adalah Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Kepri yang merupakan landasan pembentukan BUMD Energi Kepri yang saat ini tengah dalam pembahasan Bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan pengalokasian anggaran dan sumber daya manusia. Terkait dengan Inovasi Daerah, berikut secara singkat dapat dijelaskan beberapa inovasi daerah yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. BEASISWA ONLINE

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka di pandang perlu untuk melaksanakan



inovasi daerah dengan tujuan mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam dan luar negeri melalui *Website* bagi calon penerima beasiswa tingkat pendidikan tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang Bernama BEASISWA ONLINE. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah terbangunnya penyaluran beasiswa yang selektif serta akurat terhadap mahasiswa yang berprestasi. Adapun manfaat dari inovasi ini adalah untuk menjamin tewujudnya penyaluran beasiswa yang objektif, transparan, dan akuntabel.

2. KERIS ONLINE

Inovasi KERIS Online (Kepulauan Riau SAMSAT Online) adalah pelayanan SAMSAT kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor SAMSAT/Gerei SAMSAT. Masyarakat cukup menggunakan *Handphone Android* untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus tahunan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang dengan membayar secara konvensional. Adapun pelayanan KERIS ONLINE khusus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *Handphone Android* secara *real time* ini dapat diakses melalui aplikasi e -Samsat KEPRI dalam *smartphone* berbasis android. Inovasi ini diprakarsai oleh Badan Pendapatan Daerah dengan melibatkan Ditlantas Polda Kepri, Jasa Raharja dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah Potensi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dengan manfaat yang ingin dicapai adalah mempermudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

3. GEMA EKRAF

Dalam rangka memudahkan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif di masa pandemi covid 19 dan pasca pandemi diperlukan suatu Inovasi. Adapun inovasi ini diberi nama “GEMA EKRAF” yaitu Sistem Pemasaran berbasis web untuk 17 sub sektor ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Masyarakat pelaku Ekonomi Kreatif. *Outcome* dari inovasi ini adalah mengembangkan dan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun manfaat yang ingin didapat adalah memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif Kepulauan Riau kepada masyarakat luas melalui *online marketing* informasi produk sehingga dapat menjangkau konsumen yang ada di daerah-daerah tanpa harus terjun langsung ke daerah tersebut untuk mempromosikan produk serta memberikan Pengetahuan dan Pemahaman



tentang Pengembangan Sistem Pemasaran Pelaku Ekonomi Kreatif kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

4. SEHAT DESA KU

Melihat Kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan akses termasuk terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan maka perlu adanya inovasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diberi nama SEHAT DESA KU. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan masyarakat sekitar. *Outcome* dari inovasi ini adalah terpenuhinya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan manfaat yang ingin diraih adalah mudahnya akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

5. SUBSIDI BUNGA/MARGIN

Dalam memperkuat kemampuan permodalan usaha, percepatan pengembangan sektor riil dan meningkatkan daya saing usaha, maka di pandang perlu untuk melaksanakan Inovasi berupa program kebijakan subsidi bunga/margin kepada pelaku usaha. Adapun inovasi ini diberi nama “Subsidi Bunga/Margin” yaitu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga/margin kepada pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bank Riau Kepri Syariah dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah Meningkatkan daya saing usaha pelaku usaha. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah melindungi, mempertahankan dan pengembangan usaha kecil dan menengah selama covid dan pasca covid.

6. BPJS NELAYAN

Pemberian jaminan perlindungan bagi individu nelayan perlu dilakukan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan (Asuransi Nelayan), berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Inovasi BPJS Nelayan yang merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang bekerjasama dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang dan cabang di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta Masyarakat Nelayan. *Outcome* dari inovasi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada nelayan akan pentingnya berasuransi dan membangun keinginan untuk berasuransi secara mandiri. Sedangkan manfaat yang ingin diraih adalah nelayan kecil di provinsi Kepulauan Riau lebih merasa aman dan nyaman untuk beraktifitas di laut.

7. KEPRI TERANG



Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau maka dipandang perlu untuk melaksanakan terobosan yang mengarah pada pembangunan jaringan listrik dan energi baru dan terbarukan, yang mampu menerangi seluruh pedesaan di pulau-pulau. Penerangan merupakan kebutuhan mendasar, yang memberi dampak positif pada berbagai sektor kehidupan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi tersebut Bernama KEPRI TERANG yang merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melibatkan PLN dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya distribusi energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendasar.

8. SEKOPER (SEKOLAH PEREMPUAN) RAJA SALEHA

Kebijakan pembangunan nasional dan daerah telah menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Perempuan, sampai saat ini, masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan. Hal inilah yang menjadi salah satu inisiasi inovasi sekolah perempuan bagi perempuan rentan yang putus sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu SEKOPER (Sekolah Perempuan) Raja Saleha. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melibatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KB Kota Tanjungpinang, PKBM Bintang Sari, PKBM Nilam Permata Bintang, PKBM Karang Betuah, PKBM Harapan Bangsa, PKBM Persada Bahari, PKBM Insan Cendikia, LKP *Brilliant College* Indonesia, serta LKP Nadhira. *Outcome* dari inovasi ini adalah meningkatnya Komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh adalah agar perempuan rentan yang mempunyai keterbatasan sosial dan ekonomi dapat mendapatkan ijazah setara dengan ijazah SMA serta memiliki kemampuan diri yang baik, menambah wawasan agar dapat berkembang, menggali potensi diri, kemampuan berperan di masyarakat



menjadi lebih besar, membangun gagasan inovatif dalam pembangunan dan menjadi Agen Perubahan di masyarakat.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Kepulauan Riau dibagi menjadi lima Kawasan yaitu (1) Kawasan Pertumbuhan yang meliputi (a) Kawasan perkotaan Batam dan KPBPB Batam, (b) Kawasan perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Tanjungpinang, (c) Kawasan perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun, (2) Kawasan Komoditas Unggulan-ekonomi biru yang meliputi Natuna dan Anambas, (3) Kawasan swasembada pangan, air dan energi swasembada energi di Natuna, (4) Kawasan Afirmasi (a) Kepulauan Lingga percepatan pengentasan kemiskinan, (b) Kepulauan Natuna Anambas daerah terdepan dan pemerataan pembangunan, dan (5) Kawasan Konservasi/Rawan Bencana.

5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan wilayah dapat dibagi dalam tiga klaster utama, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna - Kepulauan Anambas

Pencapaian target RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 membutuhkan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama karena karakter wilayah Kepri yang bersifat kepulauan menjadikan implementasi program tidak dapat dilakukan hanya pada level provinsi. Dukungan kabupaten/kota menjadi krusial dalam memastikan konsistensi data, keselarasan kebijakan, percepatan layanan dasar, serta efektivitas program strategis yang bersifat lintas wilayah. Salah satu kebutuhan detail yang paling penting adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, di mana kabupaten/kota perlu memastikan bahwa prioritas pembangunan mereka tetap mengacu pada tema, sasaran makro, dan prioritas pembangunan provinsi.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas memegang peran kunci dalam penyediaan data mikro wilayah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan berbasis spasial dan tematik. Dokumen seperti P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), peta stunting, data kualitas lingkungan (IKLH), peta kawasan kumuh, dan data rumah tangga miskin menjadi fondasi untuk menyusun intervensi sektoral dan kewilayahan yang akurat. Tanpa dukungan kabupaten/kota dalam menyediakan data yang mutakhir dan valid, target RKPD provinsi tidak dapat dicapai secara optimal.

Pada sektor ekonomi, kebutuhan dukungan kabupaten/kota mencakup penyelarasan program penguatan UMKM, koperasi, industrialisasi pengolahan,



pariwisata, dan investasi. Provinsi menetapkan arah kebijakan makro dan fasilitasi lintas kabupaten/kota, namun pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengembangan klaster ekonomi lokal, percepatan perizinan, penyiapan lokasi investasi, serta pendampingan UMKM secara langsung. Hal ini sangat penting agar sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi dapat tercapai.

Terkait pembangunan infrastruktur, provinsi membutuhkan kontribusi kabupaten/kota dalam peningkatan konektivitas intra-kabupaten, penyediaan infrastruktur dasar, dan penataan ruang, yang selaras dengan prioritas provinsi untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan meningkatkan aksesibilitas antara pulau-pulau kecil. Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas berperan dalam rehabilitasi jalan lokal, pengembangan SPAM dan sanitasi, pengelolaan persampahan, penyediaan perumahan layak huni, serta penguatan ketahanan bencana regional. Tanpa dukungan ini, pembangunan infrastruktur provinsi tidak akan berdampak optimal pada masyarakat.

Di bidang sosial dan layanan dasar, pemerintah provinsi memerlukan dukungan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama SPM kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan. Kabupaten/kota perlu memastikan bahwa Puskesmas, sekolah, dan pusat layanan sosial memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi target layanan minimal. Hal ini juga berkaitan erat dengan prioritas nasional dalam RKP 2026 yang menekankan perbaikan kualitas SDM, pemerataan akses layanan dasar, serta penguatan perlindungan sosial. Upaya provinsi untuk menurunkan kemiskinan dan stunting, misalnya, sangat bergantung pada konsistensi kabupaten/kota dalam melaksanakan intervensi sensitif dan spesifik gizi di tingkat desa/kelurahan.

Dari sisi lingkungan dan perubahan iklim, kabupaten/kota dibutuhkan untuk mempercepat pengendalian pencemaran, pengurangan emisi GRK, serta penguatan kapasitas mitigasi bencana. Target IKLH provinsi tidak dapat dicapai tanpa intervensi nyata di kabupaten/kota, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi dan penggunaan ruang terjadi di wilayah kabupaten.

Dalam rangka memajukan wilayah Natuna - Kepulauan Anambas, agenda pembangunan ke depan perlu diawali dengan penguatan layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Untuk pengembangan sektor ekonomi, pengembangan potensi pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi pilar-pilar utama di wilayah Natuna - Kepulauan Anambas. Pariwisata alam memerlukan pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alam bawah laut, topografi wilayah, keanekaragaman



hayati, serta keunikan budaya lokal. Kabupaten Natuna secara khusus memiliki *geopark* Tanjung Datuk, yang potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu UNESCO *Global Geopark*. Sementara itu, wilayah Kepulauan Anambas memiliki potensi keindahan alam bawah laut dan gugusan-gugusan pulau yang dapat dimanfaatkan baik untuk pariwisata bahari maupun pariwisata premium dengan potensi pemanfaatan pesawat apung, seperti yang telah berlangsung di Pulau Bawah. Dalam mengoptimalkan potensi destinasi-destinasi pariwisata tersebut, fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan seperti akomodasi ramah lingkungan dan pusat informasi turis perlu dibangun, bersamaan dengan pelatihan bagi pemandu wisata lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyajikan pengalaman yang autentik kepada wisatawan, khususnya wisata bahari yang berkelanjutan.

Optimalisasi potensi ekonomi biru, sebagai pilar lainnya dari perekonomian wilayah Natuna - Kepulauan Anambas, perlu diperkuat dari sisi hulu maupun hilir serta didukung oleh pengembangan riset terkait potensi ekonomi biru. Di sisi hulu, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta kegiatan pertambangan minyak dan gas serta mineral dan batubara perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi modern dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Hilirisasi produk-produk sektor primer tersebut menjadi kunci, di mana industri pengolahan ikan dan galangan kapal dapat didirikan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung ekonomi maritim. Industri teknologi tinggi, khususnya yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi gas alam, juga harus diperhatikan untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan produk dan wisata halal dapat menjadi peluang pasar baru yang menjanjikan, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipercepat peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi pariwisata, perikanan, dan industri kemaritiman.

Selain pengembangan ekonomi intra wilayah Natuna - Kepulauan Anambas, posisi strategis Natuna - Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan, membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan. Optimalisasi potensi ini harus diiringi dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Tabel 5.1

Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna - Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR	TARGET
		2026
1	Kabupaten Natuna	
	PDRB per kapita (Rp Juta)	91,24
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,74
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,60
	Indeks Daya Saing Daerah	3,35
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,99
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,02
	Indeks Pembangunan Manusia	79,99
2	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	PDRB per kapita (Rp Juta)	399,49
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,37-5,49
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,08-1,43
	Indeks Daya Saing Daerah	2,80
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	84,89
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,16
	Indeks Pembangunan Manusia	74,81

2. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Pencapaian target RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang sangat bergantung pada dukungan kuat dari pemerintah kabupaten/kota karena klaster ini merupakan pusat utama pertumbuhan ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan pelayanan publik provinsi. Keempat wilayah ini menjadi lokomotif perekonomian Kepri, sehingga keberhasilan provinsi dalam mencapai sasaran makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, dan peningkatan daya saing sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan kabupaten/kota. Dukungan ini juga penting untuk memastikan harmonisasi perencanaan daerah dengan prioritas provinsi dalam mendorong transformasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi dan investasi, pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat penyediaan kawasan industri, mempercepat perizinan usaha, meningkatkan kepastian tata ruang, dan mengoptimalkan pengembangan sektor maritim, logistik, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Kota Batam sebagai pusat manufaktur dan FTZ membutuhkan dukungan yang konsisten dalam optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), integrasi pelabuhan-bandara, keamanan industri, serta penyiapan SDM kompeten untuk industri elektronik, logistik, dan teknologi. Bintan dan Karimun perlu mempercepat pengembangan KEK



pariwisata, galangan kapal, dan hilirisasi perikanan guna mendukung kontribusi terhadap PDRB provinsi. Sementara Tanjungpinang, sebagai ibukota provinsi dan pusat layanan administrasi, berperan penting dalam mendukung sektor jasa publik, UMKM, dan pusat pemerintahan. Dukungan kabupaten/kota diperlukan untuk menjaga stabilitas iklim investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mengarahkan pertumbuhan kawasan ekonomi prioritas.

Dalam sektor ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi, kabupaten/kota perlu meningkatkan link and match dengan sektor industri, menyediakan pelatihan berbasis kompetensi, dan memperkuat BLK lokal. Hal ini diperlukan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi di Batam dan Bintan, serta mendukung target provinsi terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya ini termasuk memperkuat kemitraan industri, memperluas program pemagangan, serta meningkatkan akses pendidikan menengah dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri manufaktur, pariwisata, dan jasa. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai dasar pencapaian sasaran pendidikan provinsi.

Pada sektor kesehatan dan layanan dasar, keempat kabupaten/kota memiliki kewajiban memperkuat Puskesmas, meningkatkan cakupan imunisasi, menurunkan prevalensi stunting, serta memastikan layanan kesehatan ibu dan anak terpenuhi. Dukungan kabupaten/kota dalam penurunan stunting sangat penting mengingat wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tantangan gizi perkotaan. Selain itu, peningkatan layanan sanitasi, persampahan, dan air minum menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung target IKLH dan kesehatan lingkungan provinsi. Kota Batam dan Tanjungpinang khususnya perlu mengatasi tantangan urbanisasi pesat yang berdampak pada kualitas lingkungan pemukiman.

Kebutuhan besar juga muncul pada sektor infrastruktur dan konektivitas. Kabupaten/kota di klaster ini harus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, jalan, penataan ruang, dan fasilitas umum yang menjadi prioritas provinsi. Batam-Bintan-Karimun merupakan simpul maritim utama sehingga penguatan pelabuhan, dermaga, konektivitas laut, serta transportasi udara di wilayah ini sangat menentukan efektivitas jaringan logistik Kepri. Koordinasi tata ruang sangat penting untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang antara industri, pariwisata, pemukiman, dan konservasi. Kabupaten/kota harus memastikan dokumen RTRW, RDTR, dan peta tematik siap dan selaras dengan kebijakan provinsi.

Dalam aspek sosial, pemerintahan kabupaten/kota berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, pendataan dan penguatan layanan bagi kelompok rentan. Karena wilayah ini mencakup



pusat-pusat urban dengan dinamika kemiskinan perkotaan, dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan data keluarga miskin, program pemberdayaan ekonomi UMKM, bantuan sosial terintegrasi, dan penyediaan rumah layak huni sangat menentukan keberhasilan target pengurangan kemiskinan provinsi.

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor sekunder-tersier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Untuk itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu diarahkan pada Tenaga Kerja Hijau, baik melalui upskilling maupun reskilling, guna mendukung industri hijau dan transisi energi. Salah satu aspek yang sangat perlu ditekankan dari pengembangan industri di KPBPB adalah meningkatkan industri-industri yang mengolah produk akhir, tidak hanya sampai produk setengah jadi mengingat masih banyaknya aktivitas *industri maklon* (Industri maklon adalah industri pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain), di wilayah klaster ini yang menghambat pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan secara keseluruhan. *Selain itu juga dikembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.*

Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Status KPBPB memang membuat rantai nilai produksi lebih terintegrasi dengan perdagangan luar negeri baik untuk suplai bahan baku maupun pemasaran produk. Namun demikian, peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya spillover effects dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB. Wilayah sekitar melalui IKM dan UMKM dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok, baik dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengolahan, maupun di bidang lain misalnya penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya untuk industri



dan perumahan pekerja. Untuk menjamin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan memicu spillover effects, dibutuhkan pengembangan SDM yang kompeten melalui peningkatan pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) sesuai kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas IKM maupun UMKM di wilayah sekitar KPBPB.

Produktivitas IKM dan UMKM untuk dapat berkontribusi bagi industri pengolahan perlu dimulai dari adanya suplai bahan baku sektor primer yang baik. Sehingga, sektor pertanian arti luas tetap perlu dikembangkan di masa mendatang, misalnya dengan pembentukan sentra perikanan dan sentra pertanian, khususnya sagu di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang perlu diarahkan untuk berkontribusi mengingat adanya modal dasar komoditas perikanan dan pertanian.

Selain sebagai basis industri, klaster ini juga perlu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah beberapa segmen pariwisata. Kota Tanjungpinang perlu mengembangkan destinasi wisata sejarah dan religi khususnya di Pulau Penyengat, dimana perlu didukung oleh ketersediaan produk dari industri halal yang saat ini sedang berkembang misalnya di Kabupaten Bintan dan wisata kuliner yang berkembang di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pariwisata kesehatan juga perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan kedekatan dengan negara tetangga, khususnya juga untuk menangkap peluang pariwisata lansia (*grey tourism*) sebagai dampak dari penuaan populasi global serta mengurangi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri seperti ke Singapura dan Malaysia. Rencana pengembangan ini dapat dimulai dari KEK Pengembangan Kawasan Jasa Kesehatan Sekupang yang rencananya akan dibangun di Batam.

Selain itu, arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan ship-to-ship kapal-kapal internasional. Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan jasa-jasa tersebut agar mampu berdaya saing dibandingkan negara lainnya yang telah memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka.

Tabel 5.2
Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

NO	INDIKATOR	TARGET
		2026
1	Kota Batam	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	210,16-212,87
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,62-4,52
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,37-8,01



NO	INDIKATOR	TARGET
		2026
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,05
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,76
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,14
g.	Indeks Pembangunan Manusia	83,34
2	Kabupaten Bintan	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	212,48
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,10
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,91
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,67
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,30
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47
g.	Indeks Pembangunan Manusia	77,88
3	Kabupaten Karimun	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,73-77,85
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24-4,29
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,55-6,55
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,80
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,95
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49-5,47
g.	Indeks Pembangunan Manusia	75,93
4	Kota Tanjungpinang	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	116,29
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,81
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,23-5,14
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,10
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,94
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,56
g.	Indeks Pembangunan Manusia	82,40

3. Klaster wilayah Lingga

Pencapaian target RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Klaster Lingga memerlukan dukungan kuat dari Pemerintah Kabupaten Lingga, mengingat wilayah ini berperan strategis dalam penyediaan pangan, penguatan sektor perikanan, pelestarian budaya Melayu, dan pemerataan layanan dasar di kawasan kepulauan. Kabupaten Lingga memiliki karakteristik geografis berupa pulau-pulau kecil, keterbatasan akses transportasi, serta populasi yang tersebar, sehingga keberhasilan program provinsi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kabupaten dalam memperluas jangkauan layanan publik hingga



tingkat desa dan dusun. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten Lingga menjadi kunci untuk memastikan capaian prioritas pembangunan dalam RKPD provinsi, khususnya pada sektor ketahanan pangan, konektivitas wilayah, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting.

Pada sektor ekonomi, terutama pertanian pangan dan perikanan, Kabupaten Lingga perlu memperkuat kontribusi melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian, pengembangan sentra produksi, serta pembangunan sarana rantai dingin dan pasar rakyat. Lingga diandalkan sebagai lumbung pangan provinsi, khususnya beras dan sayur-sayuran, sehingga kabupaten perlu memastikan tersedianya irigasi sederhana, alat mesin pertanian (alsintan), penyediaan benih unggul, dan pendampingan petani. Sektor perikanan tangkap dan budidaya juga membutuhkan dukungan dalam bentuk sarana pelabuhan perikanan, sentra pengolahan ikan, serta diversifikasi produk hasil laut. Dukungan kabupaten sangat menentukan pencapaian sasaran RKPD provinsi terkait ketahanan pangan, stabilitas harga, dan pertumbuhan sektor perikanan sebagai bagian dari ekonomi maritim Kepri.

Pada sektor infrastruktur dan konektivitas antarpulau, pemerintah kabupaten Lingga berperan besar dalam membuka akses mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Mengingat biaya logistik di Lingga cenderung tinggi dan akses transportasi masih terbatas, kabupaten perlu mempercepat pembangunan pelabuhan rakyat, dermaga desa, jalan penghubung antarkawasan produksi, serta peningkatan sarana transportasi laut lokal. Upaya ini sangat mendukung RKPD provinsi yang menargetkan peningkatan konektivitas wilayah kepulauan dan pengurangan kesenjangan akses layanan publik. Percepatan penyelesaian dokumen RTRW dan RDTR juga penting untuk mendukung kesesuaian tata ruang provinsi, terutama bagi proyek-proyek strategis seperti pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan.

Dalam sektor pendidikan dan pengembangan SDM, dukungan Kabupaten Lingga sangat krusial dalam meningkatkan kualitas layanan sekolah menengah, mengatasi kekurangan guru di pulau-pulau kecil, memperluas pembelajaran vokasi, serta meningkatkan partisipasi sekolah pada usia SMA/SMK. Kabupaten Lingga perlu bekerja sama dengan provinsi untuk memastikan terpenuhinya sarana pendidikan yang memadai dan keberlanjutan program pendidikan karakter serta budaya Melayu yang menjadi kekhasan Lingga. Hal ini mendukung sasaran peningkatan IPM, literasi, dan pemerataan layanan pendidikan dalam RKPD provinsi.

Di sektor kesehatan dan penanganan stunting, Lingga memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat layanan Puskesmas, memperluas jangkauan Posyandu Prima, meningkatkan cakupan imunisasi, dan menangani balita dengan risiko stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif gizi. Mengingat tantangan



geografis Lingga yang menyebabkan pelayanan kesehatan sulit dijangkau di desa-desa pemukiman kecil, kabupaten perlu mengoptimalkan layanan kesehatan keliling dan transportasi rujukan. Dukungan ini sangat penting untuk pencapaian prioritas provinsi dalam penurunan stunting dan peningkatan status kesehatan masyarakat, sesuai target RKPD dan target nasional RKP 2026.

Dalam bidang sosial, pencapaian target penurunan kemiskinan provinsi sangat bergantung pada kemampuan Kabupaten Lingga dalam melaksanakan pendataan P3KE secara akurat, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran, serta memberdayakan UMKM rumah tangga miskin melalui pelatihan usaha, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran. Kabupaten Lingga juga memerlukan penguatan layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan perempuan, agar selaras dengan target provinsi terkait penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

Di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, Lingga memiliki kawasan pesisir dan hutan mangrove yang luas sehingga kabupaten perlu memperkuat rehabilitasi pesisir, konservasi kawasan mangrove, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Intervensi ini mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi. Selain itu, Lingga penting dalam mendukung provinsi pada penanganan abrasi, penurunan muka tanah, dan adaptasi perubahan iklim di kawasan pesisir.

Pemajuan wilayah Lingga secara umum pada tahap awal perlu dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar termasuk perumahan, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Memasuki era disrupsi digital, penyediaan infrastruktur digital juga menjadi sangat penting terutama bagi wilayah Lingga yang masih memiliki jumlah desa terbanyak dengan jangkauan sinyal rendah diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan beberapa desa belum terjangkau sinyal internet sama sekali.

Setelah akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur terpenuhi, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu diciptakan di wilayah Kabupaten Lingga, mengingat kontribusi PDRB Lingga yang masih sangat kecil terhadap PDRB Kepulauan Riau. Pengembangan sektor ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi keunggulan wilayah Lingga yaitu pengembangan ekonomi biru dan pariwisata alam. Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Lingga dapat dimulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sentra pangan. Hal ini sejalan dengan adanya potensi perkebunan seperti perkebunan lada, pala, kelapa, hilirisasi sagu, serta karet. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga dapat difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kangkung, bayam, durian, mangga, pisang, dan cabai rawit. Selain itu, sektor perikanan juga dapat dikembangkan di Lingga, khususnya perikanan budidaya dan komoditas rumput laut.



Pariwisata juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Lingga, sejalan dengan kayanya keindahan alam terutama pantai dan bawah laut, serta adanya peninggalan sejarah sebagai Bunda Tanah Melayu, yaitu pusat Kerajaan Riau-Lingga di Kecamatan Daik. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi pendorong perekonomian melalui penguatan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), serta dibentuknya paket-paket wisata yang mengintegrasikan antar destinasi pariwisata di wilayah Lingga.

Untuk dapat menjamin berlangsungnya penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi (khususnya SMK) di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, tantangan konektivitas menjadi isu yang perlu segera ditangani. Akses menuju Kabupaten Lingga dari Pulau Batam memerlukan waktu tempuh yang lama dan berbiaya mahal dengan akses utama melalui jalur laut. Kedepannya, dapat dikembangkan opsi-opsi alternatif seperti pesawat apung khususnya untuk menarik minat wisatawan.

Tabel 5.3
Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga

NO	INDIKATOR	Target
		2026
1	Kabupaten Lingga	
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	56,60-57,00
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,77-8,25
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,72
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,77
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,41-3,31
g.	Indeks Pembangunan Manusia	73,48

5.3 Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan di Kabupaten/Kota

Pengarusutamaan pembangunan merupakan kerangka strategis yang harus menjadi acuan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan tahunan. Pengarusutamaan ini memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengintegrasikan isu-isu lintas sektor ini dalam setiap tahapan perencanaan mulai dari perumusan masalah, penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan program dan kegiatan, hingga evaluasi kinerja pembangunan.



1. Pemerintah daerah perlu mengarusutamakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Ketahanan Iklim. Hal ini meliputi pengendalian emisi sektor energi dan transportasi, peningkatan ruang terbuka hijau, rehabilitasi mangrove dan DAS, pengurangan sampah dan limbah, serta perlindungan keanekaragaman hayati lokal. Pembangunan harus diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko iklim, sesuai dengan mandat nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan wilayah.
2. Pemerintah kabupaten/kota harus mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Integrasi PRB perlu masuk ke dalam tata ruang, perizinan pembangunan, penyediaan infrastruktur publik, penataan permukiman, serta mekanisme kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap investasi publik memperhatikan aspek keselamatan, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap ancaman iklim yang semakin meningkat.
3. Pemerintah kabupaten/kota harus mengarusutamakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Adaptif menjadi prioritas nasional yang harus diterjemahkan ke dalam program daerah. Pemerintah kabupaten/kota perlu menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), memperbaiki targeting bansos, memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan. Selain itu, kolaborasi lintas OPD perlu diperkuat untuk memastikan program pengurangan kemiskinan berjalan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).
4. Pemerintah kabupaten/kota wajib mengarusutamakan Peningkatan Kualitas SDM dan Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini mencakup intervensi spesifik dan sensitif gizi, peningkatan cakupan layanan dasar (kesehatan ibu-anak, imunisasi, PAUD, pendidikan menengah), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan guru yang merata, termasuk pada wilayah pinggiran atau pulau kecil.
5. Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Inklusi Sosial perlu menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan daerah. Pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa layanan publik, akses ekonomi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan dapat diakses oleh perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya. Pengarusutamaan ini juga mencakup penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan kualitas data terpilah, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
6. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengarusutamakan Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh



layanan publik harus diarahkan menuju digitalisasi yang terintegrasi, efektif, dan mudah diakses, termasuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan pengaduan masyarakat. Penguatan SPBE menjadi dasar peningkatan kinerja birokrasi, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik.

7. Pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Hal ini mencakup dukungan terhadap produksi pangan lokal, penguatan rantai pasok, stabilisasi harga, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Penguatan ekonomi daerah—baik berbasis pertanian, perikanan, industri kreatif, maupun pariwisata—perlu diarahkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi kabupaten/kota.
8. Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan pengarusutamaan Budaya, Moderasi Beragama, dan Penguatan Karakter Bangsa ke dalam pembangunan pendidikan dan sosial. Pemerintah daerah harus memastikan pelestarian budaya lokal, pengembangan ekosistem kreatif, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dalam masyarakat.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Kerangka Pendanaan

Penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun 2026 tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga APBN, CSR, dan Perusahaan Daerah. Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	TARGET TAHUN
		2026
2	BELANJA	3.967.074.441.227,00
	A. Belanja Operasi	2.843.246.359.764,00
	B. Belanja Modal	582.076.132.160,00
	C. Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00
	D. Belanja Transfer	526.751.949.303,00
	JUMLAH BELANJA	3.967.074.441.227,00

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan memperhatikan prioritas pemerintah pusat dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan melalui mekanisme forum Musrenbang, namun karena keterbatasan anggaran tidak semua rencana program/kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang tidak dapat diakomodir dalam dokumen RKPD. Oleh karena itu, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang dapat dianggarkan.

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Pengelolaan Pendidikan Khusus
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.3
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KESEHATAN	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.4
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.5

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.6

Program dan Kegiatan Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.7
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS SOSIAL	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7. Tenaga kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.8
Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi - Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.9
Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	• Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	• Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

9. Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pangan, pertanian, dan Kesehatan hewan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.10
Program dan Kegiatan Urusan Pangan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.11
Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

Kode	Program	Kegiatan
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	• Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi • Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	• Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

11. Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.12
Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.13
Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Kegiatan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14
Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	• Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.15

Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program	Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	• Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	• Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



15. Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.16
Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional



Kode	Program	Kegiatan
		- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

16. Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.17
Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.18

Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

18. Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.19

Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Kode	Program	Kegiatan
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

19. Kepemudaan dan olah raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.20
Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

20. Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Statistik yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.21
Program dan Kegiatan Urusan Statistik

Kode	Program	Kegiatan
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

21. Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.22
Program dan Kegiatan Urusan Persandian

Kode	Program	Kegiatan
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

22. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.23
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KEBUDAYAAN	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi

23. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.24
Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi • Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	• Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi • Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah • Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

24. Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.25
Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan

Kode	Program	Kegiatan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	• Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi • Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi • Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota • Pengawasan kearsipan di provinsi
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	• Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun • Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

25. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:



Tabel 6.26
Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	• Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	• Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil • Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT • Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	• Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

26. Pariwisata

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.27
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PARIWISATA	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

27. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.28
Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

Kode	Program	Kegiatan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi • Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
		- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Penataan Prasarana Pertanian - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Kesejahteraan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

28. Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kehutanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.29
Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan

Kode	Program	Kegiatan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun



Kode	Program	Kegiatan
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.30
Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan



Kode	Program	Kegiatan
		Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	• Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi • Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri • Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

30. Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.31
Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan

Kode	Program	Kegiatan
	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) - Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota



Kode	Program	Kegiatan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	• Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

31. Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.32
Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian

Kode	Program	Kegiatan
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

32. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.33
Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi

Kode	Program	Kegiatan
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

33. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.34

Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Daerah

Kode	Program	Kegiatan
	SEKRETARIS DAERAH	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	• Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah • Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	• Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	• Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	• Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

34. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.35
Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

Kode	Program	Kegiatan
	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	• Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD • Pembahasan Kebijakan Anggaran • Peningkatan Kapasitas DPRD • Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • Fasilitasi Tugas DPRD

35. Unsur Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.36
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Program	Kegiatan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

36. Keuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.37
Program, Indikator Unsur Penunjang Keuangan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

37. Unsur Penunjang Kepegawaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Mutasi dan Promosi ASN - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

38. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.39

Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	• Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

39. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.40

Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program	Kegiatan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

40. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.41

Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

41. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengelolaan penghubung yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.42

Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	• Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

42. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengawasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.43
Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Pengawasan

Kode	Program	Kegiatan
	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi

43. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.44
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program	Kegiatan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kode	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja dan target kinerja indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.45
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,46	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (%)	100	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (%)	100	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (%)	88,94	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB (%)	0,012	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	36	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Konten Pendidikan (%)	25	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa (Nilai)	65,46	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa (Nilai)	61,87	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	10,42	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)	628,49	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (%)	100	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,60	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,85	1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	98,65	1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	93	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	10	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	5,9	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	55	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,33	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	7	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	15	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	91	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	98,90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,99	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	1	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	89	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib (Peringkat)	Utama	1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)	Satelit	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	89	1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,28	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	85	1.02.0.00.0.00.02.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)	60	1.02.0.00.0.00.02.0002 - Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	90	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)	14,29	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota dengan Kader	14,29	1.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Posyandu Madya minimal 10% (%)		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	85,38	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,80	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,80	1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0,113	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air irigasi untuk	24,49	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)		Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	79,70	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	51,8	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	8,92	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	21,43	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	37,04	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas	27,27	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Daerah Kabupaten/Kota (%)		
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	82,18	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	7,4	1.03.2.10.0.00.03.0002 - UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	8	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	79,50	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,00	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 â€“ 15 Ha yang ditangani (%)	5,50	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	100	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	53,25	1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,71	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	79,19	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	88	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	2,71	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase SDM aparatur satpol PP	71,36	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	yang ditingkatkan kompetensinya (%)		dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%)	100	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	74,36	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)	2,72	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,29	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,55	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Meningkatnya Pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	28,57	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (01)	INDIKATOR OUTCOME (02)	TARGET (3)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (4)
pemerintahan bidang sosial			
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,30	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,43	1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1,57	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	2,38	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	0,40	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	0,01	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	11,11	1.06.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	79,19	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,45	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,57	2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,45	2.07.3.32.0.00.07.0002 - UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,45	2.07.3.32.0.00.07.0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (%)	50	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	71,79	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	71,79	2.07.3.32.0.00.07.0002 - UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	79,45	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ((%))	73,96	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	47,95	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Meningkatnya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	54	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
Terlindunginya hak-hak pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	52,28	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	15,80	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50	2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	52,28	2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	15,80	2.07.3.32.0.00.07.0001 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	52,28	2.07.3.32.0.00.07.0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (%)	77,50	2.07.3.32.0.00.07.0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (%)	15,80	2.07.3.32.0.00.07.0003 - UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	77,15	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	76,80	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,25	2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	13,03	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54,48	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	43,33	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	96	2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	72,44	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan (%)	55,81	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	85,71	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	5,91	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	96	2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	83,19	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	90,1	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	≤10	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	84	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum (%)	45	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			1.03.2.10.0.00.03.0001 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (%)	0	1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,43	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,45	2.11.3.28.0.00.10.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	5,03	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	53,33	2.11.3.28.0.00.10.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	0,505	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (%)	53,57	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi	32,93	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
lingkungan yang diterbitkan	lingkungan kepada unit usaha (%)		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup (%)	6,64	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	59,57	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)	12,20	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (%)	15,90	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	85,75	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	99,77	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KTP-el (%)	63	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi (%)	38,64	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun (%)	100	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,95	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	90	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar (Desa)	15	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya (%)	52,36	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	47,39	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina (%)	11,14	2.12.2.13.0.00.11.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	69,50	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	10,50	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,25	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82,69	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	58,40	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	68	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	34,61	2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	81,50	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,53	2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan (%)	62,84	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	52,50	2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	84,62	2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	76	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi	Indeks Komunikasi Pembangunan dan	72	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
publik pemerintah daerah	Informasi Publik (Indeks)		
	Nilai Keterbukaan informasi Publik (Nilai)	70	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	6,85	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	81,26	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,32	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	18,88	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	5,82	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (%)	9,16	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	30,50	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	39,89	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,60	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	15,15	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	35,19	2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	86,36	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (01)	INDIKATOR OUTCOME (02)	TARGET (3)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	4,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	16	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	16	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP (%)	16	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	16	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dokumen)	16	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	77	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	1,89	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi (%)	0,23	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional (%)	0,76	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	7,98	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan (%)	18,97	2.19.0.00.0.00.16.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,80	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	46	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86,5	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,3	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	28,09	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	1,73	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	7,66	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (%)	0,18	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah (%)	13,33	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/ sederajat tentang sejarah lokal ()	0,59	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	8,33	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	49,31	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar	17,34	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	budaya yang telah Ditetapkan (%)		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun (%)	13,03	2.22.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	78,31	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,35	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,25	2.23.2.24.0.00.18.0001 - UPT Perpustakaan Muhammad Sani
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	75,69	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan (Orang)	50.800	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam (Orang)	4.154	2.23.2.24.0.00.18.0001 - UPT Perpustakaan Muhammad Sani



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	14	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009) (%)	26,32	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	19,17	2.23.2.24.0.00.18.0000 - Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	80,53	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,83	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0006 - UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0007 - UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0008 - UPTD Balai Benih Ikan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	3.25.0.00.0.00.19.0009 - UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL			
Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	92	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0009 - UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316230,66	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,67	3.25.0.00.0.00.19.0006 - UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	3.25.0.00.0.00.19.0008 - UPTD Balai Benih Ikan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Meningkatnya kepatuhan, kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0001 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0002 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0003 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0004 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	90	3.25.0.00.0.00.19.0005 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,37	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.500	3.25.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.500	3.25.0.00.0.00.19.0007 - UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,58	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,95	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,95	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,70	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	2.722,6	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.512.500	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	6,54	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	11,61	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	19.960,1	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	28.628,71	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	30.614,18	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Ternak (Ton)	19.247,61	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			2.09.3.27.0.00.09.0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	82	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	65	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			2.09.3.27.0.00.09.0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	435	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (%)	746	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	54	2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0002 - UPTD KPHP Unit I Karimun



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0003 - UPTD KPHP Unit II Batam
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0004 - UPTD KPHP Unit III Lingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0005 - UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,44	2.11.3.28.0.00.10.0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,43	2.11.3.28.0.00.10.0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	100	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	24,00	2.11.3.28.0.00.10.0002 - UPTD KPHP Unit I Karimun
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	21,67	2.11.3.28.0.00.10.0003 - UPTD KPHP Unit II Batam
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	14,98	2.11.3.28.0.00.10.0004 - UPTD KPHP Unit III Lingga
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	21,80	2.11.3.28.0.00.10.0005 - UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	18,89	2.11.3.28.0.00.10.0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	28,60	2.11.3.28.0.00.10.0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik (%)	100	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	1,185	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik (%)	2,56	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	87,5	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,65	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN			
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (%)	27,27	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (%)	59	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	16,5	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	135,4	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	99,20	3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	86,85	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,93	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	100	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri (%)	2,11	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)	5,63	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Fasilitas Pengembangan Ekspor (%)	100	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Tertib Niaga (Indeks)	61-80	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi (%)	35	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	7	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	2,92	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Fasilitas Izin Usaha Industri yang diterbitkan (%)	0,85	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif (Dokumen)	1	3.30.3.31.0.00.21.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (%)	33,3	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (%)	45,9	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg	31,25	2.07.3.32.0.00.07.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
dalam pengembangan kawasan transmigrasi	mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (%)		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0006 - Biro Umum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/ Jasa
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/ Jasa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/ Jasa
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	73	4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,15	4.01.2.21.2.20.22.0007 - Biro Administrasi Pimpinan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General (Skor)	2,17	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi (Indeks)	40,4	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan (Persentase)	83,72	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP (Nilai)	11,90	4.01.2.21.2.20.22.0003 - Biro Organisasi
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor LPPD (Skor)	2,55	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	85	4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	91	4.01.2.21.2.20.22.0004 - Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)	96	4.01.2.21.2.20.22.0001 - Biro Hukum
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan (Persentase)	100	4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)	Sangat Baik	4.01.2.21.2.20.22.0008 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan (Persentase)	100	4.01.2.21.2.20.22.0005 - Biro Perekonomian dan Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD			
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	83,05	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	100	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	4.02.0.00.0.00.22.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,00	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	78,98	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Program RPJMD (Predikat)	ST	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	80	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD (%)	73,47	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko (%)	14,29	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat	80,95	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)		
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Nilai)	46,94	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	77,11	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	58,82	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian	47,83	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	dan Sumber Daya Alam (Nilai)		
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	18,64	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	20	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)	46	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	52	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN			
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,31	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,25	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,25	5.02.0.00.0.00.25.0001 - UPT Dana Bergulir
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,25	5.02.0.00.0.00.25.0002 - UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (%)	12,83	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	76,15	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,29	5.02.0.00.0.00.26.0001 - UPT PPD Batam Centre
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,32	5.02.0.00.0.00.26.0002 - UPT PPD Tanjungpinang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,47	5.02.0.00.0.00.26.0003 - UPT PPD Bintan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,08	5.02.0.00.0.00.26.0004 - UPT PPD Karimun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,3	5.02.0.00.0.00.26.0005 - UPT PPD Lingga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,18	5.02.0.00.0.00.26.0006 - UPT PPD Natuna
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,82	5.02.0.00.0.00.26.0007 - UPT PPD Anambas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,35	5.02.0.00.0.00.26.0008 - UPT PPD Batu Aji
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	94,22	5.02.0.00.0.00.26.0009 - UPT PPD Kijang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,05	5.02.0.00.0.00.26.0010 - UPT PPD Tanjung Batu
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu (%)	100	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu (%)	100	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	91,96	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	5.02.0.00.0.00.25.0001 - UPT Dana Bergulir



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan (%)	92,00	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-3,41	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital (%)	35	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih (%)	27	5.02.0.00.0.00.26.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-2,41	5.02.0.00.0.00.26.0001 - UPT PPD Batam Centre
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-0,25	5.02.0.00.0.00.26.0002 - UPT PPD Tanjungpinang
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-1,83	5.02.0.00.0.00.26.0003 - UPT PPD Bintan
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-0,41	5.02.0.00.0.00.26.0004 - UPT PPD Karimun
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	0,38	5.02.0.00.0.00.26.0005 - UPT PPD Lingga
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-0,26	5.02.0.00.0.00.26.0006 - UPT PPD Natuna



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	-3,09	5.02.0.00.0.00.26.0007 - UPT PPD Anambas
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	3,89	5.02.0.00.0.00.26.0008 - UPT PPD Batu Aji
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	4,52	5.02.0.00.0.00.26.0009 - UPT PPD Kijang
	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)	4,63	5.02.0.00.0.00.26.0010 - UPT PPD Tanjung Batu
5.03 - KEPEGAWAIAN			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	80,98	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,77	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,57	5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,17	5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit (Nilai)	38,50	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit (Nilai)	24,00	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	98,59	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase ASN yang tidak menjalani	99,65	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (01)	INDIKATOR OUTCOME (02)	TARGET (3)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (4)
	hukuman disiplin sedang dan berat (%)		
	Persentase ASN yang dibina Karirnya (%)	5,28	5.03.0.00.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan KORPRI
	Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural (%)	18,90	5.03.0.00.0.00.27.0001 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	85,68	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91,12	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	40,72	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	49,57	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	23,75	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	37,82	5.04.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan (%)	80	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Inovasi yang dilaporkan (%)	75	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan (Karya)	20	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan (%)	100	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN			
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	81,5	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	50	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	42,55	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	34,48	5.06.0.00.0.00.27.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	64,92	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	100	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	100	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	100	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	85,76	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	88,24	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	100	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	100	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	100	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	1	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	5	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	12	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	34	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,56	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	84,85	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi	0,002	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(3)	(4)
	Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	38,89	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan (%)	85	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						1.040.204.570.718,83							720.952.912.497,19	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.040.204.570.718,83							720.952.912.497,19	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.040.204.570.718,83							720.952.912.497,19	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						654.462.896.733,83						91,5 %	650.275.589.510,99	
		[Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.45 80.48 90	- 76,1 85	76.20 80.46 86	76.25 80.46 87	654.462.896.733,83	-	-	-	-	-	-	650.275.589.510,99	-
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			7 Dokumen	225.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan	-	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas	-			1 Laporan 100 %	640.427.718.097,83			Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan	-	641.388.286.980,99	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4683 Orang/ Bulan	636.364.790.097,83	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		637.325.358.980,99	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3.962.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		3.962.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan	-			3 Laporan	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan Jumlah penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pendidikan	-			4 Laporan 10 Orang 1 Paket	400.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Lapoaran Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Arsip Dinamis Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani	-			6 Paket 22 Paket 4 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	525.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan	-	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			2 Unit 4 Unit 1 Unit	600.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan	-	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	4.026.000.000,00			-	-	Dinas Pendidikan	-	4.826.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	3.276.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		3.276.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			2 Unit 15 Unit	686.302.530,00			-	-	Dinas Pendidikan	-	886.302.530,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	486.302.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		486.302.530,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan	-			5 Unit Kerja	7.272.876.106,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				5 Unit Kerja	7.272.876.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						384.691.673.985,00						100 % 96,27 % 100 % 0,36 % 87 % 80 % 99 % 33,85 Ratio	69.777.322.986,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah]	Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB Persentase Konten Pendidikan Rasio peserta didik per kelas Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	0,008 100 36 45 65,99 66,38 90.94	0 0,014 108,45 117,98 26,55 59,81 64,32 87,94	0,013 100 20 36 60,84 65,23 88.44	0,012 100 25 36 61,87 65,46 88.94	384.691.673.985,00	-	-	-	-	-	-	69.777.322.986,20	-
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA Iklim Inklusivitas SMA Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Persentase Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan Persentase SMAN yang Terakreditasi Minimum B Skor Kemampuan Literasi SMA Skor Kemampuan Numerasi SMA	-			0,011 % 64.33 Skor 84.25 Skor 74.77 Skor 39,85 % 84,00 % 77,76 Skor 69,31 Skor	197.390.047.747,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	-	30.096.322.986,20	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	2.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				23813 Paket	7.143.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		5.935.494.986,20	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	445.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		445.976.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5495 Peserta didik	7.213.851.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		7.213.851.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				865 Orang	49.409.981.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		2.076.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				93 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				93 Satuan Pendidikan	117.071.398.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2.470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				93 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanan SMK Iklim Kebinekaan SMK Persentase Angka Putus Sekolah SMK Persentase SMK Negeri yang menjadi BLUD Persentase SMKN yang Terakreditasi Minimum B Skor Kemampuan Literasi SMK Skor Kemampuan Numerasi SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</i>	-			64,23 Skor 72,31 Skor 72,47 Skor 0,016 % 35 % 85,5 % 78,17 Skor 67 Skor 80,08 % 86 %	161.089.937.592,00			-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	-	27.786.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				2 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			<i>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	1.030.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				16713 Paket	5.014.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		4.375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	18.000.028.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5480 Peserta didik	7.662.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		7.662.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				864 Orang	31.144.819.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		2.073.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				37 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				37 Satuan Pendidikan	79.463.468.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				37 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Iklim Keamanan SDLB Iklim Keamanan SMALB Iklim Keamanan SMPLB Iklim Kebinekaan SDLB Iklim Kebinekaan SMALB Iklim Kebinekaan SMPLB Inklusivitas SDLB Inklusivitas SMALB Inklusivitas SMPLB Skor Kemampuan Literasi SDLB Skor Kemampuan Literasi SMALB Skor Kemampuan Literasi SMPLB Skor Kemampuan Numerasi SDLB Skor Kemampuan Numerasi SMALB Skor Kemampuan Numerasi SMPLB SLB yang Terakreditasi Minimum B</i>	-			77,90 Skor 73 Skor 74,3 Skor 72,2 Skor 81 Skor 74 Skor 69,3 Skor 63,58 Skor 73,7 Skor 55 Skor 56,73 Skor 62,97 Skor 53,81 Skor 59,53 Skor 61,31 Skor 68 %	26.211.688.646,00			-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	-	11.894.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				298 Paket	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				350 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				102 Orang	4.639.444.223,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		244.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				10 Satuan Pendidikan	9.822.244.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						650.000.000,00						60,42 %	500.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	24.31	0	6.94	10.42	650.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah	3 Dokumen 3 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00			-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	1 Dokumen 1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	22000 Buku			2000 Buku	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	2000 Buku	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	550 Orang			100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	50 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus	3 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00			-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				1000 Buku	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						300.000.000,00						639,67 Rasio	300.000.000,00	
		[Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	628,90	627,38	627,99	628,49	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri	-			2 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						100.000.000,00						100 %	100.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	-			2 Sekolah	50.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	-			2 Sekolah	50.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						2.445.000.000,00							2.445.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.445.000.000,00							2.445.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.445.000.000,00							2.445.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.345.000.000,00						70 Indeks	1.345.000.000,00	
		[Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan]	-	-	-	-	-	1.345.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.345.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP	-	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggunaan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi	-			7 paket 32 Paket 1 Laporan 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur BTIKP	-	575.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTKP		75.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Jumlah Gedung Dan Bangunan Jumlah Peralatan Mesin Kantor	-			2 Unit 1 Unit 2 Unit	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP	-	300.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	-			12 Bulan	270.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP	-	270.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		20.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		50.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP	-	100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur BTIKP		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.100.000.000,00						25 %	1.100.000.000,00	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Konten Pendidikan Menengah Atas yang disiarkan	-			15 %	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan	-	400.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Konten Pendidikan Menengah Kejuruan yang disiarkan	-			10 %	400.000.000,00			-	-	Satuan Pendidikan	-	400.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan TIK	-			51 Orang	300.000.000,00			-	-	Satuan Pendidikan	-	300.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM						5.200.000.000,00							11.800.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.200.000.000,00							11.800.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.200.000.000,00							11.800.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.250.000.000,00						70 Indeks	1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan]	-	-	-	-	-	1.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.250.000.000,00	-
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan	-			1 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	-	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan	-			1 Paket 4 Paket 1 Laporan 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	-	575.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			1 Unit 1 Unit 2 Unit	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	-	225.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	-	300.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	-	100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						3.950.000.000,00						100 %	10.550.000.000,00	
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-	-	-	-	-	3.950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.550.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA Di Batam	-			0,011 %	1.350.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan	-	4.400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		600.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		1.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		300.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah Menengah Kejuruan Di Batam	-			0,020 %	1.350.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan	-	3.350.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		2.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Putus Sekolah Pendidikan Khusus Di Batam	-			1,111 %	1.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan	-	2.800.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
		-	-	-	-	-	-	3.950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.550.000.000,00	-
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	-	-	-	-	-	3.950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.550.000.000,00	-
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		1.200.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						891.862.000,00							891.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						891.862.000,00						70 Indeks	891.862.000,00	
		[Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan]	-	-	-	-	-	891.862.000,00	-	-	-	-	-	-	891.862.000,00	-
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan	-			1 Laporan	13.272.000,00			Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun	-	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan dan Penggunaan yang tersedia Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan	-			1 Paket 4 Unit/Barang 1 Laporan 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun	-	575.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			1 Paket 1 Unit 2 Unit	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun	-	225.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	28.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun	-	28.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun	-	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Karimun		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						891.862.000,00							891.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						891.862.000,00						70 Indeks	891.862.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan	-			1 Laporan	13.272.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga	-	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani	-			1 Paket 4 Unit/Barang 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga	-	575.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			1 Paket 1 Unit 2 Unit	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga	-	225.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	28.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga	-	28.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga	-	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Lingga		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						891.862.000,00							891.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						891.862.000,00						70 Indeks	891.862.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan	-			1 Laporan	13.272.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna	-	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan	-			1 Paket 4 Unit/Barang 1 Laporan 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna	-	575.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			1 Paket 1 Unit 2 Unit	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna	-	225.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	28.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna	-	28.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna	-	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Natuna		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						891.862.000,00							891.862.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						891.862.000,00							891.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						891.862.000,00						70 Indeks	891.862.000,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan	-			1 Unit	13.272.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas	-	13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		13.272.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan	-			1 Paket 4 Unit/Barang 1 Laporan 1 Laporan	575.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas	-	575.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		150.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-			1 Paket 1 Unit 2 Unit	225.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas	-	225.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		75.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		100.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	-			12 Bulan	28.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas	-	28.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		11.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		2.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		15.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas	-	50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Aparatus Cabang Dinas Pendidikan Kab.Kep,Anambas		50.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS
		DINAS KESEHATAN						126.195.804.296,03							94.285.536.883,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						126.195.804.296,03							94.285.536.883,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						126.195.804.296,03							94.285.536.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						31.940.287.380,03						-	31.579.669.842,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Indeks kepuasan masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud Indeks kepuasan masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks kepuasan masyarakat UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	85 90 92.20 93 95 BB	75 82 83 91.14 91.23 BB	80 83 85 91.40 91.50 BB	80 84 87 91.60 91.85 BB	31.940.287.380,03	-	-	-	-	-	-	31.579.669.842,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	379.000.000,00			-	-	-	-	387.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	187.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	25.782.765.039,03			-	-	-	-	26.802.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				158 Orang/ Bulan	24.738.205.039,03	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	904.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		902.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	236.000.000,00			-	-	-	-	236.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	570.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.110.500.300,00			-	-	-	-	1.064.550.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	570.500.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		627.550.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.100.000.000,00			-	-	-	-	644.678.522,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.678.522,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	475.895.676,00			-	-	-	-	1.490.440.990,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	175.895.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.242.440.990,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.286.126.365,00			-	-	-	-	845.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	306.126.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						84.530.118.798,00						-	55.900.502.581,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	0.32	0	0	0.33	84.530.118.798,00	-	-	-	-	-	-	55.900.502.581,00	-
				100	0.34	0.33	1									
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	1.99	100	100	10									
				25	11.8	11	100									
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	3	1.98	12	15									
				5.1	53.79	1.98	1.99									
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	6.5	6	55	55									
				65	6.3	6	5.9									
			Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	7	7.4	6.1	7									
				90	88.84	88.90	89									
			Hipertensi dalam pengendalian	95	89.26	90	91									
				98	92	92.50	93									
			Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	99.50	95	97	98									
				Utama	96	98	98.90									
			Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		Satelit	Satelit	Satelit									
					Utama	Utama	Utama									
			Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria													
			Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)													
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Puskesmas terakreditasi Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib													
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	36.613.910.822,00			-	-	-	-	12.871.553.143,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	3.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	8.113.077.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				7 Layanan	1.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	496.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.571.143,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	7.276.448.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		318.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		323.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				163 Unit	8.514.543.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				2 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				6 Unit	188.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		197.982.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center														
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun				1 Unit	3.184.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.221.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	45.491.207.976,00			-	-	-	-	41.543.949.438,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				400 Orang	525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		523.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				7 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.986.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19 Dokumen	3.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				55 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	32.553.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.611.938,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		203.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	153.207.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		148.837.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	850.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				15 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.575.000.000,00			-	-	-	-	985.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				36 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				36 Unit	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						8.034.740.882,00						-	5.714.536.753,00	
		[Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan]	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	4.30 50 93	40 4.27 80	42 4.28 80	4.28 44 85	8.034.740.882,00	-	-	-	-	-	-	5.714.536.753,00	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	7.249.740.882,00			-	-	-	-	5.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				78 Orang	7.035.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				260 Orang	214.740.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	785.000.000,00			-	-	-	-	364.536.753,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				110 Orang	535.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.536.753,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						190.757.236,00						-	261.656.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman]	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	94	88	89	90	190.757.236,00	-	-	-	-	-	-	261.656.548,00	-
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				25 Sarana	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	80.757.236,00			-	-	-	-	101.656.548,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				2 Sarana	80.757.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		101.656.548,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.499.900.000,00						-	829.171.159,00	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	57.14	0	14.29	14.29	1.499.900.000,00	-	-	-	-	-	-	829.171.159,00	-
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	849.900.000,00			-	-	-	-	321.171.159,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				7 Dokumen	849.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		321.171.159,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	353.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				7 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				7 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		128.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				7 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB						283.205.648.934,78							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						283.205.648.934,78							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						283.205.648.934,78							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						262.034.001.994,16						-	0,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan]	-	-	-	-	-	262.034.001.994,16	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	112.618.756.153,45			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				788 Orang/ Bulan	111.891.270.891,45	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	727.485.262,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				61 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.414.095.840,71			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	414.095.840,71	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	144.001.150.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	144.001.150.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						19.900.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]	-	-	-	-	-	19.900.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	19.900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	2.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	2.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	15.900.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.271.646.940,62						-	0,00	
		[Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan]	-	-	-	-	-	1.271.646.940,62	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	1.271.646.940,62			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				165 Orang	1.271.646.940,62	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				80 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
		RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD						108.148.450.027,32							121.236.914.035,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108.148.450.027,32							121.236.914.035,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						108.148.450.027,32							121.236.914.035,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						90.393.115.849,32						-	88.676.167.732,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan]	-	-	-	-	-	90.393.115.849,32	-	-	-	-	-	-	88.676.167.732,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	390.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	58.678.923.849,32			-	-	-	-	53.260.020.970,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				223 Orang/ Bulan	57.795.059.849,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.386.156.970,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	798.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		798.864.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		375.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.466.314.444,00			-	-	-	-	1.129.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	154.654.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	81.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Teluk Lobam	-	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.916.510.236,00			-	-	-	-	3.357.396.762,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.916.510.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.957.396.762,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.400.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.216.367.320,00			-	-	-	-	4.221.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				23 Unit	96.367.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		141.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				80 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		620.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		770.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		770.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	24.675.000.000,00			-	-	-	-	25.908.750.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	24.675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.908.750.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.310.000.000,00						-	29.478.289.703,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]	-	-	-	-	-	15.310.000.000,00	-	-	-	-	-	-	29.478.289.703,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	14.700.000.000,00			-	-	-	-	26.928.289.703,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.928.289.703,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	3.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.900.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Busung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				80 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	10.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	1.900.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.445.334.178,00						-	3.082.456.600,00	
		[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan]	-	-	-	-	-	2.445.334.178,00	-	-	-	-	-	-	3.082.456.600,00	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	2.045.334.178,00			-	-	-	-	2.082.456.600,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	2.045.334.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.082.456.600,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				161 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
		UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)						2.558.842.000,00							5.868.224.283,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.558.842.000,00							5.868.224.283,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.558.842.000,00							5.868.224.283,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.427.899.483,00						-	1.663.249.509,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan]	-	-	-	-	-	1.427.899.483,00	-	-	-	-	-	-	1.663.249.509,00	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	117.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	28.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.000.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	106.899.483,00			-	-	-	-	550.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	106.899.483,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	848.000.000,00			-	-	-	-	622.249.509,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	401.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		416.300.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	447.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		205.949.509,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.050.942.517,00						-	4.054.082.500,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	90%	88.84%	88.90%	89%	1.050.942.517,00	-	-	-	-	-	-	4.054.082.500,00	-
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	900.942.517,00			-	-	-	-	3.879.082.500,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	115.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	83.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.872.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	701.700.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		766.635.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.848.575.500,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						80.000.000,00						-	150.892.274,00	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	-	-	-	-	-	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.892.274,00	-
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	150.892.274,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.892.274,00	UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN						339.681.197.661,85							205.900.376.998,58	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.465.665.965,33							185.213.245.860,58	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						309.465.665.965,33							185.213.245.860,58	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						4.561.393.965,33						-	9.903.476.080,55	
		[Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel]	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah SAKIP Daerah	88.64 BB	84.53 BB	84.53 BB	85.38 BB	4.561.393.965,33	-	-	-	-	-	-	9.903.476.080,55	-
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	320.000.000,00			-	-	-	-	392.725.234,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.580.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.144.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.505.400.000,00			-	-	-	-	2.022.760.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.425.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.939.616.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.144.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	11.952.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.952.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	170.695.238,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.650.238,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.045.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.060.000.000,00			-	-	-	-	1.714.178.531,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.852.626,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.223.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.153.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		127.982.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.271.251,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		169.968.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		943.727.354,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	105.000.000,00			-	-	-	-	380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	855.993.965,33			-	-	-	-	4.311.164.137,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.454.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		779.416.083,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	135.993.965,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.510.293.854,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	590.000.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						4.870.000.000,00						75 Ha 58,99 % 25,49 %	11.112.545.290,90	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0.203 36.21 90.37	0.098 10.26 60.76	0.103 10.26 76.84	0.113 24.49 79.70	4.870.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.112.545.290,90	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.870.000.000,00			-	-	-	-	10.456.272.645,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.606.272.645,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				1 KM	2.890.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai														
			Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai														
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun				1.5 KM	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung														
			Jumlah Embung yang dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung														
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	656.272.645,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.272.645,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.100.000.000,00						-	7.600.000.000,00	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan minum]	57.6	33.51	50.35	51.8	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.600.000.000,00	-
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	1.100.000.000,00			-	-	-	-	7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				0 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				0.1 Liter/Detik	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan</i>				0 Liter/Detik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						300.000.000,00						90,51 %	510.000.000,00	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	13.56	6.60	7.76	8.92	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000.000,00	-
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				0 M³/Hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 kabupaten/kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				7 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.130.000.000,00						-	500.000.000,00	
		[Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	21.4	0	0	21.43	1.130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	1.130.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						120.950.000.000,00						-	33.180.000.000,00	
		[Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi]	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14	100	10.53	21.05	120.950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	33.180.000.000,00	-
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	120.950.000.000,00			-	-	-	-	33.180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara														
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				0 Rumah Negara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				0 Bangunan Gedung Negara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				0 Bangunan Gedung	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				0 Kabupaten/ Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				3 Dokumen	55.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				9 Bangunan Gedung	65.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						57.500.000.000,00						-	14.030.000.000,00	
		[Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.04	100	17.39	17.39	57.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	14.030.000.000,00	-
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.500.000.000,00			-	-	-	-	14.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0014	Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				0 kabupaten/ kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				5 Kawasan	57.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						117.654.272.000,00						-	105.712.061.409,13	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Persentase Jalan Kondisi Mantap	81.41	80.87	81.10	81.05	117.654.272.000,00	-	-	-	-	-	-	105.712.061.409,13	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	117.654.272.000,00			-	-	-	-	105.712.061.409,13	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4.7 KM	77.038.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.002.079.490,13	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				- KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PASLI DAERAH DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				13 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.999.518.958,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				620.76 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				- Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				4.84 KM	6.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.416.805.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				10000 Meter	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				15.77 Meter	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.731.872.395,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				3542 Meter	14.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.532.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0055	Pembangunan Flyover														
			Panjang Flyover yang Dibangun				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala				0.15 KM	2.315.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.308.535.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.55 KM	11.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.220.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						700.000.000,00						-	1.115.163.080,00	
		[Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional]	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	8	6.4	8	8	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.115.163.080,00	-
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	721.308.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				15 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.708.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				90 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				90 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	193.854.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.854.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				0 Bangunan Konstruksi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				0 Badan Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						700.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
		[Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang]	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	80	66.63	70	70	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.550.000.000,00	-
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi														
			Jumlah Perda RTRW Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	320.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0 Kasus	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal														
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.100.000.000,00							700.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.100.000.000,00							700.000.000,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						1.100.000.000,00						-	500.000.000,00	
		[Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum]	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	20	100	20	20	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	1.100.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						0,00						-	200.000.000,00	
		[Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi]	Persentase Fasilitas Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau	20	0	0	20	0,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X	NON URUSAN						29.115.531.696,52							19.987.131.138,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.115.531.696,52							19.987.131.138,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.115.531.696,52						-	19.987.131.138,00	
		-	-	-	-	-	-	29.115.531.696,52	-	-	-	-	-	-	19.987.131.138,00	-
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	29.115.531.696,52			-	-	-	-	19.987.131.138,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	29.115.531.696,52	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.987.131.138,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN						1.000.000.000,00							1.537.632.944,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.000.000.000,00							1.537.632.944,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.000.000.000,00							1.537.632.944,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000,00						-	1.537.632.944,00	
		[Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel]	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.92	88.78	88.80	88.83	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.537.632.944,00	-
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	662.632.944,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		617.632.944,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN
		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR						1.000.000.000,00						3.399.339.794,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.000.000.000,00							3.399.339.794,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.000.000.000,00							3.399.339.794,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						350.000.000,00						-	799.339.794,00	
		[Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur yang transparan dan akuntabel]	SAKIP Daerah	BB	BB	BB	BB	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	799.339.794,00	-
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	306.548.734,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.548.734,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
		-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	799.339.794,00	-
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
		[Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur yang transparan dan akuntabel]	SAKIP Daerah	BB	BB	BB	BB	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	799.339.794,00	-
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	322.791.060,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		302.791.060,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	70.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
		-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	799.339.794,00	-
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
2.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						150.000.000,00						100 %	600.000.000,00	
		[Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	-
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Kawasan	150.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.09.1.01.0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				0 kabupaten/ kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						500.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Persentase Jalan Kondisi Mantap	7.16	0	6.17	7.4	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan Kondisi Mantap	-			81.26 %	500.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				4 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Meter	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							130.801.770.830,15						220.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.801.770.830,15							220.000.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						130.801.770.830,15							220.000.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.073.625.999,82						-	22.920.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman]	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	88	81	85	86	17.073.625.999,82	-	-	-	-	-	-	22.920.000.000,00	-
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Lap/Dok	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	1.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	13.268.625.999,82			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	13.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/Bulan	12.218.625.999,82	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		12.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	75.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	745.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	1.390.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		325.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			9 Unit	175.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	2.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Laporan	2.260.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	1.655.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			16 Unit	175.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-	275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN dan PPPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						220.000.000,00						-	6.250.000.000,00	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.250.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi</i>	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi</i>	-			1 Dokumen	20.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	-	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</i>				100 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-			10 Unit Rumah	100.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	-	4.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				5 Unit Rumah	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				43 Unit Rumah	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-			1 Laporan	50.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						12.915.459.116,07						-	29.550.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	100 71.08	21 63.12	100 64.38	100 65.67	12.915.459.116,07	-	-	-	-	-	-	29.550.000.000,00	-
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-			1 Dokumen	1.040.000.000,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	-	2.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	-			6 Ha	11.875.459.116,07			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	-	27.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				80 Unit Rumah	8.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		16.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				20 Unit Rumah	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				10 Ha	2.155.459.116,07	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Miskin di Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						100.592.685.714,26						-	161.280.000.000,00	
		[Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman]	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	54.25	52.66	53.00	53.25	100.592.685.714,26	-	-	-	-	-	-	161.280.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-			1 Laporan	100.592.685.714,26			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permuki man di Provinsi Kepulauan Riau	-	161.280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	4.775.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permuki man di Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan				150 Lokasi	7.850.685.361,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permuki man di Provinsi Kepulauan Riau		37.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				200 Lokasi	87.947.000.352,66	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Perumahan/Permuki man di Provinsi Kepulauan Riau		123.130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						11.334.051.440,52							11.519.053.282,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.334.051.440,52							11.519.053.282,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.334.051.440,52							11.519.053.282,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						9.334.051.440,52						-	9.420.615.103,00	
		[Meningkatkan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.70	73.20	73.20	73.70	9.334.051.440,52	-	-	-	-	-	-	9.420.615.103,00	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	220.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	8.059.051.440,52			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	8.130.615.103,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/ Bulan	7.834.051.440,52	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		7.750.615.103,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	280.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	216.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Dokumen	155.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Dokumen	290.000.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Dokumen	260.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur	-	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	9.334.051.440,52	-	-	-	-	-	-	9.420.615.103,00	-
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.000.000.000,00						-	2.098.438.179,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana]	Indeks Pencegahan Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.38 0.70 2.98	0.27 0.53 2.69	0.27 0.53 2.69	0.27 0.53 2.69	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.098.438.179,00	-
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-			6 Dokumen	657.500.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat	-	748.438.179,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat		254.053.282,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				50 Keluarga	72.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		94.384.897,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			6 Dokumen	582.500.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				2 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				170 Orang	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				4 Laporan	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	-			7 Dokumen	660.000.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat	-	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				40 Keluarga	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Aparatur dan Masyarakat		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan</i>				1 Kegiatan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				7 kabupaten/ kota	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor														
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN						26.687.773.602,14							26.123.939.305,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.687.773.602,14							26.123.939.305,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						26.687.773.602,14							26.123.939.305,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23.929.723.602,14						-	22.531.303.952,00	
		[Meningkatkan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Satpol PP	79,25 85,26 86,52	74,15 78.16 84,06	74,35 77.61 84,43	74,85 79.19 84,71	23.929.723.602,14	-	-	-	-	-	-	22.531.303.952,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	275.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.321.391.997,14			-	-	-	-	19.319.164.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				216 Orang/ Bulan	20.761.391.997,14	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.768.154.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		401.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	460.000.000,00			-	-	-	-	795.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	365.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.331.605,00			-	-	-	-	322.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	258.331.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	995.139.093,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.325.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		281.814.093,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.674.050.000,00			-	-	-	-	1.137.635.353,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				4 laporan	599.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		277.635.353,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah				4 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				15 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	260.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	2.174.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.762.635.353,00	-
	1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100 100,00 4,87 77.84	100 1,62 50 57,73 N/A	100 2,17 64,55 73.49	100 2,71 71,36 74.36	2.174.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.762.635.353,00	-
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	2.174.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.762.635.353,00	-
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	240.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100 100,00 4,87 77.84	100 1,62 50 57,73 N/A	100 2,17 64,55 73.49	100 2,71 71,36 74.36		-	-	-	-	-	-	1.762.635.353,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				4 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						584.000.000,00						-	1.830.000.000,00	
		[Meningkatnya Pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	85,71	N/A	14,29	28,57	584.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-			-	544.000.000,00			-	-	-	-	1.710.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	584.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		[Meningkatnya Pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	85,71	N/A	14,29	28,57	584.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	584.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		[Meningkatnya Pencegahan kebakaran]	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	85,71	N/A	14,29	28,57	584.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 laporan	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0039	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran														
			Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				40 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.02.0005	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL						17.463.926.426,90							20.829.736.512,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.463.926.426,90							20.829.736.512,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						17.463.926.426,90							20.829.736.512,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.890.770.426,90						-	14.853.636.512,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial]	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 83.30	80 83.30	80 83.30	80 83.30	13.890.770.426,90	-	-	-	-	-	-	14.853.636.512,00	-
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	450.000.000,00			-	-	-	-	315.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.954.260.426,90			-	-	-	-	12.863.516.512,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				768 Orang/ Bulan	11.374.048.426,90	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.285.302.512,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	580.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		578.214.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			-	-	-	-	155.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	82.600.000,00			-	-	-	-	82.600.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	838.110.000,00			-	-	-	-	716.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	672.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	145.000.000,00			-	-	-	-	300.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	230.800.000,00			-	-	-	-	230.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	30.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						368.532.000,00						-	1.329.000.000,00	
		[Meningkatkan pemberdayaan sosial]	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 2.38 42.35	- 30.59 8.93	- 0.89 31.37	100 1.57 2.38	368.532.000,00	-	-	-	-	-	-	1.329.000.000,00	-
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-			1 Dokumen	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga/Orsos Penyelenggara Pemberdayaan Sosial yang mendapat Pembinaan, Bantuan, dan/atau Fasilitas Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan yang mendapat Pembinaan, Pelatihan, dan/atau Fasilitas	-			8 Lembaga 1250 Orang 4 Orang	358.532.000,00			-	-	-	-	1.329.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				8 Lembaga	268.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				4 Orang	33.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				1250 Orang	56.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		559.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						651.192.000,00						-	1.094.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan rehabilitasi sosial]	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	651.192.000,00	-	-	-	-	-	-	1.094.000.000,00	-
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti	-			65 orang	142.548.000,00			-	-	-	-	193.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				65 Orang	78.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				65 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				65 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				65 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				65 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				3 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti	-			310 Orang	286.644.000,00			-	-	-	-	558.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				5 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				310 Orang	63.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				310 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				310 Orang	43.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				310 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				310 Orang	125.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti	-			103 Orang	120.000.000,00			-	-	-	-	181.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				103 Orang	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				103 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				103 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				4 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				103 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				103 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				103 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				2 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				3 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti	-			10 Orang	62.000.000,00			-	-	-	-	87.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				10 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				1 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				10 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				1 Orang	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA, yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti	-			25 Orang	40.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				25 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						1.173.032.000,00						-	3.203.100.000,00	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	0.19 100 3.89	0.26 100 16.15	0.17 100 4.34	0.01 0.40 100	1.173.032.000,00	-	-	-	-	-	-	3.203.100.000,00	-
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan Ekonomi Produktif Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-			7 Kab/Kota 26 KK 850 KK	1.173.032.000,00			-	-	-	-	3.203.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				26 Orang	100.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.047.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				850 Orang	201.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.666.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				7 Kab/Kota	871.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		489.900.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						1.365.400.000,00						-	325.000.000,00	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	1.365.400.000,00	-	-	-	-	-	-	325.000.000,00	-
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	-			100 orang	1.365.400.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				100 Orang	163.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				100 Orang	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				100 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				20 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana														
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				287 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai				100 Keluarga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						15.000.000,00						-	25.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	11.11	11.11	11.11	11.11	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	-			1 Unit	15.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
		UPTD SOSIAL						1.295.494.000,00							2.250.160.864,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.295.494.000,00							2.250.160.864,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.295.494.000,00							2.250.160.864,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						433.996.000,00						-	995.800.864,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial]	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.43	83.43	83.43	83.43	433.996.000,00	-	-	-	-	-	-	995.800.864,00	-
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 %	61.998.000,00			-	-	-	-	193.400.432,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	61.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		193.400.432,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	130.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	45.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	196.998.000,00			-	-	-	-	527.400.432,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	171.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		398.400.432,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	0,00			-	-	-	-	125.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPTD SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						861.498.000,00						-	1.254.360.000,00	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	-	-	100	861.498.000,00	-	-	-	-	-	-	1.254.360.000,00	-
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	161.498.000,00			-	-	-	-	456.360.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	7.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				10 Orang	133.998.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		359.360.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				10 Orang	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	798.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				90 Orang	700.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		698.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				0 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPTD SOSIAL
	1.06.04.1.05.0018	Pemulasaraan														
			Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi				0 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						38.272.648.903,43							34.548.470.393,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.072.648.903,43							33.953.470.393,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						38.072.648.903,43							33.953.470.393,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						31.177.904.872,43						-	29.899.550.393,00	
		-	-	-	-	-	-	31.177.904.872,43	-	-	-	-	-	-	29.899.550.393,00	-
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,55 80 87,10	0 76.70	0 76.85	77,15 79,19 86,45	31.177.904.872,43	-	-	-	-	-	-	29.899.550.393,00	-
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.669.749.166,00			-	-	-	-	27.175.725.002,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				106 Orang/ Bulan	27.725.509.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.231.485.002,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	864.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		864.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	755.580.700,00			-	-	-	-	526.560.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.474.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.474.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.106.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.106.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.899.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	560.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.927.706,00			-	-	-	-	1.542.265.191,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	238.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		238.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	40.620.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	112.307.706,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.261.645.191,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.647.300,43			-	-	-	-	340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	121.647.300,43	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						90.000.000,00						-	115.000.000,00	
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas	100	50	50	50	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	115.000.000,00	-
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				14 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				10 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						4.874.744.000,00						-	2.025.920.000,00	
		[Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja]	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,38	50,80	66,67	71,79	4.874.744.000,00	-	-	-	-	-	-	2.025.920.000,00	-
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	4.809.744.000,00			-	-	-	-	1.900.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				200 Orang	4.809.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.900.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		-	-	-	-	-	-	4.874.744.000,00	-	-	-	-	-	-	2.025.920.000,00	-
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n				0 Kesepakatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		[Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja]	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,38	50,80	66,67	71,79	4.874.744.000,00	-	-	-	-	-	-	2.025.920.000,00	-
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				7 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						510.000.031,00						-	718.000.000,00	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	36.70 74.54 80,12	- 79,35	36 64 73.94	36.12 73.96 79,45	510.000.031,00	-	-	-	-	-	-	718.000.000,00	-
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.031,00			-	-	-	-	543.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				500 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				40 Orang	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				11 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				50 Orang	20.000.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		378.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD</i>				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)</i>				500 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				50 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik														
			<i>Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online</i>				11 Perusahaan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.040.000.000,00						-	765.000.000,00	
		[Meningkatnya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi]	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 60	40,56 98.07	100 50	54 98.78	1.040.000.000,00	-	-	-	-	-	-	765.000.000,00	-
			Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam													
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>				50 Perusahaan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				50 Perusahaan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				2 Laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	415.000.000,00			-	-	-	-	335.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				20 Perkara	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				8 Lembaga	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	405.000.000,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			Jumlah penetapan UMK				7 Surat Keputusan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				587.619 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						380.000.000,00						-	430.000.000,00	
		[Terlindunginya hak-hak pekerja]	Persentase kasusnketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15.80 54.58 77.50	21.18 60.27 86.18	14.80 51.98 77.00	15.80 52.48 77.50	380.000.000,00	-	-	-	-	-	-	430.000.000,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	380.000.000,00			-	-	-	-	430.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				50 Perusahaan	150.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	160.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				20 Perusahaan	70.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						200.000.000,00							595.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						200.000.000,00							595.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI						60.000.000,00						-	215.000.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi]	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	33.3	25	-	33.3	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	215.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						100.000.000,00						-	205.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi]	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	45.9	21.23	40.2	45.9	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	205.000.000,00	-
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi				30 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	205.000.000,00	-
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)														
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		[Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi]	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	45.9	21.23	40.2	45.9	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	205.000.000,00	-
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				3 Lokasi	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						40.000.000,00						-	175.000.000,00	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	31.25	6.25	-	31.25	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000.000,00	-
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM						562.650.000,00							660.349.808,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						562.650.000,00							660.349.808,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						562.650.000,00							660.349.808,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						157.650.000,00						-	280.349.808,00	
		[Meningkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi]	-	-	-	-	-	157.650.000,00	-	-	-	-	-	-	280.349.808,00	-
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.000.000,00			-	-	-	-	72.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.650.000,00			-	-	-	-	208.349.808,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	61.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.200.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.450.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.699.808,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						405.000.000,00						-	380.000.000,00	
		[Terlindunginya hak-hak pekerja]	-	-	-	-	-	405.000.000,00	-	-	-	-	-	-	380.000.000,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	405.000.000,00			-	-	-	-	380.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				75 Perusahaan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				35 Perusahaan	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
		UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU						3.902.585.738,00							2.273.029.577,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.877.585.738,00							2.268.029.577,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.877.585.738,00							2.268.029.577,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						209.702.000,00						-	349.401.808,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi]	-	-	-	-	-	209.702.000,00	-	-	-	-	-	-	349.401.808,00	-
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.702.000,00			-	-	-	-	319.401.808,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	184.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		184.702.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.699.808,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						3.667.883.738,00						-	1.918.627.769,00	
		[Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja]	-	-	-	-	-	3.667.883.738,00	-	-	-	-	-	-	1.918.627.769,00	-
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	3.667.883.738,00			-	-	-	-	1.918.627.769,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				200 Orang	3.522.883.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.552.627.769,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				30 Unit	125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		316.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
		-	-	-	-	-	-	3.667.883.738,00	-	-	-	-	-	-	1.918.627.769,00	-
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n				8 Kesepakatan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	X	NON URUSAN						25.000.000,00							5.000.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						25.000.000,00							5.000.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.000.000,00						-	5.000.000,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN							266.800.000,00							225.474.952,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						266.800.000,00							225.474.952,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						266.800.000,00							225.474.952,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						101.800.000,00						-	85.474.952,00		
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi]	-	-	-	-	-	101.800.000,00	-	-	-	-	-	-	85.474.952,00	-	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.800.000,00			-	-	-	-	55.474.952,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.800.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.674.952,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						165.000.000,00						-	140.000.000,00	
		[Terlindunginya hak-hak pekerja]	-	-	-	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	140.000.000,00	-
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	165.000.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				25 Perusahaan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				20 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						23.551.476.023,60							25.858.857.497,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.551.476.023,60							25.858.857.497,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						22.734.010.217,60							21.528.913.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.669.447.635,60						-	14.803.913.250,00	
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Ketercapaian Indikator Kinerja Dinas]	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB	77.60 BB	79.57 BB	77 BB	77.15 BB	19.669.447.635,60	-	-	-	-	-	-	14.803.913.250,00	-
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	200.000.000,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi,	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi,		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi,		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi,		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			90/14 Orang/ Bulan	12.788.543.249,60			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	12.362.513.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90/14 Orang/ Bulan	12.153.543.249,60	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		11.751.919.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	620.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		595.593.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi Dengan Baik	-			100 Persen	30.000.000,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	80.000.000,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	979.465.820,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	970.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	122.465.820,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	4.535.062.161,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	43.623.581,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.391.438.580,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	706.376.405,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	336.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	140.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				49 Laporan	476.376.405,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		86.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	-			100 Persen	350.000.000,00			-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi	-	360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	210.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	70.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	70.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas P3AP2KB Provinsi		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2.104.556.581,00						-	1.940.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan]	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	13.09 56.20	11.82 51.95	12.41 52.80	13.03 53.65	2.104.556.581,00	-	-	-	-	-	-	1.940.000.000,00	-
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Provinsi Kepulauan Riau	-			845 Nilai	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	-	610.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	40.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				0 laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenganan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek				0 orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				40 Lembaga	85.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OPD Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Masyarakat serta masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	-			60 Orang	1.534.384.508,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Kelompok Rentan	-	810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi</i>				1 Lembaga	32.465.806,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Rentan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
			<i>jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan</i>				1 Lembaga	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Rentan		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0007	monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Kelompok Rentan		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				160 Orang	500.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Kelompok Rentan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>				459 Orang	551.918.702,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, Organisasi Wanita, Perempuan Kelompok Rentan		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Perempuan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan Kapasitasnya</i>	-			20 Orang	445.172.073,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Perempuan Kelompok Rentan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Perempuan Kelompok Rentan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				30 Orang	182.843.043,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Perempuan Kelompok Rentan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				5 Lembaga	162.329.030,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Perempuan Kelompok Rentan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Perempuan Kelompok Rentan dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						250.750.000,00						-	1.230.000.000,00	
		[Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan]	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	40.38	43.70	43.51	43.33	250.750.000,00	-	-	-	-	-	-	1.230.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Program/Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah	-			4 Program/Kebijakan	100.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				20 orang	50.750.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	-			8 Lembaga	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat	-	680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				40 Orang	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0008	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi														
			jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD Provinsi Kab Kota, APH, instansi vertikal, Ormas, LPPA, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						292.020.195,00						-	1.335.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak]	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	73.22	71.41	72.18	72.44	292.020.195,00	-	-	-	-	-	-	1.335.000.000,00	-
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	-			35 Lembaga/OPD	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan Lembaga/Organisasi Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0005	penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0 Lembaga	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan Lembaga/Organisasi Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0 Kebijakan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan Lembaga/Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				3 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan Lembaga/Organisasi Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang didampingi dan diberi penguatan dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak	-			35 Lembaga	129.863.238,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0005	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi				4 Lembaga	97.397.418,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0008	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	32.465.820,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PUSPAGA Kab/Kota, PUSPAGA Gurindam, Organisasi Perempuan dan Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Milik Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	-			4 Layanan	112.156.957,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Anak, Orang Tua dan Perkumpulan Masyarakat	-	485.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Masyarakat, Anak, Orang Tua dan Perkumpulan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Masyarakat, Anak, Orang Tua dan Perkumpulan Masyarakat		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				750 Orang	62.156.957,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Anak, Orang Tua dan Perkumpulan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0006	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	-	Masyarakat, Anak, Orang Tua dan Perkumpulan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						20.000.000,00						-	250.000.000,00	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak]	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan	69.79	46.51	51.16	55.81	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi</i>	-			35 OPD	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														
			<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak</i>				1 Lembaga	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						152.465.806,00						-	970.000.000,00	
		[Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif]	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	85.71	71.43	71.43	85.71	152.465.806,00	-	-	-	-	-	-	970.000.000,00	-
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang didampingi dan dikembangkan</i>	-			7 Lembaga	70.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi				0 Kebijakan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				4 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0 Lembaga	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0 Laporan	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandisabilitas.	-	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan Gugus Tugas KLA		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga layanan pemenuhan hak anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pembinaan	-			7 Lembaga	82.465.806,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandisabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan	-	520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	32.465.806,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak, PUSPAGA, LKSA, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat, Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						244.770.000,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak]	Rasio Kekerasan Anak	5.56	6.15	6.03	5.91	244.770.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Perangkat Daerah	-			3 Program/Kebijakan	175.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				25 Orang	125.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				30 Lembaga	50.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	-			8 Lembaga	69.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandisabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>				30 Orang	69.020.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kab Kota baik Pemerintah maupun berbasis Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						817.465.806,00							4.329.944.247,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						50.000.000,00						-	550.000.000,00	
		[Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk]	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	72.10 9.60	11.10 68.70	10.80 69.25	10.50 69.50	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	550.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Tersusun dan termanfaatkannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)</i>	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat (BKKBN), Pemangku Kepentingan dan Pengambil kebijakan.	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0019	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat (BKKBN), Pemangku Kepentingan dan Pengambil kebijakan.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat (BKKBN), Pemangku Kepentingan dan Pengambil kebijakan.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat (BKKBN), Pemangku Kepentingan dan Pengambil kebijakan.		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	<i>Tersedianya dokumen pemetaan Program KKBPK</i>	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi dan OPD terkait, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lembaga Perencana dan Peneliti, Masyarakat dan Pemangku Lokal.	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			<i>Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi dan OPD terkait, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lembaga Perencana dan Peneliti, Masyarakat dan Pemangku Lokal.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0012	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah Daerah Provinsi dan OPD terkait, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lembaga Perencana dan Peneliti, Masyarkat dan Pemangku Lokal.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						160.000.000,00						-	495.000.000,00	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10	12.1	11.75	11.25	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	495.000.000,00	-
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersosialisasinya Program KKBPK	-			200 Orang	110.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Lapangan KB (PLKB),Pemangku Kepentingan	-	295.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Lapangan KB (PLKB),Pemangku Kepentingan		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan														
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan				1 Daerah	60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, Remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Lapangan KB (PLKB),Pemangku Kepentingan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat, Remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Lapangan KB (PLKB),Pemangku Kepentingan		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			50 Lembaga	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat, Lembaga Pemerintah Daerah dan OPD Terkait.	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				25 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat, Lembaga Pemerintah Daerah dan OPD Terkait.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</i>				0 Organisasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat, Lembaga Pemerintah Daerah dan OPD Terkait.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						607.465.806,00						-	3.284.944.247,00	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	71	66	67	68	607.465.806,00	-	-	-	-	-	-	3.284.944.247,00	-
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Terlatih Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-			200 Orang	482.465.806,00			-	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.	-	553.144.247,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				25 Keluarga	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				1 Kelompok	32.465.806,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				2 Daerah	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				-0 Kelompok	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Keluarga Pra-Sejahtera, Pasangan Usia Subur, Keluarga Rentan, Keluarga dengan anak, remaja dan lansia, Kelompok Kegiatan, Kader dan Fasilitator Pembangunan Keluarga, Lembaga Mitra dan Pemerintah Darah.		203.144.247,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			1115 Jumlah	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Kader, Pengurus dan relawan Ormas, Pemerintah Daerah dan OPD terkait.	-	2.731.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				2 Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Kader, Pengurus dan relawan Ormas, Pemerintah Daerah dan OPD terkait.		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				0 Laporan	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Kader, Pengurus dan relawan Ormas, Pemerintah Daerah dan OPD terkait.		178.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				21 Organisasi	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Kader, Pengurus dan relawan Ormas, Pemerintah Daerah dan OPD terkait.		2.353.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						820.687.806,00							2.467.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						820.687.806,00							2.467.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						820.687.806,00							2.467.000.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						458.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Ketercapaian Indikator UPTD PPA Provinsi]	Indeks Kepuasan Masyarakat	94.00	92.75	93.00	93.25	458.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000,00	-
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	-			100 Persen	20.000.000,00			-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam	-	70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	75.000.000,00			-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam	-	290.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	7.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		40.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		100.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		10.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		50.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	194.000.000,00			-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam	-	610.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		140.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		50.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		420.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	-			100 Persen	169.000.000,00			-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam	-	230.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	110.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		120.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		10.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	34.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		30.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPA Provinsi dan Rumah Perlindungan di Kota Batam		70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						222.576.806,00						-	840.000.000,00	
		[Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	99	93.43	95	96	222.576.806,00	-	-	-	-	-	-	840.000.000,00	-
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	-			100 Persen	222.576.806,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	-	840.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 orang	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		35.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	4.111.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		70.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		120.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		35.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				35 Orang	53.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		120.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				35 Orang	65.465.806,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		380.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		55.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	15.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO		25.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						140.111.000,00						-	427.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak]	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	99	94	95	96	140.111.000,00	-	-	-	-	-	-	427.000.000,00	-
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kasus kekerasan anak yang terlayani	-			100 Persen	140.111.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan	-	427.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		115.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	4.111.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				18 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		115.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				18 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		45.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		12.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		20.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		60.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Korban Kekerasan		40.000.000,00	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN						37.993.768.584,65							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.776.178.398,65							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						27.776.178.398,65							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						24.210.376.421,65						-	0,00	
		[Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas]	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	83	89.35	82.15	83.19	24.210.376.421,65	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	22.206.545.740,65			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/ Bulan	21.536.545.740,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	670.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	33.721.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	33.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	865.297.916,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.893.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.399.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.005.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372.223.325,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	314.207.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.015.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	587.588.440,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	417.588.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PASLI DAERAH (PAD)
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.768.403.602,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat]	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90.44	88.76	89.3	90.1	2.768.403.602,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	1.900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			0				1 Laporan 0	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara				3 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				40 Ton	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	268.403.602,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	68.403.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						307.398.375,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	"d 1 0	7.9	"d 1 0	"d 1 0	307.398.375,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	57.398.375,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	57.398.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						490.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan]	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85	93.57	83	84	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	490.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.217.590.186,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10.217.590.186,00							0,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.784.072.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Produksi Tanaman Hortikultura Produksi Tanaman Pangan Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Ternak	20128.32 30385.47 33814.08 34456.53	17251.66 18823.34 27788.8 28856.8	17510.4 19034.55 28205.63 29722.5	19247.61 19960.1 28628.71 30614.18	1.784.072.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PASLI DAERAH PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	37.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PASLI DAERAH PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	-			-	1.397.072.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				30 Ton	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				100 Dosis	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				45 Ekor	947.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.272.956.586,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	90	199	82	82	4.272.956.586,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	4.272.956.586,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				40 Ha	4.132.956.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi														
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi														
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0026	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						400.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	69	na	64	65	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				3 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan				3 Produk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan														
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				3 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya														
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				4 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						232.928.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	-	-	-	-	-	232.928.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	232.928.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				75 Ha	162.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				20 Ha	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		-	-	-	-	-	-	232.928.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						3.527.633.600,00						-	0,00	
		[Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian]	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	62	50	52	54	3.527.633.600,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.927.633.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				25 Kelompok	2.927.633.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)						1.153.944.056,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						242.944.056,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						242.944.056,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						242.944.056,00						-	0,00	
		[Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas]	-	-	-	-	-	242.944.056,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.980.176,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.335.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.969.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.198.880,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	101.198.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.765.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	52.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	25.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						911.000.000,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						911.000.000,00							0,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						641.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian]	-	-	-	-	-	641.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	641.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				1250 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
		-	-	-	-	-	-	641.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				100 Anakan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	-	-	-	-	-	641.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				1500 Batang	391.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
		-	-	-	-	-	-	641.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.02.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				130 Mata	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				200 Setek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				66 Gram	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				200 Batang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0.8 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0.8 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	-	-	-	-	-	641.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						200.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						70.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				75 Ha	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
		UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN						646.466.700,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						246.466.700,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						246.466.700,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						246.466.700,00						-	0,00	
		[Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas]	-	-	-	-	-	246.466.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.981.700,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.828.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.556.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.921.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	20.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.485.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	80.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	15.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						400.000.000,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						400.000.000,00							0,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						100.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet														
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
2.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						300.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan				3 Produk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						37.770.033.106,66							32.396.085.485,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.888.058.506,66							31.537.206.687,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						36.888.058.506,66							31.537.206.687,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						35.066.058.506,66						-	31.149.565.837,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan]	Nilai SAKIP DLHK	BB	BB	BB	BB	35.066.058.506,66	-	-	-	-	-	-	31.149.565.837,00	-
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	115.707.730,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.267.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SDA KEHUTANAN-DA NA REBOISASI (DR)	-	-	-		67.439.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	33.058.114.207,33			-	-	-	-	28.174.231.829,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				192 Orang/ Bulan	32.483.002.207,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.599.119.829,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	575.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		575.112.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	540.561.022,00			-	-	-	-	489.832.958,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.599.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.599.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.175.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.175.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.660.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	108.056.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.055.865,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.985.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.756.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.438.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.438.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.064.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.064.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		263.530.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	16.565.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.565.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	620.000.000,00			-	-	-	-	57.700.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.150.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.383.277,33			-	-	-	-	2.054.183.853,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.900.493,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	52.383.277,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.040.283.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	360.000.000,00			-	-	-	-	247.908.967,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.928.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.090.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						85.000.000,00						-	31.750.980,00	
		[Meningkatkan Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP]	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100	100	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	31.750.980,00	-
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	31.750.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.750.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						280.000.000,00						-	76.422.900,00	
		[Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase Lokasi yang terkendali dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-	76.422.900,00	-
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	280.000.000,00			-	-	-	-	76.422.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.765.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				4 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				4 Lokasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.657.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						50.000.000,00						-	109.764.510,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.521	0	0.495	0.497	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	109.764.510,00	-
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	109.764.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.764.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				6 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						100.000.000,00						-	20.765.960,00	
		[Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)]	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	100	50.00	50.00	53.57	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.765.960,00	-
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	20.765.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.765.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						120.000.000,00						-	22.950.000,00	
		[Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	Persentase Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100	100	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	22.950.000,00	-
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	22.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				27 Usaha/Ke giatan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						70.000.000,00						-	39.074.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup]	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	7.52	6.19	6.19	6.64	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	39.074.550,00	-
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	39.074.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				12 Lembaga	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.574.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						52.000.000,00						-	21.000.000,00	
		[Meningkatkan Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup]	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	53.19	57.45	59.57	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	52.000.000,00			-	-	-	-	21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				28 Entitas	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						115.000.000,00						-	36.146.500,00	
		[Meningkatkan Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup]	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100	100	100	100	115.000.000,00	-	-	-	-	-	-	36.146.500,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	115.000.000,00			-	-	-	-	36.146.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				13 Perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.804.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				13 Pengaduan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.341.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						950.000.000,00						-	29.765.450,00	
		[Meningkatnya tata Kelola Persampahan]	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%))	100 54.00	11.68 84.76	31.00 88.00	36.00 91.00	950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	29.765.450,00	-
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	950.000.000,00			-	-	-	-	29.765.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokumen	865.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.765.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						881.974.600,00							858.878.798,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						881.974.600,00							858.878.798,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						501.974.600,00						-	488.626.088,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	100	100	100	100	501.974.600,00	-	-	-	-	-	-	488.626.088,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)														
			Dokumen RKTP yang disahkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	66.535.730,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.659.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.875.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	216.274.600,00			-	-	-	-	188.261.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.567.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Ha	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		18.167.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				1 Ha	71.274.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		76.526.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	43.000.000,00			-	-	-	-	110.611.348,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.764.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.847.228,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	42.700.000,00			-	-	-	-	43.217.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	42.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		43.217.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						140.000.000,00						-	154.486.850,00	
		[Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem]	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	154.486.850,00	-
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	140.000.000,00			-	-	-	-	154.486.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah														
			Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani				2 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				10 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.486.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				5 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						190.000.000,00						-	190.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan]	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	1.201	1.116	1.175	1.185	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-	190.000.000,00	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		111.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						50.000.000,00						-	25.765.860,00	
		[Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)]	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	6.84	1.71	1.71	2.56	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.765.860,00	-
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	25.765.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.765.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						431.438.978,00							251.708.492,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						431.438.978,00							251.708.492,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						431.438.978,00							251.708.492,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						211.438.978,00						-	153.879.545,00	
		[Meningkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.97	83.82	83.98	84.45	211.438.978,00	-	-	-	-	-	-	153.879.545,00	-
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.438.978,00			-	-	-	-	42.938.978,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.438.978,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.438.978,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	26.590.567,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						220.000.000,00						-	97.828.947,00	
		[Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa	100	46.67	46.67	53.33	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	97.828.947,00	-
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	97.828.947,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				2 Paket	40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				6 Lokasi	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.328.947,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KPHP UNIT I KARIMUN						186.214.668,00							150.418.836,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						186.214.668,00							150.418.836,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						186.214.668,00							150.418.836,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						144.000.000,00						-	86.440.567,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.45	83.82	83.97	84.25	144.000.000,00	-	-	-	-	-	-	86.440.567,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.000.000,00			-	-	-	-	17.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	26.590.567,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						42.214.668,00						-	63.978.269,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	32.50	20.00	22.50	24.00	42.214.668,00	-	-	-	-	-	-	63.978.269,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	4.059.000,00			-	-	-	-	19.059.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	4.059.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		4.059.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	38.155.668,00			-	-	-	-	29.919.269,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.634.127,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1 Operasi	16.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		12.075.350,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				14 Ha	21.655.668,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.209.792,00	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
		UPTD KPHP UNIT II BATAM						196.358.098,00							140.418.836,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						196.358.098,00							140.418.836,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						196.358.098,00							140.418.836,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						134.000.000,00						-	76.440.567,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,84	83,82	83,98	84,55	134.000.000,00	-	-	-	-	-	-	76.440.567,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	26.590.567,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						62.358.098,00						-	63.978.269,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	34.90	16.67	17.00	21.67	62.358.098,00	-	-	-	-	-	-	63.978.269,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	15.932.785,00			-	-	-	-	26.693.127,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara</i>				4 Unit	15.932.785,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		11.693.127,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	46.425.313,00			-	-	-	-	22.285.142,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1 Operasi	16.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.075.350,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				14 Ha	29.925.313,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.209.792,00	UPTD KPHP UNIT II BATAM
		UPTD KPHP UNIT III LINGGA						352.049.538,00							137.418.836,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						352.049.538,00							137.418.836,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						352.049.538,00							137.418.836,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						256.000.000,00						-	73.440.567,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,15	83,82	83,94	84,15	256.000.000,00	-	-	-	-	-	-	73.440.567,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	-	-	-	4.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	26.590.567,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						96.049.538,00						-	63.978.269,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	32.78	9.78	11.22	14.98	96.049.538,00	-	-	-	-	-	-	63.978.269,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	5.167.597,00			-	-	-	-	21.693.127,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				2 Unit	5.167.597,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		6.693.127,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	90.881.941,00			-	-	-	-	27.285.142,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>				1 Operasi	18.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		12.075.350,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				14 Ha	72.381.941,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.209.792,00	UPTD KPHP UNIT III LINGGA
		UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG						213.592.684,00							157.418.836,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						213.592.684,00							157.418.836,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						213.592.684,00							157.418.836,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						151.000.000,00						-	93.440.567,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,88	83,82	83,98	84,43	151.000.000,00	-	-	-	-	-	-	93.440.567,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	26.590.567,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.890.567,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						62.592.684,00						-	63.978.269,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	33.32	13.00	17.66	21.80	62.592.684,00	-	-	-	-	-	-	63.978.269,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	10.424.694,00			-	-	-	-	26.693.127,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				4 Unit	10.424.694,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		11.693.127,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	52.167.990,00			-	-	-	-	22.285.142,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>				1 Operasi	17.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.075.350,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				14 Ha	34.667.990,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.209.792,00	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
		UPTD KPHP UNIT V NATUNA						240.229.465,00							154.431.517,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						240.229.465,00							154.431.517,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						240.229.465,00							154.431.517,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						134.000.000,00						-	90.453.248,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,78	83,82	83,96	84,24	134.000.000,00	-	-	-	-	-	-	90.453.248,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.000.000,00			-	-	-	-	32.903.248,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.903.248,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	14.700.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						106.229.465,00						-	63.978.269,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	31.69	13.33	15.56	18.89	106.229.465,00	-	-	-	-	-	-	63.978.269,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	12.417.300,00			-	-	-	-	26.693.127,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				2 Unit	12.417.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		11.693.127,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	93.812.165,00			-	-	-	-	22.285.142,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1 Operasi	19.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.075.350,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				14 Ha	74.312.165,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.209.792,00	UPTD KPHP UNIT V NATUNA
		UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS						249.369.947,00							213.528.261,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						249.369.947,00							213.528.261,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						249.369.947,00							213.528.261,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						194.000.000,00						-	149.550.000,00	
		[Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,14	83,82	83,95	84,03	194.000.000,00	-	-	-	-	-	-	149.550.000,00	-
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.000.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.350.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.000.000,00			-	-	-	-	92.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	14.700.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						55.369.947,00						-	63.978.261,00	
		[Menurunnya Kerusakan hutan]	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	39.88	17.75	22.80	28.60	55.369.947,00	-	-	-	-	-	-	63.978.261,00	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	21.813.024,00			-	-	-	-	26.693.127,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				5 Unit	21.813.024,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		11.693.127,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	33.556.923,00			-	-	-	-	22.285.134,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1 Operasi	16.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		7.075.350,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				14 Ha	17.056.923,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.209.784,00	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						16.628.957.340,87							15.774.692.804,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.628.957.340,87							15.774.692.804,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						370.000.000,00							1.330.000.000,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						165.000.000,00						-	610.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk]	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	67	62.83	62	63	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-			7 Kab/kota	130.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat	-	355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat		215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk]	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	67	62.83	62	63	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ kota dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk]	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	67	62.83	62	63	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan bimbingan terkait administrasi kependudukan</i>	-			7 Kab/kota	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Aparatur Dukcapil Kab/Kota dan masyarakat	-	255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Aparatur Dukcapil Kab/Kota dan masyarakat		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	610.000.000,00	-
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Aparatur Dukcapil Kab/Kota dan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						100.000.000,00						-	485.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	-			1 llaporan	65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Masyarakat	-	325.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	485.000.000,00	-
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Masyarakat		325.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	485.000.000,00	-
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	485.000.000,00	-
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait administrasi Pencatatan Sipil	-			7 Kab/Kota	35.000.000,00			-	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ Kota dan Masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ Kota dan Masyarakat		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	485.000.000,00	-
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ Kota dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						95.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan]	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	50	36.36	36.36	38.64	95.000.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000.000,00	-
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota dengan Database Kependudukan yang valid dan akurat	-			7 Kab/Kota	95.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ Kota	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Aparatur Disdukcapil Kab/ Kota		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						10.000.000,00						-	15.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan]	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	100	100	100	100	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah jenis buku profil kependudukan yang disusun	-			2 buku	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	OPD Provinsi, instansi, lembaga dan masyarakat	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	OPD Provinsi, instansi, lembaga dan masyarakat		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						16.258.957.340,87							14.444.692.804,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.448.322.340,87						-	12.546.192.804,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Nilai SAKIP Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	90 95.5	80 87.71	80 88.5	80 89.5	13.448.322.340,87	-	-	-	-	-	-	12.546.192.804,00	-
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	-			6 dokumen	143.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur internal OPD	-	266.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur internal OPD		42.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Aparatur internal OPD		98.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	75.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur internal OPD		125.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya	-			100 %	11.813.744.932,87			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan PPPK internal OPD	-	10.377.892.804,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/Bulan	11.448.322.340,87	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan PPPK internal OPD		9.875.652.804,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	361.922.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	ASN dan PPPK internal OPD		477.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	ASN dan PPPK internal OPD		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Laporan	3.500.000,00			-	-	Aparatur internal OPD	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur internal OPD		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan profesionalisme aparatur	-			100 %	106.000.000,00			-	-	Aparatur internal OPD	-	246.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	91.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur internal OPD		171.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur internal OPD		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	-			100 %	600.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD	-	737.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Internal OPD		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang Diadakan	-			1 paket	315.000.000,00			-	-	Internal OPD	-	430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Internal OPD		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan</i>	-			12 bulan	245.852.408,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Internal OPD	-	258.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Internal OPD		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	48.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Internal OPD		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	44.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	145.917.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Internal OPD		168.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	-			100 %	219.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aset internal OPD	-	215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	174.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aset internal OPD		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	45.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aset internal OPD		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						65.000.000,00						-	120.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Penataan Desa]	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	25	110	10	15	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	<i>Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa</i>	-			15 Desa	65.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						133.500.000,00						-	280.000.000,00	
		[Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa]	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	61.82	49.45	50.55	52.36	133.500.000,00	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	-
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-			3 kegiatan	133.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa	-	280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				5 Dokumen	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Desa		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Desa		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						211.500.000,00						-	658.500.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	61.30	39.82	41.64	45.42	211.500.000,00	-	-	-	-	-	-	658.500.000,00	-
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-			275 Desa	211.500.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa	-	658.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa		100.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				60 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa		145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				35 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa		178.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.400.635.000,00						-	840.000.000,00	
		[Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan]	Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina	32.80	0.31	5.72	11.14	2.400.635.000,00	-	-	-	-	-	-	840.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang mendapat pembinaan	-			5 Lembaga	2.400.635.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan	-	840.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				30 Lembaga	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				30 Unit	880.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Lembaga Kemasyarakatan (RT ,RW,PKK,Posyandu, LPM, Karang Taruna) Desa/Kelurahan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						37.539.267.478,08							37.681.749.394,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						37.539.267.478,08							37.681.749.394,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						37.539.267.478,08							37.681.749.394,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.764.267.478,08						-	19.187.249.628,00	
		[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.00	70.05	72.00	73.50	20.764.267.478,08	-	-	-	-	-	-	19.187.249.628,00	-
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	82.00	77.55	78.07	79.53									
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	83.00	80.73	81.00	81.50									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen/L aporan	252.470.001,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	152.470.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			8 Dokumen/L aporan	18.175.042.930,43			-	-	-	-	13.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2093 Orang/ Bulan	17.275.042.930,43	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		830.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	80.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	309.245.453,33			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	199.245.453,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum	-			7 Paket	870.000.000,00			-	-	-	-	1.780.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			13 Unit	180.000.000,00			-	-	-	-	186.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Laporan	417.754.546,66			-	-	-	-	2.341.249.628,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	51.754.546,66	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.920.249.628,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	mlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	-			26 Unit	429.754.546,66			-	-	-	-	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	349.754.546,66	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						750.000.000,00						-	1.675.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Darat	100 30.00	30.00 58.30	30.00 58.85	30.00 62.84	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.675.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia/terpelihara	-			110 Unit	550.000.000,00			-	-	-	-	1.175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				110 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		975.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				25 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	-			1 Laporan	25.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			1 Laporan	25.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						16.025.000.000,00						-	16.819.499.766,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	16.025.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.819.499.766,00	-
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	-			1 Laporan	1.500.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-			1 Laporan	75.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	-			14 Unit	14.350.000.000,00			-	-	-	-	15.419.499.766,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				2 Unit	13.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.319.499.766,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM						80.000.000,00							426.107.616,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.000.000,00							426.107.616,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						80.000.000,00							426.107.616,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.000.000,00						-	276.107.616,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	77.55	78.07	79.53	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	276.107.616,00	-
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
		-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	276.107.616,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	276.107.616,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		276.107.616,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						40.000.000,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	-			1 Unit	40.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN						80.000.000,00							454.913.376,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.000.000,00							454.913.376,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						80.000.000,00							454.913.376,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.000.000,00						-	304.913.376,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	77.55	78.07	79.53	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	304.913.376,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
		-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	304.913.376,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	304.913.376,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		304.913.376,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						40.000.000,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara</i>	-			1 Unit	40.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara</i>				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN						100.000.000,00							1.046.718.624,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							1.046.718.624,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						100.000.000,00							1.046.718.624,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.000.000,00						-	746.718.624,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	77.55	78.07	79.53	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	746.718.624,00	-
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
		-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	746.718.624,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	746.718.624,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		746.718.624,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						50.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	-			3 Unit	50.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS							100.000.000,00						555.623.152,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							555.623.152,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						100.000.000,00							555.623.152,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.000.000,00						-	305.623.152,00	
		[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	77.55	78.07	79.53	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	305.623.152,00	-
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
		-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	305.623.152,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	305.623.152,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		305.623.152,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						50.000.000,00						-	250.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA						100.000.000,00							452.049.784,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							452.049.784,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						100.000.000,00							452.049.784,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.000.000,00						-	202.049.784,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.00	77.55	78.07	79.53	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	202.049.784,00	-
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
		-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	202.049.784,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	0,00			-	-	-	-	202.049.784,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.049.784,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						50.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi laut]	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungan, Danau, dan Penyeberangan	63.00 96.15	49.00 76.92	52.50 84.62	52.50 84.62	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	-			1 Unit	50.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional															
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							32.297.387.753,66							29.792.572.944,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.297.387.753,66							29.792.572.944,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						31.747.387.753,66							28.757.572.944,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.961.267.243,66						-	16.851.201.858,00		
		[Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	78.97 80 86	0 78.70 80.67	75 78.75 81	76 78.80 82	19.961.267.243,66	-	-	-	-	-	-	16.851.201.858,00	-	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-			7 Dokument	200.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokument	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan</i>	-			100 Persen	17.241.769.499,66			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	15.419.301.858,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				167 Orang/ Bulan	16.713.345.499,66	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		14.890.877.858,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	528.424.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		528.424.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan</i>	-			100 Persentase	130.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan</i>	-			100 Persentase	439.325.932,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	565.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24.325.932,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah	-			100 Persentase	105.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	19.961.267.243,66	-	-	-	-	-	-	16.851.201.858,00	-
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	78.97 80 86	0 78.70 80.67	75 78.75 81	76 78.80 82	19.961.267.243,66	-	-	-	-	-	-	16.851.201.858,00	-
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan</i>	-			3 Laporan	1.073.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	319.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	68.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	960.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		144.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan</i>	-			42 Unit	772.171.812,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	152.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	558.171.812,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		87.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	69.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						5.474.140.000,00						-	6.829.825.344,00	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	76	0	71	72	5.474.140.000,00	-	-	-	-	-	-	6.829.825.344,00	-
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Keterbukaan informasi Publik	-			70 Nilai	5.474.140.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat	-	6.829.825.344,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				2000 Konten	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				0 Persentase	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				40 Persentase	500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	859.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Sei Jang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				0 Komunitas	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				36 Permohonan	860.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		779.825.344,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomen dasi	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				88 Media	3.235.140.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						6.311.980.510,00						-	5.076.545.742,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.17	3.05	3.05	3.07	6.311.980.510,00	-	-	-	-	-	-	5.076.545.742,00	-
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-			34,00 Unit	5.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-			6,8 Indeks 350 Data 40 Layanan	6.306.980.510,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat	-	5.016.545.742,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		75.304.224,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				35 perangkat daerah	3.256.980.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas				6 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				31 Perangkat Daerah	2.920.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				12 Aplikasi	105.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		1.072.600.336,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				5 Aplikasi	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		518.641.182,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						250.000.000,00							525.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						250.000.000,00						-	525.000.000,00	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	Indeks Pembangunan Statistik	3.00	2.61	2.70	2.80	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	525.000.000,00	-
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	-			28 Rekomen dasi	250.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	525.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				60 %	250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				0 %	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				0 %	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				0 %	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral														
			<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						300.000.000,00							510.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						300.000.000,00						-	510.000.000,00	
		[Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	62	64.34	40	46	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000.000,00	-
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Jumlah ASN yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan aplikasi persandian</i>	-			5000 Orang	300.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>				36 Perangkat Daerah	250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi</i>	-			36 Titik	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	-	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</i>				0 Kegiatan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						48.435.423.164,12							33.711.015.176,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.435.423.164,12							33.711.015.176,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						48.435.423.164,12							33.711.015.176,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.095.849.430,00						-	16.881.015.176,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Koperasi dan UKM	82.08 83.72 BB	82.22 82.90 BB	80.99 83.22 BB	81.26 83.32 BB	15.095.849.430,00	-	-	-	-	-	-	16.881.015.176,00	-
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.161.153.316,00			-	-	-	-	10.681.015.176,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	9.499.848.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.738.405.597,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	436.305.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		717.609.579,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	-	-	-	-	-	15.095.849.430,00	-	-	-	-	-	-	16.881.015.176,00	-
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Koperasi dan UKM	82.08 83.72 BB	82.22 82.90 BB	80.99 83.22 BB	81.26 83.32 BB	15.095.849.430,00	-	-	-	-	-	-	16.881.015.176,00	-
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	325.000.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.360.000.000,00			-	-	-	-	1.360.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.250.000.000,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	919.696.114,00			-	-	-	-	2.135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	784.696.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	460.000.000,00			-	-	-	-	510.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						220.000.000,00						-	220.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam]	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	20.70	18.68	18.46	18.88	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000.000,00	-
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				5 Unit Usaha	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				1 Unit Usaha	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						525.000.000,00						-	525.000.000,00	
		[Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi]	Persentase Koperasi yang Diawasi	7.39	7.27	5.44	5.82	525.000.000,00	-	-	-	-	-	-	525.000.000,00	-
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	275.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				25 Unit Usaha	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				25 Unit Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						250.000.000,00						-	250.000.000,00	
		[Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi]	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	10.90	9.18	8.74	9.16	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				25 Unit Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						510.000.000,00						-	510.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	37.50	24.90	28.80	30.50	510.000.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000.000,00	-
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	510.000.000,00			-	-	-	-	510.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				107 Orang	510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						7.430.000.000,02						-	4.350.000.000,00	
		[Meningkatnya Produktivitas Koperasi]	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	50.12	47.08	37.18	39.89	7.430.000.000,02	-	-	-	-	-	-	4.350.000.000,00	-
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	7.430.000.000,02			-	-	-	-	4.350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27 Unit Usaha	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	400.000.000,02	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				60 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				6 Unit Usaha	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				10 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				10 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				10 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				6 Unit Usaha	3.180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						15.291.689.209,10						-	5.425.000.000,00	
		[Meningkatnya Produktivitas UMKM]	Rasio Kewirausahaan Daerah	4.20	3.11	3.31	3.52	15.291.689.209,10	-	-	-	-	-	-	5.425.000.000,00	-
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	15.291.689.209,10			-	-	-	-	5.425.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				450 Unit Usaha	11.366.689.209,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				250 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				40 Unit Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil														
			Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata				100 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				40 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				5 Unit Usaha	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi</i>				35 Unit Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi</i>				20 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi</i>				175 Unit Usaha	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				15 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						9.112.884.525,00						-	5.550.000.000,00	
		[Meningkatnya Daya Saing UMKM]	Persentase UMKM yang dikembangkan	36.39	26.82	34.89	35.19	9.112.884.525,00	-	-	-	-	-	-	5.550.000.000,00	-
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	9.112.884.525,00			-	-	-	-	5.550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				850 Unit Usaha	5.589.505.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				250 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				15 Unit Usaha	1.623.379.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang														
			<i>Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi</i>				1 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			<i>Wirausaha yang Difasilitasi</i>				100 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				1 Unit Usaha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						17.569.415.709,28							16.638.144.544,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.509.415.709,28							16.598.144.544,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						17.509.415.709,28							16.598.144.544,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.459.415.709,28						-	15.528.144.544,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya akuntabilit as kinerja DPMTSP]	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMTSP Indeks Profesionalisme SDM DPMTSP Nilai SAKIP DPMTSP	4.8 87.68 BB	- 3.48 BB	3.74 86.03 BB	4 86.36 BB	15.459.415.709,28	-	-	-	-	-	-	15.528.144.544,00	-
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.576.415.709,28			-	-	-	-	13.815.309.737,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	13.051.919.709,28	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.297.813.737,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	467.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		467.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.165.193,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	85.165.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	364.660.000,00			-	-	-	-	289.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	11.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	833.174.807,00			-	-	-	-	833.174.807,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	324.877.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		324.877.247,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	460.297.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		460.297.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						530.000.000,00						-	210.000.000,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	20	100	16	16	530.000.000,00	-	-	-	-	-	-	210.000.000,00	-
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-			-	330.000.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						250.000.000,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	20	100	16	16	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				1 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						820.000.000,00						-	490.000.000,00	
		[Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko]	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	20	100	16	16	820.000.000,00	-	-	-	-	-	-	490.000.000,00	-
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	240.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				500 Pelaku Usaha	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah				10 Kegiatan usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	580.000.000,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				30 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				14 Kegiatan Usaha	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						330.000.000,00						-	160.000.000,00	
		[Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal]	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	20	100	16	16	330.000.000,00	-	-	-	-	-	-	160.000.000,00	-
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	330.000.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan usaha	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				4 Kegiatan usaha	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				40 Pelaku Usaha	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						120.000.000,00						-	60.000.000,00	
		[Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal]	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	20	5	16	16	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	X	NON URUSAN						60.000.000,00							40.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						60.000.000,00							40.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						60.000.000,00						-	40.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						42.102.489.592,86							36.845.518.709,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.102.489.592,86							36.845.518.709,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						42.102.489.592,86							36.845.518.709,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.494.487.163,00						-	16.087.392.709,00	
		[Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,30 76 88	74,30 76 80	74,30 76 80	74,30 77 80	16.494.487.163,00	-	-	-	-	-	-	16.087.392.709,00	-
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Laporan	267.351.151,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	92.351.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			25 Laporan	13.425.143.388,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	9.774.961.036,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1232 Orang/ Bulan	12.622.759.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		8.972.577.036,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	768.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		768.384.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		34.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	233.075.688,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		233.075.688,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			2 Laporan	85.000.000,00			-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				4 0	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			63 Paket	690.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	667.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		67.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	-			3 Jumlah	800.264.851,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	1.200.264.851,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.264.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		400.264.851,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			40 Laporan	326.727.773,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	2.832.091.134,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	51.727.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		2.532.091.134,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			13 Unit	800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	1.020.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2.028.849.999,86						-	6.650.000.000,00	
		[Meningkatnya Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi]	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.32	0.17	0.21	0.23	2.028.849.999,86	-	-	-	-	-	-	6.650.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-			249 Orang	1.428.849.999,86			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA	-	6.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				4 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				30 Persentase	198.849.999,86	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	PEMUDA		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	Rasio Wirausaha Pemuda	3.65	0.38	1.47	1.89	2.028.849.999,86	-	-	-	-	-	-	6.650.000.000,00	-
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				175 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	PEMUDA		400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi]	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.32	0.17	0.21	0.23	2.028.849.999,86	-	-	-	-	-	-	6.650.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan pemberdayaan dan Pengembangan	-			6 Organisasi	600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA	-	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				80 Persentase	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				4 Organisasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	PEMUDA		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						22.379.152.430,00						-	13.108.126.000,00	
		[Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda]	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16.30	2.69	4.20	7.98	22.379.152.430,00	-	-	-	-	-	-	13.108.126.000,00	-
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Muda yang dilakukan pembinaan dan pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-			80 %	4.651.472.430,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OLAHRAGA	-	4.358.126.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				2 Unit	2.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OLAHRAGA		2.210.656.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	0.76	0.76	0.61	0.76	22.379.152.430,00	-	-	-	-	-	-	13.108.126.000,00	-
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				8 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OLAHRAGA		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				2 Unit	1.751.472.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	OLAHRAGA		2.047.470.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet yang di kirimkan ke kejuaraan Olahraga	-			91 Orang	3.977.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET	-	2.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				50 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ATLET		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	ATLET		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				5 Kegiatan	2.827.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	-			95 Orang	650.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET	-	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Terlaksananya Pembinaan Atlet Muda]	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16.30	2.69	4.20	7.98	22.379.152.430,00	-	-	-	-	-	-	13.108.126.000,00	-
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	0.76	0.76	0.61	0.76	22.379.152.430,00	-	-	-	-	-	-	13.108.126.000,00	-
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				2 Pelatda	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ATLET		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang di lakukan Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga	-			2 Organisasi	13.100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ORGANISASI OLAHRAGA	-	5.650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				2 Dokumen	13.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ORGANISASI OLAHRAGA		5.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ORGANISASI OLAHRAGA		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						1.200.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		[Meningkatnya Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan]	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan	9.63	9.63	9.63	9.63	1.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepramukaan	-			9.63 %	1.200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	KEPRAMUKAAN	-	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	KEPRAMUKAAN		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi														
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	KEPRAMUKAAN		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN						17.479.167.808,78							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.692.756.673,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						15.692.756.673,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						11.906.325.673,00						-	0,00	
		[Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 88 88.3	70-80 86 88.3	70-80 86 88.3	70-80 86.5 88.3	11.906.325.673,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	185.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.018.825.673,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	9.593.185.673,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	425.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	13.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	814.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	789.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.305.000.000,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	1.305.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	465.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan]	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1.89 37.08 9.85	1.66 23.60 6.93	1.69 25.84 7.30	1.73 28.09 7.66	1.305.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				2 Objek	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				1 Kegiatan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina				1 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	275.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				26 Objek	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				7 Sertifikat	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	565.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						1.331.431.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional]	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.3	0.13	0.15	0.18	1.331.431.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.331.431.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				1 Sertifikat	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	1.146.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						105.000.000,00						-	0,00	
		[Menigkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah]	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/ sederajat tentang sejarah lokal Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah	1.76 66.67	0	0 0.29	0.59 13.33	105.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	105.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				40 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						845.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Warisan Budaya yang dilestarikan]	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase cagar budaya yang dilestarikan	13.89 64.40	41.76 5.90	45.53 6.94	49.31 8.33	845.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	85.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda														
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan				14 Objek	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	760.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				2 Objek	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Orang	625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						200.000.000,00						-	0,00	
		[meningkatnya tata kelola museum]	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	20.59	9.25	11.14	13.03	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				200 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X	NON URUSAN						1.786.411.135,78							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.786.411.135,78							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.786.411.135,78						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	1.786.411.135,78	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	235.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	235.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.526.411.135,78			-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.481.411.135,78	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN						23.501.987.576,98							21.581.153.901,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.501.987.576,98							21.581.153.901,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						22.901.987.576,98							20.576.448.901,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.662.997.576,98						-	19.626.448.901,00	
		[Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.50 78.91 83.65	0 70.60 88.15	71.60 78.01 81.15	74.50 78.31 81.65	20.662.997.576,98	-	-	-	-	-	-	19.626.448.901,00	-
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	165.000.000,00			-	-	-	-	224.538.308,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		124.538.308,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.771.162.760,98			-	-	-	-	16.796.515.789,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ Bulan	17.333.922.760,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.327.770.565,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	417.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		438.745.224,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	459.609.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.464.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.073.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	20.662.997.576,98	-	-	-	-	-	-	19.626.448.901,00	-
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		[Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.50	0	71.60	74.50	20.662.997.576,98	-	-	-	-	-	-	19.626.448.901,00	-
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	78.91	70.60	78.01	78.31									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.65	88.15	81.15	81.65									
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.072.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	565.000.000,00			-	-	-	-	410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.196.834.816,00			-	-	-	-	1.177.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	291.834.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	360.000.000,00			-	-	-	-	358.284.954,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		157.034.954,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						2.023.990.000,00						-	665.000.000,00	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79.69 83.65	73.69 88.15	74.69 81.15	75.69 81.65	2.023.990.000,00	-	-	-	-	-	-	665.000.000,00	-
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	765.000.000,00			-	-	-	-	565.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				25 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				60 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				0 Perpustaka an	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi														
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				75.96 Nilai	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				76.24 Indeks	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustaka an	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustaka an	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.258.990.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Lokus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				3 Perpustaka an	1.108.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				1 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				1 Perpustaka an	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						215.000.000,00						-	285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno]	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	74.00	29.00	34.00	39.00	215.000.000,00	-	-	-	-	-	-	285.000.000,00	-
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				120 Eksemplar	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				0 Penerbit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				15 Entry	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				15 Naskah	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				6 Eksemplar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						600.000.000,00							1.004.705.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						600.000.000,00						-	675.000.000,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis]	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	37.00	22.94	26.22	26.32	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	675.000.000,00	-
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				100 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				30 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				41 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														
			Jumlah Orang yang diwawancarai				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				10 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				8 Pengguna	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						0,00						-	279.705.000,00	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	62.99	41.33	46.33	49.66	0,00	-	-	-	-	-	-	279.705.000,00	-
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-			-	0,00			-	-	-	-	129.705.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				0 Berkas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.705.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	279.705.000,00	-
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	62.99	41.33	46.33	49.66	0,00	-	-	-	-	-	-	279.705.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				0 Daftar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	279.705.000,00	-
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0,00						-	50.000.000,00	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup]	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0	2.00	0,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan				1 SOP	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI						233.548.000,00							477.006.750,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						233.548.000,00							477.006.750,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						233.548.000,00							477.006.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						203.548.000,00						-	457.006.750,00	
		[Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran]	-	-	-	-	-	203.548.000,00	-	-	-	-	-	-	457.006.750,00	-
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	48.512.200,00			-	-	-	-	158.006.750,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.187.600,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.920.400,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.512.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.143.200,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.183.400,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.072.150,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.297.800,00			-	-	-	-	106.500.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	66.297.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88.738.000,00			-	-	-	-	117.500.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	46.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.500.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						30.000.000,00						-	20.000.000,00	
		[Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							62.264.838.343,69						55.887.101.077,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						62.264.838.343,69							55.887.101.077,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						62.264.838.343,69							55.887.101.077,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.077.114.163,69						-	37.547.543.898,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	80 81.45 BB	80 80.13 BB	80 80.20 BB	80 80.53 BB	40.077.114.163,69	-	-	-	-	-	-	37.547.543.898,00	-
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	300.000.000,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	-	620.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah	-			100 %	37.866.498.502,36			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	-	34.667.498.674,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ Bulan	36.448.304.302,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		33.249.304.467,32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.418.194.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		1.418.194.206,68	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah	-			100 %	15.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	80.000.000,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				134 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	722.000.000,00			-	-	-	-	735.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	400.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	321.322.661,33			-	-	-	-	517.752.224,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	241.322.661,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		437.752.224,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	372.293.000,00			-	-	-	-	172.293.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	17.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.293.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						200.000.000,00						-	439.618.414,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	90	92	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	439.618.414,00	-
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak gas dan bumi yang ditetapkan	-			6 Dokumen	100.000.000,00			-	-	-	-	329.618.414,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				2684525,69 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		259.618.414,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/														
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen informasi alokasi ruang laut yang diterbitkan	-			48 Dokumen	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				50 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	-			50 Orang	50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha				1 Unit Usaha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						13.806.168.276,00						-	12.641.904.651,00	
		[Meningkatkan produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042,54	35255.75	31528197	316230,66	13.806.168.276,00	-	-	-	-	-	-	12.641.904.651,00	-
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Nelayan Yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan kenelayanan (BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan bantuan Usaha Kenelayanan Jumlah nelayan yang mendapatkan sertifikasi nelayan	-			32000 Orang 759 Orang 100 Orang	13.206.168.276,00			-	-	-	-	12.082.029.256,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Unit	6.768.192.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.768.192.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				4000 Unit	6.427.975.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.293.836.756,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	-			500 Dokumen	100.000.000,00			-	-	-	-	33.350.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				90 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.350.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-			1 Unit	500.000.000,00			-	-	-	-	526.524.595,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.524.595,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						7.481.555.904,00						-	4.118.034.114,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	7.481.555.904,00	-	-	-	-	-	-	4.118.034.114,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			30 Rekomendasi	10.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				30 Rekomendasi	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia Jumlah Pembudidaya yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya Luas Lahan pemanfaatan untuk pembudidayaan ikan	-			215 Unit 515 Orang 2 Ha	7.471.555.904,00			-	-	-	-	4.098.034.114,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.724.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1000 Unit	4.319.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.656.214.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				15 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.074.095.614,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1.531.703.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						350.000.000,00						-	600.000.000,00	
		[Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	90	95	90	90	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			3 Laporan	330.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				20 Hari Operasi	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				54 Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya	-			1 Laporan	20.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						350.000.000,00						-	540.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan]	Angka Konsumsi Ikan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	13900 44.41	19692.58 68.17	13400 40.61	13500 41.37	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	540.000.000,00	-
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi GMP yang diterbitkan bagi Unit Pengolah Ikan kecil dan menengah besar Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang mendapatkan Surat Keterangan Berusaha/SKPPHP	-			25 Rekomendasi 25 UPI	115.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				25 Rekomen dasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	-			2 Event/Kegi atan	100.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				2 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh sarana dan prasarana unit pengolahan ikan	-			15 Pelaku Usaha	135.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				2 Unit Usaha	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS						247.480.000,00							239.480.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						242.480.000,00							229.480.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						242.480.000,00							229.480.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						127.480.000,00						-	89.480.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	127.480.000,00	-	-	-	-	-	-	89.480.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	66.000.000,00			-	-	-	-	46.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			1 Unit	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	17.480.000,00			-	-	-	-	12.480.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.480.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	33.000.000,00			-	-	-	-	23.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				Rp 0 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						0,00						-	30.000.000,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	0	90	0,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						0,00						-	20.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	0,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				Rp 0 Rekomendasi	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Rp 0 Rekomendasi	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						115.000.000,00						-	80.000.000,00	
		[Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	90	95	90	90	115.000.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			3 Laporan	115.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				6 Hari Operasi	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				4 Kelompok Masyarakat	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya</i>	-			0 Laporan	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	X	NON URUSAN						5.000.000,00							10.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.000.000,00							10.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.000.000,00						-	10.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan</i>	-			100 %	5.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA						249.969.160,00							256.969.160,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						249.969.160,00							256.969.160,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						249.969.160,00							256.969.160,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						99.969.160,00						-	111.969.160,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	99.969.160,00	-	-	-	-	-	-	111.969.160,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	45.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	25.969.160,00			-	-	-	-	25.969.160,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.969.160,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.969.160,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	18.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						0,00						-	30.000.000,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	0	90	0,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	-			0 Rekomend asi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				Rp 0 Rekom endasi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			0 Rekomend asi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomend asi	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						150.000.000,00						-	95.000.000,00	
		[Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	90	95	90	90	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	95.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			2 Laporan	150.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				3 Hari Operasi	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				12 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				11 Kelompok Masyarakat	105.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya</i>	-			0 Laporan	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA						250.178.000,00							247.738.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						250.178.000,00							247.738.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						250.178.000,00							247.738.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						170.178.000,00						-	118.178.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	170.178.000,00	-	-	-	-	-	-	118.178.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	-			100 %	115.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	55.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	5.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	32.178.000,00			-	-	-	-	32.178.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.178.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.178.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	18.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						0,00						-	10.000.000,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	0	90	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil</i>	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan</i>	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>				Rp 0 Rekomendasi	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898.00	39899.26	42508.16	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						80.000.000,00						-	99.560.000,00	
		[Meningkatkan kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	90	95	90	90	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	99.560.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			2 Laporan	80.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				Rp 0 Hari Operasi	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				25 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				2 Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya	-			0 Laporan	0,00			-	-	-	-	9.560.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				Rp 0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.560.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN						285.063.936,00							352.063.936,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						285.063.936,00							352.063.936,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						285.063.936,00							352.063.936,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						145.063.936,00						-	142.063.936,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	145.063.936,00	-	-	-	-	-	-	142.063.936,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	47.000.000,00			-	-	-	-	47.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	58.000.000,00			-	-	-	-	54.063.936,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.063.936,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	29.063.936,00			-	-	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	16.063.936,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						0,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						25.000.000,00						-	20.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	-			100 Rekomendasi	25.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				100 Rekomendasi	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						115.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	90	95	90	90	115.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			2 Laporan	115.000.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				0 Hari Operasi	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				15 Pelaku Usaha	115.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				19 Kelompok Masyarakat	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya	-			0 Laporan	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM						296.135.000,00							378.135.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						296.135.000,00							378.135.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						296.135.000,00							378.135.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						176.135.000,00						-	173.135.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	176.135.000,00	-	-	-	-	-	-	173.135.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	50.135.000,00			-	-	-	-	47.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	17.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33.135.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	72.000.000,00			-	-	-	-	65.135.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.135.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	43.000.000,00			-	-	-	-	53.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						0,00						-	30.000.000,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	87.81	90	0,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						20.000.000,00						-	20.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	-			100 Rekomendasi	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				100 Rekomendasi	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						0,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	0,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			0 Rekomendasi	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Rekomendasi	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						100.000.000,00						-	145.000.000,00	
		[Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	90	95	90	90	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	145.000.000,00	-
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	-			3 Laporan	100.000.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				4 Hari Operasi	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				30 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				11 Kelompok Masyarakat	40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang diawasi kepatuhannya	-			0 Laporan	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
		UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI						471.000.000,00							548.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						471.000.000,00							548.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						471.000.000,00							548.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						421.000.000,00						-	438.000.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	421.000.000,00	-	-	-	-	-	-	438.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	-			100 %	34.000.000,00			-	-	-	-	44.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</i>	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia</i>	-			100 %	348.000.000,00			-	-	-	-	348.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	348.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		348.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan</i>	-			100 %	28.000.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						50.000.000,00						-	110.000.000,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	320042.54	335255.75	315281.97	316230.67	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	-
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan	-			300 Layanan	50.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				3 Layanan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
		UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)						205.000.000,00							364.300.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						205.000.000,00							364.300.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						205.000.000,00							364.300.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						155.000.000,00						-	169.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	155.000.000,00	-	-	-	-	-	-	169.300.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	30.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	0,00			-	-	-	-	8.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	85.000.000,00			-	-	-	-	83.300.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.300.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	40.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						50.000.000,00						-	195.000.000,00	
		[Meningkatkan produksi Olahan Hasil Perikanan]	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	13900	1969.58	13400	13500	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	195.000.000,00	-
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang diuji kelayakan mutu produk (labor)	-			25 Unit Usaha	50.000.000,00			-	-	-	-	195.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				2 Kegiatan	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Kegiatan	25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
		UPTD BALAI BENIH IKAN						534.000.000,00							1.451.361.250,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						534.000.000,00							1.451.361.250,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						534.000.000,00							1.451.361.250,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						384.000.000,00						-	376.000.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	384.000.000,00	-	-	-	-	-	-	376.000.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	24.000.000,00			-	-	-	-	44.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	11.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	11.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	189.000.000,00			-	-	-	-	189.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	189.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		-	-	-	-	-	-	384.000.000,00	-	-	-	-	-	-	376.000.000,00	-
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	160.000.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	384.000.000,00	-	-	-	-	-	-	376.000.000,00	-
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						150.000.000,00						-	1.075.361.250,00	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	54806.00	39898	39899.26	42508.16	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.075.361.250,00	-
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah ketersediaan benih bermutu di UPTD BBI Jumlah ketersediaan induk unggul di UPTD BBI	-			50000 Ekor 100 Ekor	150.000.000,00			-	-	-	-	1.075.361.250,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				7 Unit	150.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.361.250,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN						137.300.000,00							348.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						137.300.000,00							348.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						137.300.000,00							348.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						87.300.000,00						-	148.000.000,00	
		[Meingkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran]	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	0	80	80	87.300.000,00	-	-	-	-	-	-	148.000.000,00	-
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	35.300.000,00			-	-	-	-	57.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.300.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	20.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	-			100 %	25.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	-			100 %	7.000.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						50.000.000,00						-	200.000.000,00	
		[Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah]	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	98	75	87.81	90	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kunjungan di kawasan konservasi	-			54.000 Orang	50.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				2684525,69 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	UPTD PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
		DINAS PARIWISATA						24.166.938.329,94							29.415.236.756,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						24.166.938.329,94							29.415.236.756,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						24.166.938.329,94							29.415.236.756,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.626.938.329,94						-	15.230.799.056,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	83.80 89.00 BB	0.00 88.86 BB	83.46 88.50 BB	83.58 88.60 BB	15.626.938.329,94	-	-	-	-	-	-	15.230.799.056,00	-
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	200.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.181.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.818.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	-			100 %	13.065.446.601,94			-	-	-	-	11.126.500.065,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	12.541.654.601,93	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.602.708.065,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	513.792.000,01	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		513.792.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	375.400.000,00			-	-	-	-	409.825.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	275.400.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		309.825.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.052.031.680,00			-	-	-	-	1.182.000.051,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	112.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		242.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	790.031.680,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		640.000.051,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	-			10 Unit	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	436.251.728,00			-	-	-	-	1.714.665.620,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.760.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.760.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	357.491.728,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.593.905.620,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Kebutuhan	-			100 %	297.808.320,00			-	-	-	-	297.808.320,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	111.224.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		111.224.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	145.074.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.074.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	41.510.320,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.510.320,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						660.000.000,00						-	1.150.000.000,00	
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.90 2.15	1.64 1.89	1.65 1.90	1.70 1.95	660.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000,00	-
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	-			2 Daya Tarik	310.000.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Lokasi	140.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				7 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	-			2 Kawasan Strategis	200.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	-			1 Destinasi	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Lokasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-			10 Industri	50.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				40 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						6.464.000.000,00						-	10.019.437.700,00	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	2501.8 3606151	1667.1 3491947	1783.8 2239136	1908.6 2463050	6.464.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.019.437.700,00	-
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	-			7 Promosi	6.464.000.000,00			-	-	-	-	10.019.437.700,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen	1.164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.134.718.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				15 Kegiatan	5.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.634.719.700,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						800.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
		[Meningkatkan Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif]	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	14.08	2.22	4.65	6.54	800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000,00	-
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarananya	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-			1 Dokumen	600.000.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif														
			Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif				2 Promosi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						616.000.000,00						-	1.815.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19.61	7.61	9.61	11.61	616.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.815.000.000,00	-
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	-			265 Orang	616.000.000,00			-	-	-	-	1.440.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				240 Orang	466.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasit Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasit Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kapasitasnya	-			0 Orang	0,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						21.108.976.313,42							29.397.719.357,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						21.108.976.313,42							29.397.719.357,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						21.108.976.313,42							29.397.719.357,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.528.361.313,42						-	14.370.100.000,00	
		[Meningkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah SAKIP Perangkat Daerah Dinas ESDM	71.80 87.8 90	71.50 85.73 87.35	71.55 87 87.55	71.60 87.5 87.65	14.528.361.313,42	-	-	-	-	-	-	14.370.100.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	-			1 Dokumen	170.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangat Daerah	-	430.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangat Daerah		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangat Daerah		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangat Daerah		180.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	12.172.561.313,42			-	-	Pegawai ASN Dinas ESDM	-	12.150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	11.782.561.313,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai ASN Dinas ESDM		11.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai ASN Dinas ESDM		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai ASN Dinas ESDM		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	244.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas ESDM	-	335.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	144.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas ESDM		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas ESDM		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas ESDM		85.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	521.000.000,00			-	-	Barang milik daerah, pegawai dinas ESDM dan Pemerintah Kab/Kota	-	710.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang milik daerah, pegawai dinas ESDM dan Pemerintah Kab/Kota		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang milik daerah, pegawai dinas ESDM dan Pemerintah Kab/Kota		20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang milik daerah, pegawai dinas ESDM dan Pemerintah Kab/Kota		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	428.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang milik daerah, pegawai dinas ESDM dan Pemerintah Kab/Kota		600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	980.800.000,00			-	-	Aset Dinas ESDM	-	265.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	813.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		145.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	42.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		45.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		25.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			1 Dokumen	185.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas ESDM	-	110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas ESDM		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	151.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas ESDM		80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	-			100 %	255.000.000,00			-	-	Aset Dinas ESDM	-	370.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		190.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset Dinas ESDM		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						300.000.000,00						-	1.246.830.000,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Kegeologian]	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	95.45	13.64	18.18	27.27	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.246.830.000,00	-
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen cekungan air tanah yang dievaluasi</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kab/Kota	-	976.830.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kab/Kota		130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kab/Kota		746.830.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pengguna air tanah	-	270.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pengguna air tanah		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pengguna air tanah		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						1.055.800.000,00						-	2.000.000.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara]	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	68	55	57	59	1.055.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-			1 Dokumen	105.800.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha pertambangan	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	105.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha pertambangan	-	225.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat														
			Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha pertambangan		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	-			1 Dokumen	80.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Kab/Kota dan Pelaku usaha pertambangan	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Kab/Kota dan Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Kab/Kota dan Pelaku usaha pertambangan		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan</i>	-			1 Dokumen	820.000.000,00			-	-	Pelaku usaha pertambangan	-	1.225.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan</i>				1 Laporan	620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan		800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan		425.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						2.320.000.000,00						-	5.300.000.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan]	Intensitas energi primer Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	141 20.2	- 15.43	140 15.4	140 15.8	2.320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.300.000.000,00	-
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-			1 Dokumen	2.020.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya	-	3.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				229 unit	1.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		2.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT														
			<i>Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara</i>				1 unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</i>	-			1 Laporan	200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aset Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	-	1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aset Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau		1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						2.904.815.000,00						-	6.480.789.357,00	
		[Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan]	Rasio Elektrifikasi	99.55	98.19	98.80	99.20	2.904.815.000,00	-	-	-	-	-	-	6.480.789.357,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan	-	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku usaha ketenagalistrikan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-			1 Dokumen	2.754.815.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya	-	5.730.789.357,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				460 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan															
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				467 Unit	2.574.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		5.130.789.357,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							30.419.874.991,00							31.521.226.796,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						30.089.874.991,00							31.120.032.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						21.103.474.991,00							27.020.032.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.963.474.991,00						-	20.320.032.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan]	Nilai SAKIP Disperindag	BB	BB	BB	BB	17.963.474.991,00	-	-	-	-	-	-	20.320.032.000,00	-
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.522.431,00			-	-	-	-	17.475.032.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/ Bulan	14.540.522.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		475.032.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.740.000.000,00			-	-	-	-	1.350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	412.952.560,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	112.952.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						100.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	100	0	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						600.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Fasilitas Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	100	0	100	100	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				4 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi														
			Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						252.251.000,00						-	2.400.000.000,00	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10	5.65	10	10	252.251.000,00	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000,00	-
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	252.251.000,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	132.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				0 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor	100	100	100	100	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				6 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				2 Produk	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.100.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	Indeks Tertib Niaga	61.80	61.5	61.80	61.80	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	-
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				2 BPSK	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						387.749.000,00						-	900.000.000,00	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	100	0	100	100	387.749.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	-
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	387.749.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>				2 Laporan	387.749.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						8.986.400.000,00							4.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						8.686.400.000,00						-	3.500.000.000,00	
		[Meningkatkan Realisasi Pembangunan Industri]	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	7 91,16	6,64 87.12	7 89,31	7 91,16	8.686.400.000,00	-	-	-	-	-	-	3.500.000.000,00	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	8.686.400.000,00			-	-	-	-	3.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2.886.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						100.000.000,00						-	400.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100	0	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						200.000.000,00						-	200.000.000,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	1	1	1	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X	NON URUSAN						330.000.000,00							401.194.796,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						330.000.000,00							401.194.796,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						330.000.000,00						-	401.194.796,00	
		-	-	-	-	-	-	330.000.000,00	-	-	-	-	-	-	401.194.796,00	-
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.000.000,00			-	-	-	-	326.194.796,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.194.796,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							2.800.000.000,00						5.848.325.825,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.800.000.000,00							5.848.325.825,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.800.000.000,00							5.848.325.825,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.515.000.000,00						-	3.386.514.111,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.25 A (82.50) Tinggi (81-90)	84.65 A (80.65) Sedang (71-80)	84.90 A (80.85) Sedang (71-80)	85.15 A (81.25) Sedang (71-80)	1.515.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.386.514.111,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	386.000.000,00			-	-	-	-	685.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		410.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	750.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.700.000,00			-	-	-	-	1.016.514.111,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		941.514.111,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	208.300.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	700.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						1.285.000.000,00						-	2.461.811.714,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah]	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan Skor LPPD	100 2,75	2,61 70	2,61 70	2,61 80	1.285.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.461.811.714,00	-
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan	-			3 Dokumen	410.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			0				0 0	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan Otonomi daerah yang difasilitasi	-			90 Persen	400.000.000,00			-	-	-	-	595.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			0				0 0	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah pelayanan publik yang dievaluasi	-			90 Persen	475.000.000,00			-	-	-	-	1.016.811.714,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		541.811.714,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				3 Dokumen	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO ORGANISASI						2.042.649.166,00							2.984.582.253,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.042.649.166,00							2.984.582.253,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.042.649.166,00							2.984.582.253,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.042.649.166,00						-	2.144.582.253,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.25 A (82.50) Tinggi (81-90)	84.65 A (80.65) Sedang (71-80)	84.90 A (80.85) Sedang (71-80)	85.15 A (81.25) Sedang (71-80)	1.042.649.166,00	-	-	-	-	-	-	2.144.582.253,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	161.220.876,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.220.876,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	423.702.054,00			-	-	-	-	565.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.876.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.905.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	71.005.946,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	21.005.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				0 0	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.941.166,00			-	-	-	-	573.361.377,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	46.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	42.649.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		488.361.377,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.000.000.000,00						-	840.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah]	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General	100 12.30 2.25 43.5	- 11.77 1.75 38.2	11.89 2.17 39.2 79.07	11.90 2.17 40.4 83.72	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	840.000.000,00	-
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	399.000.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	133.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	133.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	133.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	601.000.000,00			-	-	-	-	615.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	134.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	134.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.850.000.000,00							3.404.133.981,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.850.000.000,00							3.404.133.981,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.850.000.000,00							3.404.133.981,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.938.526.203,00						-	2.025.408.932,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81-90 82.50 86.25	71-80 80.65 84.65	71-80 80.85 84.90	71-80 81.25 85.15	1.938.526.203,00	-	-	-	-	-	-	2.025.408.932,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	170.882.603,00			-	-	-	-	207.650.096,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	103.629.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		132.650.096,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	67.253.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	99.000.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	437.143.600,00			-	-	-	-	658.950.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		123.950.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	97.143.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	206.500.000,00			-	-	-	-	242.483.788,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		126.983.788,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.000.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	416.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		416.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						693.440.297,00						-	782.323.891,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan]	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	100	90	100	100	693.440.297,00	-	-	-	-	-	-	782.323.891,00	-
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-			-	229.997.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	77.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	92.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	75.612.000,00			-	-	-	-	191.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	75.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	387.831.297,00			-	-	-	-	340.998.843,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	46.141.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.998.843,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	31.690.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						218.033.500,00						-	596.401.158,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	100	95	100	100	218.033.500,00	-	-	-	-	-	-	596.401.158,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	158.033.500,00			-	-	-	-	311.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	117.936.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	40.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.325.048,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	285.076.110,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.076.110,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		BIRO UMUM						198.037.245.042,09							188.265.153.621,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						198.037.245.042,09							188.265.153.621,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						198.037.245.042,09							188.265.153.621,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						198.037.245.042,09						-	188.265.153.621,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81-90 82.50 86.25	71-80 80.65 84.65	71-80 80.85 84.90	71-80 81.25 85.15	198.037.245.042,09	-	-	-	-	-	-	188.265.153.621,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persentase	197.987.680,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	197.987.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persentase	111.240.757.300,09			-	-	-	-	84.580.286.244,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1015 Orang/ Bulan	107.500.000.000,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.715.636.544,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3.565.757.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.053.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.596.300,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persentase	691.707.132,00			-	-	-	-	952.643.781,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	562.422.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		690.464.831,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	129.284.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		97.178.950,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persentase	167.259.680,00			-	-	-	-	475.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	167.259.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persentase	21.023.159.925,00			-	-	-	-	19.433.415.660,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.679.702.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.713.415.660,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	74.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.563.807.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	208.149.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	47.540.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.775.861.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	598.165.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	74.986.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persentase	11.470.982.459,00			-	-	-	-	24.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				95 Unit	10.547.440.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	923.542.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persentase	29.795.011.263,00			-	-	-	-	36.553.807.936,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	106.913.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.199.052.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.668.797.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.820.247.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.328.807.936,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persentase	9.932.164.641,00			-	-	-	-	11.525.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				38 Unit	499.989.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				189 Unit	3.270.143.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				250 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	1.339.910.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		625.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	3.717.120.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.800.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 Persentase	4.692.921.199,00			-	-	-	-	4.645.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	1.635.123.083,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.650.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	369.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/ Bulan	2.687.800.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.725.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 Persentase	7.675.995.570,00			-	-	-	-	4.850.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	3.498.138.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	2.398.094.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.779.762.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		950.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-			100 Persentase	1.149.298.193,00			-	-	-	-	450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1.149.298.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
		BIRO HUKUM						2.052.314.677,33							5.394.127.765,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.052.314.677,33							5.394.127.765,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.052.314.677,33							5.394.127.765,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						852.314.677,33						-	3.269.127.765,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.90 86.25 A (82.50)	71.80 84.65 A (80.65)	71.80 84.90 A (80.85)	71.80 85.15 A (81.25)	852.314.677,33	-	-	-	-	-	-	3.269.127.765,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	275.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				2 0	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	365.000.000,00			-	-	-	-	659.008.430,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.008.430,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	1.350.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.050.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.314.677,33			-	-	-	-	600.119.335,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	52.314.677,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		435.119.335,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	-	-	-	305.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1.200.000.000,00						-	2.125.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan]	Indeks Reformasi Hukum Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan	100 97.50	95	95 97	96 97	1.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.125.000.000,00	-
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-			-	660.000.000,00			-	-	-	-	1.075.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			0				0 0	230.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				2250 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		325.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				30 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				101 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			-	540.000.000,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				6 Kasus	340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						81.642.754.400,00							85.082.583.337,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						81.642.754.400,00							85.082.583.337,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						81.642.754.400,00							85.082.583.337,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.008.448.906,00						-	2.032.236.539,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81-90 82.50 86.25	71-80 80.65 84.65	71-80 80.85 84.90	71-80 81.25 85.15	1.008.448.906,00	-	-	-	-	-	-	2.032.236.539,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	86.337.800,00			-	-	-	-	225.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	28.299.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	27.431.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30.606.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	64.546.100,00			-	-	-	-	220.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	49.602.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	14.943.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	317.059.614,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47.654.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	269.405.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	304.856.680,00			-	-	-	-	462.236.539,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111.143.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	193.712.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		347.236.539,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.648.712,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	225.648.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						80.634.305.494,00						-	83.050.346.798,00	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat]	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	95	-	90	91	80.634.305.494,00	-	-	-	-	-	-	83.050.346.798,00	-
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	69.834.541.594,00			-	-	-	-	72.610.588.122,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				748 Unit	47.842.307.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.350.893.180,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	21.992.234.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.259.694.942,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	10.589.433.000,00			-	-	-	-	10.034.758.676,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	10.449.212.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.764.758.676,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	70.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	70.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	210.330.900,00			-	-	-	-	405.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	70.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	70.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	70.110.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						6.994.395.580,00							13.644.992.731,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.694.395.580,00							12.494.992.731,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.694.395.580,00							12.494.992.731,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6.694.395.580,00						-	12.494.992.731,00	
		[Meningkatkan Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.25 A (82.50) Tinggi (81-90)	84.65 A (80.65) Sedang (71-80)	84.90 A (80.85) Sedang (71-80)	85.15 A (81.25) Sedang (71-80)	6.694.395.580,00	-	-	-	-	-	-	12.494.992.731,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	505.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	700.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	970.000.000,00			-	-	-	-	1.375.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	144.395.580,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.050.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	144.395.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	860.000.000,00			-	-	-	-	3.649.992.731,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.249.992.731,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.000.000,00			-	-	-	-	265.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	2.800.000.000,00			-	-	-	-	3.800.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		950.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	X	NON URUSAN						300.000.000,00							1.150.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						300.000.000,00							1.150.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000,00	-
	X.XX.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	1.150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	X.XX.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA						2.033.548.000,00							5.672.964.574,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.939.948.000,00							5.362.964.574,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.939.948.000,00							5.362.964.574,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.399.948.000,00						-	3.687.964.574,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaun Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.25 A (82.50) Tinggi (81-90)	84.65 A (80.65) Sedang (71-80)	84.90 A (80.85) Sedang (71-80)	85.15 A (81.25) Sedang (71-80)	1.399.948.000,00	-	-	-	-	-	-	3.687.964.574,00	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	259.800.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	114.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	683.922.152,00			-	-	-	-	680.483.467,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.811.467,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.672.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	408.922.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.050.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.225.848,00			-	-	-	-	982.481.107,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	91.225.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		867.481.107,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						540.000.000,00						-	1.675.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.675.000.000,00	-
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	525.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X	NON URUSAN						93.600.000,00							310.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						93.600.000,00							310.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						93.600.000,00						-	310.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	93.600.000,00	-	-	-	-	-	-	310.000.000,00	-
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.600.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
		SEKRETARIAT DPRD						118.241.334.861,97							142.726.065.251,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						118.241.334.861,97							142.726.065.251,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						118.241.334.861,97							142.726.065.251,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						76.111.334.861,97						-	83.689.719.159,00	
		[Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD]	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Dengan Satuan: Skor)	72.40 80 85	72.35 76 82.27	72.36 78 83	72.38 80 83.5	76.111.334.861,97	-	-	-	-	-	-	83.689.719.159,00	-
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	390.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	90.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.009.532.594,97			-	-	-	-	30.393.598.828,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				356 Orang/ Bulan	26.909.532.594,97	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.243.598.828,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				19 Dokumen	800.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	440.000.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.050.000.000,00			-	-	-	-	8.370.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	400.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.253.972.928,00			-	-	-	-	6.498.290.992,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.020.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	233.972.928,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.998.290.992,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.650.000.000,00			-	-	-	-	4.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	3.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	30.617.829.339,00			-	-	-	-	32.667.829.339,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	30.297.829.339,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.197.829.339,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	170.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			-				-	100.000.000,00	-	-	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						42.130.000.000,00						-	59.036.346.092,00	
		[Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif]	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100	100	100	42.130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	59.036.346.092,00	-
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	760.000.000,00			-	-	Pansun DPRD dan OPD	-	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pansun DPRD dan OPD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				4 Dokumen	300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pansun DPRD dan OPD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pansun DPRD dan OPD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pansun DPRD dan OPD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	6.096.000.000,00			-	-	-	-	6.196.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				36 Orang	2.592.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.592.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	504.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		504.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	25.100.000.000,00			-	-	-	-	25.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	25.000.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	10.074.000.000,00			-	-	-	-	26.640.346.092,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	8.354.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.390.346.092,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				2 Laporan	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	120.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						35.097.541.514,94							35.752.123.371,02	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						35.097.541.514,94							35.752.123.371,02	
	5.01	PERENCANAAN						33.827.541.514,94							34.647.123.371,02	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.446.169.976,13						-	28.362.404.716,22	
		[Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau]	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	80.98 93.00 A	78.23 90.093 BB	78.48 90.50 BB	78.98 91.00 A	27.446.169.976,13	-	-	-	-	-	-	28.362.404.716,22	-
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	425.000.000,00			-	-	-	-	375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	23.658.812.491,78			-	-	-	-	24.345.154.728,22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/ Bulan	22.895.492.491,78	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.696.834.728,22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	613.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		613.320.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	555.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.319.481.372,35			-	-	-	-	1.537.522.112,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	689.481.372,35	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		822.522.112,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	135.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	657.876.112,00			-	-	-	-	580.876.112,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	374.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		242.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	218.876.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		218.876.112,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	695.000.000,00			-	-	-	-	973.851.764,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		168.851.764,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						3.150.000.000,00						-	3.002.328.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah]	Capaian Kinerja Program RPJMD Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	3.150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.002.328.000,00	-
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai regulasi dan ditetapkan dengan peraturan	-			5 Dokumen	1.350.000.000,00			-	-	-	-	1.975.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		425.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			2 Dokumen	800.000.000,00			-	-	-	-	227.328.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.328.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				200 Buku	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			14 Dokumen 12 Laporan	1.000.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				14 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.231.371.538,81						-	3.282.390.654,80	
		[Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah]	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintaan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	100	0	100	100	3.231.371.538,81	-	-	-	-	-	-	3.282.390.654,80	-
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			2 Dokumen 6 Laporan	1.055.058.850,00			-	-	-	-	1.127.450.409,80	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	79.011.770,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.745.041,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	90.814.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.294.049,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	79.011.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.745.041,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	206.221.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.941.073,80	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		563.725.205,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-			2 Dokumen 3 Laporan	1.159.015.749,81			-	-	-	-	1.061.304.245,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	359.015.749,81	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.304.245,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			1 Dokumen 4 Laporan	1.017.296.939,00			-	-	-	-	1.093.636.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		268.636.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	227.296.939,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.270.000.000,00							1.105.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						920.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		[Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah]	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	920.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i> <i>Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	-			1 Dokumen 2 Laporan	470.000.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			1 Laporan	250.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						350.000.000,00						-	105.000.000,00	
		[Meningkatkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan]	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	105.000.000,00	-
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-			1 Dokumen	350.000.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				1 Naskah	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						618.926.602.271,77							630.732.823.426,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						618.926.602.271,77							630.732.823.426,00	
	5.02	KEUANGAN						618.926.602.271,77							630.732.823.426,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.818.056.688,77						-	45.050.702.153,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.68 94 BB	0 88.531 BB	83.11 90 BB	83.31 91 BB	40.818.056.688,77	-	-	-	-	-	-	45.050.702.153,00	-
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	570.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	36.681.784.403,44			-	-	-	-	39.505.702.153,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				218 Orang/ Bulan	27.377.546.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.503.830.653,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	9.194.237.457,44	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.821.871.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				218 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.480.000.000,00			-	-	-	-	1.810.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	666.272.285,33			-	-	-	-	830.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	366.272.285,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	890.000.000,00			-	-	-	-	1.185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						576.568.545.583,00						-	581.752.121.273,00	
		[Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah]	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100 92.94	100 91.51	100 91.68	100 91.96	576.568.545.583,00	-	-	-	-	-	-	581.752.121.273,00	-
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	2.150.000.000,00			-	-	-	-	4.540.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				40 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	930.000.000,00			-	-	-	-	1.880.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				7 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>				7 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				7 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi</i>				7 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	740.000.000,00			-	-	-	-	1.620.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				3 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.110.000.000,00			-	-	-	-	2.460.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				95 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				21 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	571.438.545.583,00			-	-	-	-	570.502.121.273,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	29.586.596.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.112.243.757,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	21.365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.395.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4 Laporan	505.386.949.303,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		509.994.877.516,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				129 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1.540.000.000,00						-	3.930.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3	0	3	3	1.540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.930.000.000,00	-
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.540.000.000,00			-	-	-	-	3.930.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPT DANA BERGULIR						230.000.000,00							480.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						230.000.000,00							480.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						230.000.000,00							480.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						80.000.000,00						-	80.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.68 94 BB	0 88.531 BB	83.11 90 BB	83.31 91 BB	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	-
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		80.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						150.000.000,00						-	400.000.000,00	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah]	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Daerah]	100	100	100	100	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	UPT DANA BERGULIR
		UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET						820.000.000,00							1.226.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						820.000.000,00							1.226.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						820.000.000,00							1.226.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						820.000.000,00						-	1.226.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.68 94 BB	0 88.531 BB	83.11 90 BB	83.31 91 BB	820.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.226.000.000,00	-
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	290.000.000,00			-	-	-	-	376.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		60.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		166.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				1 0	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	520.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				0 0	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				0 0	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				0 0	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						88.844.545.724,65							100.251.285.432,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						88.844.545.724,65							100.251.285.432,00	
	5.02	KEUANGAN						88.844.545.724,65							100.251.285.432,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						83.539.545.724,65						-	93.581.285.432,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD Predikat SAKIP	17.16 87.31 89 A	10.30 84 84.25 BB	84 85.18 9.93 BB	12.83 85 85.69 BB	83.539.545.724,65	-	-	-	-	-	-	93.581.285.432,00	-
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			7 Dokumen	590.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	590.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				11 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				11 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		225.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	69.089.545.724,65			-	-	Perangkat Daerah	-	77.202.285.432,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				189 0	67.464.545.724,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		75.277.285.432,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		1.900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	-	-	-	139.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	645.000.000,00			-	-	-	-	645.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	335.000.000,00			-	-	-	-	335.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				139 Paket	135.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			11 Laporan	4.140.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	5.090.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	120.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	2.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		2.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	190.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		190.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Paket	2.200.000.000,00			-	-	-	-	2.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3 Paket	2.240.000.000,00			-	-	-	-	2.490.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	2.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	220.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3 Laporan	4.200.000.000,00			-	-	-	-	4.840.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	1.300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				105 Unit	400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		540.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				11 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.050.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						390.000.000,00						-	390.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan	95.00	87.84	91.00	92.00	390.000.000,00	-	-	-	-	-	-	390.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Realisasi Penerimaan dana Transfer dibandingkan target tahun berjalan</i>	-			1 DOKUMEN 92 %	240.000.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				1 Dokumen	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	-			1 Dokumen	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						4.915.000.000,00						-	6.280.000.000,00	
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.371 100 2.32 30	0.554 100 20 27 8.96	0.444 100 20 27 -8.03	0.407 100 27 -3.41 35	4.915.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.280.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan</i>	-			14 Dokumen	4.915.000.000,00			-	-	-	-	6.280.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		360.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		930.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		415.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		285.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				1 Dokumen Surat Perset ujuan/Penola kan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		285.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BATAM CENTRE							2.789.700.000,00						3.749.700.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.789.700.000,00							3.749.700.000,00	
	5.02	KEUANGAN						2.789.700.000,00							3.749.700.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.414.700.000,00						-	1.919.700.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	1.414.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1.919.700.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	84.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	559.000.000,00			-	-	-	-	858.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		242.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136.700.000,00			-	-	-	-	201.700.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.700.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	63.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	635.000.000,00			-	-	-	-	825.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		790.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1.375.000.000,00						-	1.830.000.000,00	
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	1.375.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.830.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan</i>	-			5 Dokumen	1.375.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	1.830.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Sarana dan Prasarana	350.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		350.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	65.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		65.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	60.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		60.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	450.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		685.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		670.000.000,00	UPT PPD BATAM CENTRE
		UPT PPD TANJUNGPINANG						2.216.100.000,00							2.566.200.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.216.100.000,00							2.566.200.000,00	
	5.02	KEUANGAN						2.216.100.000,00							2.566.200.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.051.100.000,00						-	1.329.200.000,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	1.051.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1.329.200.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	33.600.000,00			-	-	-	-	26.500.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	33.600.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.500.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	473.000.000,00			-	-	-	-	603.200.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.200.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		290.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	234.500.000,00			-	-	-	-	311.500.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	220.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		302.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	388.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	175.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
		-	-	-	-	-	-	1.051.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1.329.200.000,00	-
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1.165.000.000,00						-	1.237.000.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	1.165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.237.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.165.000.000,00			-	-	-	-	1.237.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Sarana dan Prasarana	300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	400.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		645.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		167.000.000,00	UPT PPD TANJUNGPINANG
		UPT PPD BINTAN						1.538.000.000,00							1.508.850.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.538.000.000,00							1.508.850.000,00	
	5.02	KEUANGAN						1.538.000.000,00							1.508.850.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						798.000.000,00						-	1.015.350.000,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	798.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.015.350.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	24.500.000,00			-	-	-	-	64.350.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	24.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.350.000,00	UPT PPD BINTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	299.000.000,00			-	-	-	-	330.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	UPT PPD BINTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.500.000,00			-	-	-	-	180.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	175.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		217.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	35.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	UPT PPD BINTAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						740.000.000,00						-	493.500.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	740.000.000,00	-	-	-	-	-	-	493.500.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan</i>	-			5 Dokumen	740.000.000,00			-	-	-	-	493.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	150.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		140.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.500.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	UPT PPD BINTAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		108.000.000,00	UPT PPD BINTAN
		UPT PPD KARIMUN						1.514.250.000,00							1.369.886.800,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.514.250.000,00							1.369.886.800,00	
	5.02	KEUANGAN						1.514.250.000,00							1.369.886.800,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						769.250.000,00						-	872.886.800,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	769.250.000,00	-	-	-	-	-	-	872.886.800,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	256.750.000,00			-	-	-	-	369.136.800,00	UPT PPD KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.750.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		222.886.800,00	UPT PPD KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	296.500.000,00			-	-	-	-	293.750.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.750.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	282.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		282.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.000.000,00			-	-	-	-	185.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		102.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						745.000.000,00						-	497.000.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	745.000.000,00	-	-	-	-	-	-	497.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	745.000.000,00			-	-	-	-	497.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	155.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPT PPD KARIMUN
		UPT PPD LINGGA						875.417.000,00							815.553.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						875.417.000,00							815.553.000,00	
	5.02	KEUANGAN						875.417.000,00							815.553.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						395.417.000,00						-	400.553.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	395.417.000,00	-	-	-	-	-	-	400.553.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	7.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	191.750.000,00			-	-	-	-	182.750.000,00	UPT PPD LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.500.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.750.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	UPT PPD LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.756.000,00			-	-	-	-	77.238.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.481.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	70.256.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.256.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.501.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.911.000,00			-	-	-	-	133.565.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.201.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	14.911.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.911.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.453.000,00	UPT PPD LINGGA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						480.000.000,00						-	415.000.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	415.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	480.000.000,00			-	-	-	-	415.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	80.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	40.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	120.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	UPT PPD LINGGA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPT PPD LINGGA
		UPT PPD NATUNA						988.400.000,00							1.013.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						988.400.000,00							1.013.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						988.400.000,00							1.013.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						533.400.000,00						-	676.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	533.400.000,00	-	-	-	-	-	-	676.000.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.400.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	8.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	303.000.000,00			-	-	-	-	410.000.000,00	UPT PPD NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.500.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		278.000.000,00	UPT PPD NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.500.000,00			-	-	-	-	104.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118.500.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				9 Unit	8.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.500.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.500.000,00	UPT PPD NATUNA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						455.000.000,00						-	337.000.000,00	
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	455.000.000,00	-	-	-	-	-	-	337.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan</i>	-			5 Dokumen	455.000.000,00			-	-	-	-	337.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.000.000,00	UPT PPD NATUNA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD NATUNA
		UPT PPD ANAMBAS						804.000.000,00							686.700.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						804.000.000,00							686.700.000,00	
	5.02	KEUANGAN						804.000.000,00							686.700.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						384.000.000,00						-	354.700.000,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	384.000.000,00	-	-	-	-	-	-	354.700.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	213.000.000,00			-	-	-	-	242.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.500.000,00			-	-	-	-	68.700.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	62.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88.500.000,00			-	-	-	-	37.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						420.000.000,00						-	332.000.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	420.000.000,00	-	-	-	-	-	-	332.000.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	-			5 Dokumen	420.000.000,00			-	-	-	-	332.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD ANAMBAS
		UPT PPD BATU AJI						1.219.200.000,00							1.194.176.400,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.219.200.000,00							1.194.176.400,00	
	5.02	KEUANGAN						1.219.200.000,00							1.194.176.400,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						579.200.000,00						-	758.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	579.200.000,00	-	-	-	-	-	-	758.500.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.200.000,00			-	-	-	-	14.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	18.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	216.000.000,00			-	-	-	-	320.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				0 0	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	-	-	-	216.500.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			-				-	3.000.000,00	-	-	-	-	-		3.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	165.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.500.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	-	-	-	208.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		140.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						640.000.000,00						-	435.676.400,00	
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	640.000.000,00	-	-	-	-	-	-	435.676.400,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	-			5 Dokumen	640.000.000,00			-	-	-	-	435.676.400,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.676.400,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	45.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPT PPD BATU AJI
		UPT PPD KIJANG						751.500.000,00							615.580.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						751.500.000,00							615.580.000,00	
	5.02	KEUANGAN						751.500.000,00							615.580.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						386.500.000,00						-	441.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	386.500.000,00	-	-	-	-	-	-	441.680.000,00	-
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			-	-	-	-	10.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	10.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	163.000.000,00			-	-	-	-	169.700.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			0				0 0	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			0				0 0	20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			0				0 0	3.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.200.000,00	UPT PPD KIJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			0				0 0	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.500.000,00			-	-	-	-	104.980.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				0 0	4.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.480.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			-				-	90.000.000,00	-	-	-	-	-		90.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	7.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.500.000,00			-	-	-	-	156.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.500.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	11.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPT PPD KIJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						365.000.000,00						-	173.900.000,00	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	365.000.000,00	-	-	-	-	-	-	173.900.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	-			5 Dokumen	365.000.000,00			-	-	-	-	173.900.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	30.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.900.000,00	UPT PPD KIJANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPT PPD KIJANG
		UPT PPD TANJUNG BATU						651.760.000,00							576.676.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						651.760.000,00							576.676.000,00	
	5.02	KEUANGAN						651.760.000,00							576.676.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						316.760.000,00						-	371.565.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan]	-	-	-	-	-	316.760.000,00	-	-	-	-	-	-	371.565.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	10.505.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.505.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	163.000.000,00			-	-	-	-	175.800.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.300.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.260.000,00			-	-	-	-	58.760.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	53.760.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.760.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	-	-	-	126.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	11.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						335.000.000,00						-	205.111.000,00	
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	-	-	-	-	-	335.000.000,00	-	-	-	-	-	-	205.111.000,00	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	-			5 Dokumen	335.000.000,00			-	-	-	-	205.111.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	30.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.611.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPT PPD TANJUNG BATU
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI						23.018.473.587,56							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23.018.473.587,56							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						23.018.473.587,56							0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.348.473.587,56						-	0,00	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.45 82.59 86.97	- 79.25 86.67	80.95 81.96 86.72	81.05 82.08 86.77	20.348.473.587,56	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.264.689.768,89			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	17.788.369.768,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	436.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				81 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	620.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	740.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.783.818,67			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	123.783.818,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.670.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian]	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit Persentase ASN yang dibina Karirnya Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	32 39.50 5.99 98.63 99.85	- 20 38	22 38.50 5.15 98.58 99.50	24 38.50 5.28 98.59 99.65	2.670.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1.950.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1.775.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				159 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				600 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI						780.000.000,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						780.000.000,00							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						780.000.000,00							0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						480.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian]	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.57	80.57	81.07	81.57	480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						300.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian]	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							18.987.932.830,12						20.158.967.766,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						16.529.626.830,11							19.701.919.766,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						16.529.626.830,11							19.701.919.766,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.859.847.067,11						-	16.538.293.569,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,68 90 91,32	70.60 84,68 91,02	80 85,18 91,07	80 85,68 91,12	12.859.847.067,11	-	-	-	-	-	-	16.538.293.569,00	-
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined	-			undefined undefined	224.859.184,00			-	-	-	-	185.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	114.859.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.828.153.067,11			-	-	-	-	13.476.293.569,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	10.818.153.067,11	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.466.293.569,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	595.000.000,00			-	-	-	-	575.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	255.000.000,00			-	-	-	-	970.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		390.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	441.834.816,00			-	-	-	-	712.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	291.834.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		312.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	485.000.000,00			-	-	-	-	570.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						3.669.779.763,00						-	3.163.626.197,00	
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	35 41,47 45,75 52,21	-	11,25 29,42 34,78 42,39	26 37,82 49,57 59,84	3.669.779.763,00	-	-	-	-	-	-	3.163.626.197,00	-
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	1.062.077.254,00			-	-	-	-	997.626.197,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				4525 Orang	1.002.077.254,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		967.626.197,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	2.507.702.509,00			-	-	-	-	2.016.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	609.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				1 Dokumen	42.077.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				7160 Orang	1.536.077.254,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.177.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				30 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri														
			Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				B Nilai Akreditasi	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X	NON URUSAN						2.458.306.000,01							457.048.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.458.306.000,01							457.048.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.458.306.000,01						-	457.048.000,00	
		-	-	-	-	-	-	2.458.306.000,01	-	-	-	-	-	-	457.048.000,00	-
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	264.306.000,01			-	-	-	-	262.048.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	264.306.000,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		262.048.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	64.000.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.110.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	2.110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						10.631.223.955,86							10.090.979.516,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.631.223.955,86							10.090.979.516,00	
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN						10.631.223.955,86							10.090.979.516,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						8.431.223.955,86						100 %	9.642.979.516,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan]	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah	70.00 85	- 68.10 82.37	69.50 80 82.87	70.00 81.5 83	8.431.223.955,86	-	-	-	-	-	-	9.642.979.516,00	-
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi	-			100 %	215.000.000,00			-	-	-	-	135.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-			100 %	6.931.223.955,86			-	-	-	-	8.889.779.516,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/ Bulan	6.708.818.082,86	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.652.635.516,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	222.405.873,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		237.144.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	200.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	586.500.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	361.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	300.000.000,00			-	-	-	-	106.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	-			100 %	120.500.000,00			-	-	-	-	99.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.300.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	-			100 %	78.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN						2.200.000.000,00						-	448.000.000,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan kawasan perbatasan]	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Persentase Rencana Aksi yang terealisasi di kawasan perbatasan Persentase Usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	38.48 41.38 65	40 72.26 76.32	20.69 27.59 45	34.48 42.55 50	2.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	448.000.000,00	-
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	-			2 Dokumen	1.600.000.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1.400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-			4 Dokumen	320.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	-			3 Dokumen	280.000.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	92.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				5 Laporan	88.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						14.667.199.049,06							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.879.085.026,06							0,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						13.879.085.026,06							0,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						10.424.559.725,22						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai SAKIP Badan Penghubung Daerah	55.48 90 BB	0 87.03 B	0 88.01 B	55 89 B	10.424.559.725,22	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	302.020.787,50			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	200.039.999,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.320.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	51.660.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.500.127.784,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	4.500.127.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.200.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	31.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	595.667.221,72			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.364.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.312.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	286.989.896,72	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	643.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.159.144.483,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	895.277.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.163.866.549,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.083.399.449,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1.653.399.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						3.454.525.300,84						-	0,00	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung]	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100	12	12	100	3.454.525.300,84	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	3.454.525.300,84			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	2.009.864.693,84	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				1 Laporan	313.125.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				1 Laporan	345.666.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1 Laporan	51.859.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1 Laporan	734.009.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X	NON URUSAN						788.114.023,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						788.114.023,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						788.114.023,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	788.114.023,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	438.114.023,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	253.380.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	184.733.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT						46.407.847.383,35							55.195.249.127,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						46.407.847.383,35							55.195.249.127,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						46.407.847.383,35							55.195.249.127,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						41.207.400.289,35						90 % 50 % 100 %	43.929.849.911,00	
		[persentase capaian indikator Kinerja Bidang Urusan]	Capaian SAKIP Inspektorat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	86.24 92 A	0 88.07 A	85.65 88.09 A	85.76 89 A	41.207.400.289,35	-	-	-	-	-	-	43.929.849.911,00	-
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			21 Dokumen	252.819.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	430.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	52.819.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	33.747.906.218,35			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	34.050.242.964,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				132 Orang/ Bulan	33.175.650.218,35	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		33.450.346.964,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	529.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		491.896.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	42.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		108.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	74.732.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	86.983.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	40.983.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		40.962.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	33.749.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		46.021.500,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	2.040.198.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	2.143.089.030,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	193.400.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		142.692.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	75.785.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		90.396.530,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	1.694.058.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.810.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	76.954.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	3.306.016.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	4.407.939.101,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		90.199.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		538.729.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	510.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		498.279.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		19.975.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		2.769.755.301,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	40.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		40.999.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	580.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	1.314.655.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		214.655.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Laporan	363.834.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	403.834.816,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	291.834.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		291.834.816,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	-			100 %	841.892.455,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	1.093.105.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	275.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		275.175.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	348.677.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		519.890.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	98.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		98.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						3.223.230.040,00						100 % 88 % 10 % 90 % 100 %	7.379.144.000,00	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas Persentase Program Strategis Daerah yang dilakukan pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	100 91.17 92	100 79 88	100 42.86 85.29 89	100 88.24 90	3.223.230.040,00	-	-	-	-	-	-	7.379.144.000,00	-
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			14 Laporan 279 Laporan	2.386.666.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	5.929.144.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				85 Laporan	611.156.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				80 Laporan	438.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.705.764.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				3 Laporan	438.121.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		823.380.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	308.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			53 Laporan	836.563.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	1.450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	152.379.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				30 Laporan	684.183.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.977.217.054,00						2 Jumlah 12 % 2 Jumlah 100 % 100 %	3.886.255.216,00	
		[Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi]	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki level Kematangan MR level 2 ke atas Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	1 12 20	0 12 18	1 12 18	1 12 18	1.977.217.054,00	-	-	-	-	-	-	3.886.255.216,00	-
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan</i>	-			6 Rekomendasi	525.770.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	891.255.216,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomend asi	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		415.686.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomend asi	225.770.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		475.569.216,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan/asistensi Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	-			34 Perangkat Daerah 34 Perangkat Daerah	1.451.446.702,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-	2.995.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 Perangkat Daerah	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		385.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	700.598.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		1.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				34 Perangkat Daerah	250.848.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		560.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						54.135.815.448,33							41.640.810.468,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						11.989.857.226,77						-	18.092.752.547,00	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik]	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.42 88.60 89.64	75.3 83.88 88.54	75.32 83.97 88.55	75.34 84.85 88.56	11.989.857.226,77	-	-	-	-	-	-	18.092.752.547,00	-
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	502.382.015,00			-	-	-	-	582.198.487,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	267.991.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		294.790.829,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	123.995.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.395.415,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	110.394.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.012.243,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.173.853.344,54			-	-	-	-	12.304.395.454,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	9.592.408.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.304.804.947,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	543.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		833.477.040,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	26.525.998,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.870.344,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11.176.684,44	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.243.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	37.255.615,33			-	-	-	-	149.221.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				61 Paket	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.688.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	22.353.369,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.532.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	556.603.515,05			-	-	-	-	2.166.511.783,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	141.571.338,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		623.746.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.688.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.941.347,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.797.612,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.353.369,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.517.382,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.902.246,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.657.497,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	316.677.352,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.121.960.696,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.451.123,07	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.828.748,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	29.804.492,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		131.314.994,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	313.987.373,28			-	-	-	-	1.149.006.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	135.160.419,69	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		361.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	111.766.845,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		492.431.226,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	67.060.107,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.458.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	287.988.346,29			-	-	-	-	1.268.841.878,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	223.533.691,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		984.862.453,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15.736.772,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.334.317,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.717.882,58	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		214.645.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	117.787.017,28			-	-	-	-	472.577.166,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	10.878.639,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.798.704,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	62.077.299,92	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		219.937.471,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7.575.462,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.697.249,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	37.255.615,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.143.742,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						3.291.201.000,00						-	3.249.079.448,00	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Persentase Pemuda dan Ormas yang sesuai ketentuan yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara Presentase Konflik Antar Suku dan Etnis yang tertangani	0.0029 100	0 100	0.0029 100	0.0029 100	3.291.201.000,00	-	-	-	-	-	-	3.249.079.448,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pemuda dan Ormas yang sesuai ketentuan yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara Jumlah Penanganan Konflik Suku dan Etnis (Dengan Satuan:Kasus)	-			6270 Orang 1 Kasus	3.291.201.000,00			-	-	-	-	3.249.079.448,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.614.990,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				6066 Orang	1.394.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		272.614.990,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.626.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.844.317,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.750.907,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.377.267,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	71.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.377.267,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		138.797.612,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				35 Orang	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.015.959.505,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						14.070.933.852,62						-	6.314.166.997,00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pemerintahan Dalam Memberikan Pendidikan Politik di Provinsi Kepri	100	0	100	100	14.070.933.852,62	-	-	-	-	-	-	6.314.166.997,00	-
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi dan lembaga pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pendidikan politik	-			12 Partai dan Lembaga	14.070.933.852,62			-	-	-	-	6.314.166.997,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6114 Orang	4.276.083.947,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		521.373.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	9.744.849.905,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.531.677.361,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						3.944.274.173,26						88 %	1.971.554.093,00	
		[Meningkatkan ketertiban organisasi Organisasi kemasyarakatan]	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	85.71	97	85	85	3.944.274.173,26	-	-	-	-	-	-	1.971.554.093,00	-
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	3.944.274.173,26			-	-	-	-	1.971.554.093,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		338.544.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				40 Orang	3.844.274.173,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.371.893.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						3.604.232.000,00						-	1.305.073.716,00	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	Presentase Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	3.604.232.000,00	-	-	-	-	-	-	1.305.073.716,00	-
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	3.604.232.000,00			-	-	-	-	1.305.073.716,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1200 Orang	299.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		308.593.518,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	3.255.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		735.363.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						17.235.317.195,68						-	10.708.183.667,00	
		[Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	17.235.317.195,68	-	-	-	-	-	-	10.708.183.667,00	-
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	17.235.317.195,68			-	-	-	-	10.708.183.667,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Orang	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		238.136.114,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1190 Orang	6.541.831.835,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.103.047.151,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.116.233,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	10.223.485.360,26	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.105.884.169,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							3.967.074.441.226,57							3.259.842.975.473,79	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	Rasio Gini	Indeks	0,359-0,371
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46-7,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,17-3,77
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,29-6,22
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	65,24
7	Indeks Harmoni	Indeks	Bagus
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,61-0,63
9	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	180,77-191,90
10	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	49,87



7.2 Indikator Kinerja Daerah

IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi. Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2

Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,67
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	3,065
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	67,29
5	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	51,8
6	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	15,90
7	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	5,03
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,92
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	0,505
10	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	85,75
11	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	79,70
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,58
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	71,85
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	84.37-84.51
4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	11,05
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.327-0.322
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	61,68
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,78



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,32
9	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,355
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	14,35
11	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,05
12	Persentase Desa Mandiri	%	23,64
13	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	90
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	48,21
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,48
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	29,28
17	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	83
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi Membaca)	%	61,09
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	30,76
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	13,92
21	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	74,24
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	72,44
23	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	%	5,63
24	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	2,92
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	54,48
26	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	55
27	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	44,66
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,556



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
3	Rasio Konektivitas	Rasio	0,72
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,11
5	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	%	52,65
6	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	41.71-42.19
7	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	39,12
8	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	72,46
9	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,48
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	60,72
11	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	Inovatif
12	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	2,68
13	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	1,62
14	Tingkat Inflasi	%	1.5-3.5
15	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,12
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	16,5
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	52,28
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	2.722,6
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,60
20	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	15,15
21	Intensitas energi primer	SBM/Milyar Rupiah	135,4
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	73,96
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	47,95
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	77,68
2	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Indeks	51,23
3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	68,46
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,33



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,74
6	Predikat SAKIP	Predikat	BB
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
8	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,33
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,24
11	SAKIP	Nilai	BB
12	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72,02
13	Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	%	100
14	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,79
15	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71,50
16	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6,85
17	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan	%	100
18	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	74,36
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	628,49
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	100
3	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	100
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,46
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	88,94
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
9	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	Angka	0,012
10	Rasio peserta didik per kelas	Rasio	36
11	Persentase Konten Pendidikan	%	25
12	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	Nilai	65,46



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
13	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	Nilai	61,87
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	100
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	93
2	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	90
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
4	Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10%	%	14,29
5	Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib	Peringkat	Utama
6	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	Rasio	4,28
7	Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	85
8	Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud	Peringkat	Satelit
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80
11	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	10
12	Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun	%	60
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,85
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
15	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	5,9
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,60
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,65
19	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
20	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100
21	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Per 1000	0,33
22	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	7
23	Hipertensi dalam pengendalian	%	15
24	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	91
25	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	98,90
26	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1000	1,99
27	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kabupaten/kota	1
28	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	89
29	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	98,91
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	70
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	21,43
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
6	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	27,27
7	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	82,18
8	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	8
9	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,113
10	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	37,04
11	Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	%	0
12	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	24,49



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
13	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	85,38
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,80
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,80
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
2	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	53,25
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
4	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	5,50
5	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	79,50
6	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit	100
7	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	28,57
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,72
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	88
7	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,29
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,71
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	79,19
10	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	2,71
11	Persentase SDM aparaturnya satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	%	71,36
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
13	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,55
14	Persentase penanganan pra bencana	%	59,45
15	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
16	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	69,36
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	1,57
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB
3	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	11,11
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,43
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	0,40
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100
8	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
9	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	%	100
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,30
11	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	2,38
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
13	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	%	100
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	0,01
15	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	panti		
16	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,45
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,57
4	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	(%)	52,28
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,45
6	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	79,45
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,79
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	71,79
9	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas	%	50
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	54
11	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	79,19
12	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
13	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
14	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	77,50
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,45
16	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	15,80
17	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	15,80
18	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	15,80
19	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah	%	81,75



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	Provinsi		
20	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,78
21	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	20,03
22	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	214,22
23	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	40,62
24	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	5,14
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	96
2	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	96
3	Rasio Kekerasan Anak	Rasio	5,91
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	77,15
5	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	85,71
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	43,33
7	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan	%	55,81
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,25
9	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	13,03
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,80
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	84
2	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	83,19
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	90,1



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	≤10
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
7	Persentase Cadangan Pangan	%	75,06
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase luas lahan yang di bebaskan untuk kepentingan umum	%	45
2	Persentase Fasilitas Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau	%	0
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha	%	32,93
2	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	12,20
3	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100
4	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	59,57
5	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	%	6,64
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,45
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
8	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	%	53,57
9	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa	%	53,33
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,43
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	41,46
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
2	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99,77
4	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi	%	38,64
5	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
6	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	63
7	Pemanfaatan data kependudukan	%	78,03
8	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya	%	52,36
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	47,39
3	Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar	Desa	15
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina	%	11,14
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,95
6	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	90
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
8	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100
9	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	10,91
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,25
2	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	68
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,50
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	82,69
5	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	34,61
6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	%	10,50
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	58,40
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	%	52,50
3	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	81,50
4	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	62,84
5	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	%	84,62
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,53
7	Kinerja lalu lintas provinsi	Rasio	0,24
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks	72
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	76
4	Nilai Keterbukaan informasi Publik	Nilai	70
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	86,11
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	39,89
2	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	30,50
3	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	5,82
4	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	9,16
5	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	35,19
6	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	18,88
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	81,26



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,32
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	%	16
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	%	16
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	%	16
4	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Dokumen	16
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	16
7	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	86,36
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	4,00
9	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	5,00
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Nilai	47,35
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Orang	7
3	Persentase Kwartir terfasilitasi Pengembangan Kepramukaan	%	18,97
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	1,89
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	77
7	Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional	%	0,76
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	%	0,23
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	7,98
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,80
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	daerah		
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	46
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	46
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	8,33
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0,18
3	Persentase peningkatan upaya konservasi koleksi museum setiap tahun	%	13,03
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	28,09
6	Persentase Tingkat kompetensi SDM Sejarah	%	13,33
7	Persentase Tingkat kesadaran Pelajar se-Tingkat SLTA/ sederajat tentang sejarah lokal		0,59
8	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	49,31
9	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,73
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86,5
11	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan	%	17,34
12	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	7,66
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	14
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT Perpustakaan M. Sani Batam	Orang	4.154
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,69
6	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78,31
7	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	Orang	50.800
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,35
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	19,17
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	%	26,32
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	41,37
2	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	90
3	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	%	92
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	316230,66
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42.508,16
7	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13.500
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,53
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,83
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	6,54
2	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	11,61
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1,95
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	3.512.500
6	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,70



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
7	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,58
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,95
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	9,00
10	Tingkat hunian akomodasi	%	46,50
11	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	0,34
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,11
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	435
2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	19.960,1
3	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	54
4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	65
5	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	Hektar	82
6	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	28.628,71
7	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	%	746
8	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	30.614,18
9	Produksi Ternak	Ton	19.247,61
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	24,28
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5
BB	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
1	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	24,00
2	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	21,67
3	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	14,98
4	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	21,80
5	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	18,89
6	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	SBM/Milyar Rupiah	1,185
7	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	%	28,60



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
8	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	%	2,56
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,43
14	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	%	100
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,44
16	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	%	100
17	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	520,70
BC	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
2	Rasio Elektrifikasi	%	99,20
3	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	27,27
4	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	%	59
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	87,5
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,65
BD	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	86,85
2	Persentase Perizinan Berusaha Perdagangan yang difasilitasi	%	100
3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Ekspor	%	100
4	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi	%	35
5	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri	%	2,11
6	Indeks Tertib Niaga	Indeks	61-80
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,93



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
9	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	84,79
10	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	9,08
11	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
12	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,95
13	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	77,77
14	Tertib Usaha	%	84,79
BE	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	0,85
2	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif	Dokumen	1
3	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	7
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
6	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	5,00
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100
9	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100
BF	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru	%	33,3



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan		
2	Persentase bidang ahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	45,9
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	31,25
BG	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
3	Skor LPPD	Skor	2,55
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	91
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
7	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General	Skor	2,17
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
11	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Sangat Baik
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
13	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	Persentase	100
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
15	Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	Persentase	100
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
17	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi	Indeks	40,4
18	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	Persentase	85
19	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	73
20	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan	Persentase	96



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
21	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
22	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
23	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	73
24	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
25	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	73
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
32	Persentase OPD yang menerapkan Tata Laksana sesuai ketentuan	Persentase	83,72
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,15
35	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP	Nilai	11,90
BH	4.02 - SEKRETARIAT DPRD		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100
2	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100
BI	5.01 - PERENCANAAN		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100
3	Capaian Kinerja Program RPJMD	Predikat	ST
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,00
5	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	%	100
6	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
7	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	%	80
8	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	78,98
9	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80,95
10	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	46,94
11	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	%	73,47
12	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	77,11
13	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko	%	14,29
14	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	58,82
15	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100
16	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100
17	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100
18	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	47,83
19	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	18,64
20	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	20
21	Persentase keselarasan Renja PD dengan	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
	Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
22	Persentase Ketersediaan Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
23	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
24	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	46
25	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	52
26	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	100
BJ	5.02 - KEUANGAN		
1	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	%	100
2	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan	%	92,00
3	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-3,09
4	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	3,89
5	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	4,52
6	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-0,26
7	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	0,38
8	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	4,63
9	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-0,41
10	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-1,83
11	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-0,25
12	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-2,41
13	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3
14	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100
15	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,29
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,32
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,47
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,08
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,3
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,18
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,82
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	94,22
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,35
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,05
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,25
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,25
30	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,31
31	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
32	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	91,96
33	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	%	-3,41
34	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	%	100
35	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	%	12,83
36	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,25
37	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	27
38	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100
39	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	76,15
40	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	%	35
BK	5.03 - KEPEGAWAIAN		



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
2	Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit	Nilai	38,50
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,57
4	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	80,98
5	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	82,17
6	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	Nilai	24,00
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	98,59
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,77
9	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	%	99,65
10	Persentase ASN yang dibina Karirnya	%	5,28
11	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	68,49
12	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	89,03
13	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	37,62
BL	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	40,72
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	49,57
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
4	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,68
5	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	23,75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,12
7	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	37,82
BM	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	100
2	Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan	%	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
3	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	%	80
4	Persentase Inovasi yang dilaporkan	%	75
5	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	Karya	20
BN	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN		
1	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	50
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
3	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83
4	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	42,55
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5
6	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	34,48
BO	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
1	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	%	100
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B
3	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	64,92
4	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	%	100
5	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	%	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89
BP	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH		
1	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI	Perangkat Daerah	1
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
3	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas	%	88,24
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89
5	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	100
6	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan	Rekomendasi	5
7	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	Perangkat Daerah	12
8	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	85,76



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(01)	(02)	(03)	(4)
9	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	%	100
10	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	Perangkat Daerah	34
11	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	%	100
12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
13	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
BQ	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	85
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
3	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	%	38,89
4	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100
5	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	%	100
6	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	%	100
7	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	%	0,002
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,56
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	84,85



BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai dengan RPJMD, pembangunan tahun 2026 mengambil tema akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia, didukung kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan arah kebijakan tahun 2026 dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2026.

RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. RKPD akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang perlu dipedomani dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2026.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam Renja Perangkat Daerah.



3. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
4. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2026.
5. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
6. Guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya digunakan oleh Bappeda dalam melakukan evaluasi RKPD Tahun 2026.
7. Masyarakat, akademisi dan dunia usaha diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan menjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan tercapainya sasaran RKPD di tengah dinamika ketidakpastian pembangunan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, manajemen risiko harus terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi sejak awal dan ditangani secara efektif. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengantisipasi risiko strategis seperti fluktuasi ekonomi, perubahan iklim, keterbatasan konektivitas antarpulau, ketimpangan layanan dasar, hingga risiko tata kelola dan teknologi yang mempengaruhi kinerja pembangunan.

Penerapan manajemen risiko di tingkat daerah mendorong setiap perangkat daerah untuk menilai risiko dalam program prioritasnya, menetapkan tingkat urgensi, dan merumuskan langkah mitigasi yang terukur. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian output, tetapi juga menjaga stabilitas pencapaian hasil pembangunan (outcome). Dengan memanfaatkan pemantauan berkala, analisis berbasis data, dan integrasi dengan sistem SPBE serta SIPD, manajemen risiko pembangunan menjadi instrumen yang memperkuat pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas daerah. Secara keseluruhan, penerapan kerangka manajemen risiko yang antisipatif dan adaptif memastikan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tetap berjalan efektif dan berkelanjutan, serta mampu mencapai prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.



Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam mendukung pencapaian visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**.